

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN (PPMK) DALAM RANGKA
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
KOTA BAU-BAU**



**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Magister Sains dalam Ilmu Administrasi Publik
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun oleh:

**ZANURIAH
NIM 014938495**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2009**

ABSTRAK**Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Dalam Rangka
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Kota Bau-Bau**

Zanuriah

Universitas Terbuka

zanuriahbuton@gmail.com

Kata Kunci : pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan

Salah satu penyebab terjadinya kegagalan pelaksanaan kegiatan pembangunan di daerah dikarenakan program atau kegiatan pembangunan tersebut tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat dan juga tidak menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat. Cara efektif untuk mencapai keberhasilan pembangunan di daerah adalah dengan melibatkan masyarakat secara langsung mulai dari proses identifikasi masalah sampai dengan memecahkan masalah tersebut. Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bau-Bau telah dilakukan berbagai kegiatan pembangunan dan salah satu strateginya adalah dengan melakukan kebijakan desentralisasi fiskal pada tingkat Kelurahan yang dipaket dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK). Penulisan TAPM ini akan melihat (1) Bagaimana PPMK dilihat dari Dukungan Birokrasi, Partisipasi Masyarakat, Peran Stokholders ? dan (2) Bagaimana pelaksanaan PPMK ini dapat memberdayakan masyarakat sebagai upaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat?. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Data primer diperoleh dari observasi dan wawancara dari semua unsur yang berkompeten dalam program PPMK, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen ataupun referensi yang telah ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas dari program yang diselenggarakan di Kelurahan dengan dukungan birokrasi dan sumber daya manusia memperoleh hasil yang positif. Keterlibatan aktif masyarakat dan peran aktif organisasi masyarakat (LPM) terlaksana dengan baik sehingga pencapaian pemberdayaan masyarakat dapat terwujud.

ABSTRACT

Village (*Kelurahan*) Community Empowerment (PPMK)
in effort to enhance community welfare
Kota Bau-Bau

Zanuriah

Universitas Terbuka

zanuriahbuton@gmail.com

Keywords : Community empowerment and welfare

One of the reason of development activities in local level failure because of the development program or activity is not local community institution base or not based on the community proposals and do not offer problem solving on community problems. To gain successful development in local area, it necessarily needs to directly involve community starting from problems identification to problems solving. There are many development activities have been conducted as an effort to enhance Bau-Bau Community welfare. One of them is by implementing fiscal decentralization policy in village (*Kelurahan*) level which is attached in Village Community Development Program (*Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK)*). The objectives of writing TAPM are to conduct investigation on (1) how PPMK will be seen in bureaucracy support, community participation, Stockholders roles' perspective? and (2) how PPMK implementation can develop community in effort to enhance community welfare?. This research was used qualitative design. The primary data is obtained through observation and interview from all accountable components in PPMK program, meanwhile the secondary data is gained from document of available reference. The finding of the research points out that most of the village (*Kelurahan*) implementing program with bureaucracy cooperation and human resource have resulted in positive impact on the program. An active participation of community and community institution held well lead to community development achievement comes to real action and achievement.

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

P E R N Y A T A A N

TAPM yang berjudul Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Bau - Bau adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jakarta,

2009

Yang Menyatakan,



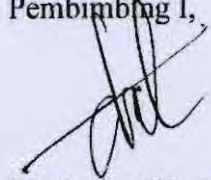
ZANURIAH
NIM. 014 938 495

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

JUDUL TAPM : Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
(PPMK) Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan
Masyarakat Kota Bau - Bau.
NAMA : ZANURIAH
NIM : 014 938 495
PROGRAM STUDI : Magister Administrasi Publik

Menyetujui :

Pembimbing I,



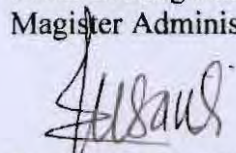
M. Oudrat Nugraha, Ph.D
NIP

Pembimbing II,



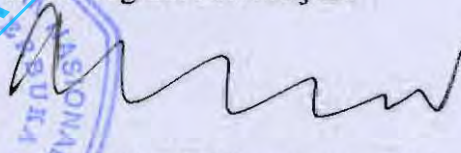
Dr. Sandra Sukmaning A, M.Ed, MA
NIP. 19590105 198503 2 001

Mengetahui :

Ketua Bidang Ilmu/Program
Magister Administrasi Publik.

Dra. Susanti, M.Si.
NIP. 19671214 199303 2 002

Direktur Program Pascasarjana



Prof. Dr. Udin S. Winataputra, MA
NIP. 19451007 197302 1 001

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

NAMA : ZANURIAH
 NIM : 014 938 495
 PROGRAM STUDI : Magister Administrasi Publik
 JUDUL TAPM : Program Pemberdayaan Masyarakat
 Kelurahan (PPMK) Dalam Rangka
 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota
 Bau-Bau.

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program
 Magister (TAPM) Program Pascasarjana, Program Studi Administrasi Publik,
 Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 23 Desember 2009
 Waktu : 08.00 – 10.00 WITA

Dan Telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji
 Nama : Drs. Wawan Ruswanto (.....)

Penguji Ahli
 Nama : Prof. Dr. Wempy Banga, M.Si (.....)

Pembimbing I
 Nama : M. Quadrat Nugraha, Ph.D (.....)

Pembimbing II
 Nama : Dr. Sandra Sukmaning A, M.Ed., MA (.....)

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah swt, atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan TAPM dengan Tema “ PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (PPMK) DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KOTA BAU-BAU “. Penyusunan TAPM ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan akademik bagi mahasiswa Program Pascasarjana Bidang Ilmu Administrasi Universitas Terbuka Kendari, guna meraih gelar Magister Administrasi Publik (MAP). Pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini sudah pada tempatnya penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Rektor Universitas Terbuka dan Kepala Universitas Terbuka UPEJI Kendari selaku Pengelola Program Studi Magister Administrasi Publik beserta segenap tim pengajar dan staf akademik yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah berusaha memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dan pelayanan administrasi yang baik dan lancar
2. Ibu Suciati, Ph. D sebagai Asisten Direktur PPs Universitas Terbuka dan ibu Dra. Susanti, M.Si ketua Bidang Ilmu Program MAP yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam penyelesaian TAPM ini.
3. Bapak M Qudrat Nugraha, Ph.D selaku dosen pembimbing I dan ibu Sandra Sukmaning Aji, M.Ed, dosen pembimbing II yang telah membimbing dengan penuh kesabaran, tekun dan bijaksana yang begitu banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan serta megarahkan penulis sehingga selesainya penulisan TAPM ini.

4. Bapak Bupati Buton, yang telah memberikan kesempatan belajar bagi penulis.
5. Bapak Drs. H. La Ode Hasirun Mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Buton yang telah memberikan bantuan, motivasi, dan dorongan, baik material maupun non material.
6. Ibunda Ziana dan Ayahanda Ld. Jafar serta mertua saya Ibunda Wa Fina dan saudara-saudara saya yang selalu berdoa dan memberikan nasehat agar selalu tabah dan taqwa kepada Allah swt dalam menghadapi segala cobaan dan kesulitan yang dihadapi penulis dapat teratasi.
7. Suami dan anak-anak tercinta yang telah memberikan motivasi, semangat dan doa di dalam menyelesaikan pendidikan magister.
8. Kepada rekan-rekan yang tak dapat kami sebutkan satu persatu dengan segala kerelaannya telah banyak memberikan masukan-masukan dalam penyelesaian TAPM ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua budi baik dan jasa-jasa Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian.

Namun kembali lagi sebagai kodrat penulis yang juga sebagai manusia biasa yang tidak luput dari sifat alpa dan lupa. TAPM ini mungkin masih sangat jauh dari kesempurnaan, maka dari itu saran dan kritik yang sifatnya membangun dari pembaca sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan TAPM ini.

Demikian, kami utarakan semoga TAPM ini dapat bermanfaatnya bagi para pembaca dalam mempelajari Ilmu Administrasi Publik.

Kendari, Maret 2009

Penulis

ZANURIAH

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstract.....	i
Abstrak.....	ii
Lembar Persetujuan.....	iii
Lembar Pengesahan.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	viii
Daftar Gambar.....	x
Daftar Tabel.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II. KERANGKA TEORITIK.....	6
A. Kajian Teori.....	6
1. Konsep dan strategi pembangunan.....	6
2. Pemberdayaan masyarakat.....	8
3. Partisipasi masyarakat.....	12
4. Dukungan birokrasi.....	14
5. Kebijakan publik.....	18
6. Kesejahteraan masyarakat.....	21
B. Kerangka Berfikir.....	26
1. Visi dan misi pemberdayaan.....	27
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberdayaan.....	28
3. Prinsip-prinsip pemberdayaan.....	32
C. Definisi Konsep dan Operasional.....	37
BAB III. METODE PENELITIAN.....	40
A. Desain Penelitian.....	40
B. Subyek Penelitian.....	40
C. Instrumen Penelitian.....	41
D. Prosedur Pengumpulan Data.....	41
E. Teknik Analisis Data.....	42

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Gambaran Umum Kota Bau – Bau.....	43
1. Letak geografis, luas dan batas wilayah.....	43
2. Topografi dan hidrologi.....	45
3. Keadaan demografis.....	46
B. Deskripsi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Sebagai Strategi Pemberdayaan Masyarakat Kota Bau-Bau.....	57
C. Organisasi Pengelola dan Pelaksana.....	60
D. Problematika untuk memulai Pemberdayaan dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat.....	74
E. Program Pemberdayaam Masyarakat Kelurahan (PPMK) Sebagai Local Policy Government.....	88
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN.....	120
A. Simpulan.....	120
B. Saran.....	122
DAFTAR PUSTAKA.....	124
LAMPIRAN 1. Hasil Kegiatan Pembangunan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Tahun Anggaran 2006 Kota Bau-Bau.....	127
LAMPIRAN 2. Hasil Kegiatan Pembangunan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Tahun Anggaran 2007.....	130
LAMPIRAN 3 Hasil Kegiatan Pembangunan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Tahun Anggaran 2008.....	134
LAMPIRAN 4 Pedoman Wawancara Mendalam (Indepeth Interview Guide).....	138
LAMPIRAN 5 Transkrip Hasil Wawancara Mendalam.....	139

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Berpikir.....	36
Gambar 4.1. Struktur Organisasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PPMK) Kota Bau-Bau.....	61
Gambar 4.2. Alir Pelaporan dan Monev.....	73

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 4.1. Batas Wilayah Kota Bau-Bau menurut Daerah.....	44
Tabel 4.2. Penduduk Kota Bau-Bau menurut kecamatan Tahun 2001 – 2007.....	46
Tabel 4.3. Jumlah dan Rata-rata laju penduduk Kota Bau-bau menurut kecamatan Tahun 1990, 2000,2007.....	48
Tabel 4.4. Kepadatan Penduduk Kota Bau-Bau menurut Kecamatan Tahun 1990, 2000, 2007.....	49
Tabel 4.5. Persebaran Penduduk Kota Bau-Bau menurut Kecamatan Tahun 1990, 2000, 2007.....	50
Tabel 4.6 Penduduk Kota Bau-Bau menurut kelompok umur dan Jenis kelamin Tahun 2006-2007.....	51
Tabel 4.7. Jumlah Sekolah, Guru, Murid menurut Tingkat Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Tahun 2007/2008.....	53
Tabel 4.8. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid di luar Lingkup Departemen Pendidikan Nasional menurut Departemen/Dinas yang membawahi Tahun 2007/2008.....	53
Tabel 4.9. Dosen Perguruan Tinggi, dan Mahasiswa menurut Perguruan Tinggi Tahun 2007/2008.....	54
Tabel 4.10. Fasilitas dan Tenaga Kesehatan di Kota Bau-Bau menurut Kecamatan Tahun 2007.....	55
Tabel 4.11. Tempat peribadatan di Kota Bau-Bau menurut Kecamatan Tahun 2007.....	56

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan bertumpu pada manusia atau berorientasi pada kerakyatan sehingga pilihan masyarakat terhadap arah, tujuan dan jalan yang di tempuh dalam pembangunan diharapkan dapat meningkatkan secara sepenuhnya keberdayaan serta keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan. Pada pemerintahan orde baru telah mencoba mempraktekkan strategi alternatif, yaitu strategi pembangunan yang berorientasi kerakyatan. Strategi pembangunan kerakyatan berusaha mengadopsi strategi pembangunan dari bawah, tetapi pelaksanaan dan hasilnya tidak mencerminkan perencanaan pembangunan bercorak hasil perencanaan dari bawah (*bottom up planning*). Hasil akhir dari mekanisme *bottom up* menghasilkan kebijakan pembangunan, namun di putuskan dan ditentukan secara terpusat oleh pemerintah melalui mekanisme Daftar Isian Proyek (DIP) dan inpres. Kondisi ini terjadi akibat pola pemerintahan yang sentralistik, dan dominasi pemerintah yang sangat besar di masa Orde Baru, yang memandang pemerintah dan rakyat daerah sebagai objek pembangunan (yang tidak memiliki kreativitas dan inovasi dalam pembangunan), serta berimplikasi pada pola pembangunannya yang bersifat beragam. Konsep *good governance* setelah bergulirnya reformasi menjadi isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan pemerintahan, termasuk pembangunan dan pelayanan masyarakat. Konsep *good governance* berakar pada suatu gagasan adanya saling ketergantungan (*interdependence*) dan interaksi yang bermacam-macam penentu kebijakan di semua tingkat negara, yakni pemerintah swasta dan masyarakat dalam menjalankan

fungsinya masing-masing. Implementasi paradigma *good governance* sebagai alternatif penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik sebenarnya menjadi komitmen pemerintah Indonesia (melalui Undang-Undang no. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan mengalami perubahan dengan Undang-Undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang efektif diberlakukan mulai tahun 2005). Pada peraturan perundangan ini, kewenangan dalam pengambilan keputusan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik serta pengelolaan keuangan, lebih diserahkan kepada mekanisme kerja Pemerintahan Daerah yaitu Pemerintah Daerah bersama DPRD.

Salah satu strategi yang mampu mengakomodir strategi pembangunan yang bersifat *bottom up* dengan *frame work good governance* pada era desentralisasi ini adalah strategi pemberdayaan. Dengan demikian program pemberdayaan merupakan program pemerintah, asumsi ini didasarkan pada pemikiran bahwa jika strategi pemberdayaan ini di adopsi oleh pemerintah daerah dan menjadi program pemerintah daerah, maka keberlanjutan Program akan banyak memberi manfaat, karena pemerintah daerah lebih memahami masyarakatnya dan strategi pengembangannya. Di lain sisi birokrasi di tingkat lapangan akan lebih berhati-hati dalam mengelola, karena *performance* pengelolaan program menjadi pengukuran kinerja dan akuntabilitas kepada birokrasi atasnya dan kepada masyarakatnya secara langsung. Selain itu program yang bersumber dari inovasi daerah, akan mendekatkan kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip dan tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan *good governance*, yakni

pengembangan kehidupan demokrasi, pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas serta meningkatkan peran serta masyarakat.

Lebih dari itu kebijakan desentralisasi adalah untuk lebih mendekatkan penyelenggaraan pemerintah ditingkat lokal dengan masyarakat lokal untuk melahirkan sebuah penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang mandiri dan berkelanjutan dengan dukungan sumberdaya lokal. Pemerintah Kota Bau-Bau dengan segenap masyarakat Kota Bau-Bau menyadari hal tersebut dan melahirkan program yang bersumber dari aspirasi masyarakat yang ditindak lanjuti dengan lahirnya kebijakan desentralisasi anggaran untuk semua kelurahan yang ada di wilayah kota Bau-Bau.

Kebijakan desentralisasi anggaran oleh pemerintah kota yang telah disetujui oleh DPRD Kota Bau-Bau bertujuan untuk menanggapi program yang direncanakan melalui Musrembang kelurahan dan Musrembang kecamatan. Oleh karena itu, kebijakan ini dapat di jadikan motivasi untuk memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga bermanfaat dalam meningkatkan perekonomian.

Penyelenggaraan program pembangunan partisipatif dan kebijakan desentralisasi anggaran dipaket dalam bentuk Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Kota Bau-Bau. Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Kota Bau-Bau pada dasarnya merupakan kebijakan desentralisasi fiskal di tingkat kelurahan yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bau-Bau. Hal ini merupakan upaya pemerintah Kota Bau-Bau untuk memberikan respon positif dalam menanggapi belum terakomodasinya beberapa usulan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrembang) baik pada tingkat kelurahan, kecamatan, maupun tingkat kota pada tahun anggaran berjalan. Program ini dapat menjadi motivasi untuk memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang diarahkan pada tercapainya peningkatan dinamika kehidupan ekonomi sosial masyarakat.

B Perumusan masalah

Pergeseran paradigma program pemberdayaan yang bersifat nasional, seragam dan terpusat ke arah peranan lebih besar yang akan dimainkan oleh pemerintah daerah membuka peluang daerah untuk berinovasi mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan strategi pembangunan daerah.

Melalui program pemerintah dalam konteks otonomi daerah, maka pertanyaan yang kemudian muncul dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di Kota Bau-Bau dilihat dari dukungan birokrasi, partisipasi masyarakat dan peranan *stakeholders* ?
2. Sejauh mana Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di Kota Bau-Bau dapat memberdayakan masyarakat ?

C Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mendeskripsikan program pemberdayaan masyarakat Kelurahan PPMK di Kota Bau-Bau ditinjau dari :
 - a. Dukungan birokrasi dalam pengelolaan program PPMK,
 - b. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan program PPMK,
 - c. Peran Stakeholders lainnya dalam program PPMK
2. Mendapatkan informasi sejauh mana Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) dapat memberdayakan masyarakat di Kelurahan Kota Bau – Bau.

D Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktisnya yakni sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kota Bau-Bau dalam memahami persoalan pemberdayaan masyarakat dan mengembangkan strategi pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan di era desentralisasi/otonomi daerah.

2. Kegunaan Akademis

Kegunaan praktisnya yakni sebagai bahan referensi bagi peneliti lainnya yang meneliti hal serupa.

BAB II KERANGKA TEORITIK

A. Kajian Teori

1. Konsep dan strategi pembangunan

Meskipun hakekat pembangunan memiliki berbagai penafsiran dan tidak dapat di definisikan secara tepat namun secara umum pembangunan menurut Esman (dalam Tjokrowinoto: 2001) adalah suatu proses perubahan dari satu kondisi ke kondisi nasional lain yang dipandang lebih baik, atau kemajuan yang mantap dan terus menerus menuju kepada “perbaikan” kondisi kehidupan manusia. Pembangunan dapat juga diartikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana, berkelanjutan untuk mencapai suatu situasi tertentu. Menurut Siagian (2003), pembangunan dapat dibagi ke dalam berbagai dimensi yaitu; dimensi pembangunan politik, dimensi pembangunan ekonomi, dimensi pembangunan Sosial Budaya dan dimensi pembangunan pertahanan keamanan.

Strategi pembangunan ekonomi memfokuskan pada pertumbuhan ekonomi dengan sasaran peningkatan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) atau Gross National Product (GNP). Strategi pembangunan ini bersifat *top Down*, memfokuskan pembangunan pada sektor industri padat modal dan berpusat di perkotaan, dengan proyek besar/raksasa dan menggunakan teknologi tinggi. Ditempuhnya strategi ini diharapkan terjadi *trickle down effect* (efek menetes ke bawah), sehingga pendapatan dapat didistribusikan pada masyarakat yang berada disekitarnya, tetapi harapan ini tidak menjadi kenyataan bahkan menjadi sebaliknya yaitu ketimpangan pendapatan yang sangat tajam disatu sisi pertumbuhan meningkat tetapi di sisi lain terjadi

kesenjangan pendapatan yang sangat besar dan berimplikasi pada menurunnya taraf hidup masyarakat bawah. Strategi ini banyak dilakukan di negara-negara maju dan pusat-pusat perkotaan sebagai pusat pertumbuhan.

Strategi ini tidak sesuai dengan karakteristik negara Indonesia. Hal ini untuk memunculkan pandangan baru tentang pembangunan ekonomi yang mencoba memasukkan agenda kemiskinan, pengangguran dan distribusi pendapatan sebagai hal yang harus diperhatikan dalam proses pembangunan. Strategi ini dikenal dengan pemerataan pertumbuhan (*redistribution With Growth*) yang menghasilkan strategi pembangunan dari bawah atau (*bottom up*). Strategi ini memandang bahwa proses pembangunan harus berdasarkan pada mobilisasi sumber daya manusia, alam dan kelembagaan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar penduduk di wilayah yang bersangkutan. Konsep pembangunan berorientasi pada kebutuhan dasar, padat tenaga kerja, industri kecil, sumber daya alam daerah, desa dan kecenderungan untuk menggunakan teknologi tepat guna untuk dapat mengembangkan konsep pembangunan ekonomi. Pembangunan diisyaratkan bertumpu pada kemampuan ekonomi dalam negeri, tepatnya pada kemandirian., Pembaharuan strategi pembangunan ini berusaha memadukan pertumbuhan dan pemerataan yang salah satu arahnya adalah pemihakan pada pemberdayaan masyarakat (Sumodiningrat:1997).

2. Pemberdayaan masyarakat

a. Konsep pemberdayaan

Pemberdayaan mengandung dua pengertian; yang pertama adalah *to give power or authority*, meliputi; memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang/belum berdaya. Pengertian kedua adalah *to give ability to or enable*, meliputi; pemberian kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu (Priyono dan Pranaka: 1996). Istilah pemberdayaan merupakan adopsi dari dunia barat yang dikenal dengan "*Empowerment*". Pemberdayaan yang dimaksudkan disini lebih kepada pemberian "Daya" bukan "kekuasaan" dari pada "Pemberdayaan" itu sendiri (Gunawan Sumodiningat: 1997).

Suharto (1997:215) mengatakan pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang merujuk pada:

- a. Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar.
- b. sebuah keadaan psikologis yang di tandai oleh rasa percaya diri, berguna mampu mengendalikan diri dan orang lain.
- c. pembebasan yang di hasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang yang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur struktur yang masih menekan.

Batasan pemberdayaan merupakan pembaharuan lembaga-lembaga sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya, sehingga peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri masyarakat merupakan unsur yang penting.

Adanya pemberian daya kepada masyarakat oleh pemerintah maka partisipasi masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan perlu diperhatikan.

Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau kondisi yang memudahkan kemungkinan potensi masyarakat untuk dapat berkembang. Hal ini didasari pada logika bahwa tidak ada manusia atau masyarakat yang tidak memiliki daya. Manusia dapat saja belum memahami akan kemampuan atau daya yang dimiliki maka mungkin saja daya tersebut dirasakan belum mampu untuk dikembangkan secara mandiri. Bila asumsi ini yang berkembang maka, menurut (Sulistiyani:2004), pemberdayaan dapat dikatakan upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya sehingga mengantarkan pada proses kemandirian.

b. Strategi pemberdayaan.

Winarni (dalam Sulistiyani: 2004) mengatakan bahwa strategi dalam melakukan pemberdayaan meliputi pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), dan terciptanya kemandirian. Sulistiyani (2004) mengatakan bahwa pemberdayaan tidak saja terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, akan tetapi pada masyarakat yang memiliki daya yang masih terbatas dapat pula di kembangkan hingga mencapai kemandirian. Kemandirian masyarakat disini merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang di pandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan

mempergunakan daya kemampuan dari masyarakat itu sendiri. Sejalan dengan pemikiran Winarni tersebut, konsep pemberdayaan menurut Chambers (dalam Sasmita : 1996) dapat dilakukan melalui tiga jurusan : Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya dengan mendorong (*encoureg*), memotivasi, dan membangkitkan kesadaran (*awarencss*), Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Ketiga, memberdayakan mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, karena kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat.

Strategi pemberdayaan masyarakat, khususnya pemberdayaan ekonomi masyarakat, erat kaitannya dengan menciptakan kesempatan kerja dan peluang berusaha, sebagai wujud dan kebijakan pemberdayaan masyarakat, yang secara langsung mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran. Sehingga dibutuhkan kebijakan pemberdayaan masyarakat, yang berorientasi pada pengembangan usaha ekonomi masyarakat untuk mewujudkan kondisi tersebut.

c. Tujuan pemberdayaan.

Tujuan pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat disini merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai dengan kemampuan untuk

memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan-pemecahan masalah yang di hadapi (Sulistiyani:2004).

Program pemberdayaan memberikan kekuatan pada keluarga atau rumah tangga sebagai berikut

- a. Kekuatan sosial, menyangkut akses terhadap dasar-dasar produksi tertentu suatu rumah tangga, misalnya informasi, pengetahuan dan keterampilan, partisipasi dalam organisasi sosial, dan sumber-sumber keuangan. Bila ekonomi rumah tangga tersebut meningkatkan aksesnya pada dasar-dasar produksi di atas, maka kemampuannya dalam menentukan dan mencapai tujuan sudah meningkat. Peningkatan kekuatan sosial dapat dimengerti sebagai suatu peningkatan akses rumah tangga terhadap dasar-dasar kekayaan produktif mereka.
- b. Kekuatan politik, meliputi akses setiap anggota keluarga terhadap proses pembuatan keputusan terutama keputusan yang mempengaruhi masa depan mereka sendiri. Kekuatan politik bukan hanya kekuatan untuk memberikan suara, tetapi juga merupakan kekuatan untuk menjadi vokal dan bertindak secara kolektif. Pengaruh politik yang efektif akan tampak tidak hanya pada waktu suara-suara individu "meninggi" sebagai pengaruh dan partisipasi individu terhadap basis lokal maupun personal, melainkan juga pada saat suara tersebut didengungkan bersama-sama dengan suara asosiasi-asosiasi politik yang lebih luas.
- c. Kekuatan psikologis, digambarkan sebagai rasa potensi individu yang menunjukkan perilaku percaya diri. Pemberdayaan psikologis seringkali tampak sebagai suatu keberhasilan dalam domain sosial politik. Rasa potensi pribadi yang

semakin tinggi akan memberikan pengaruh positif dan kursif terhadap perjuangan rumah tangga. Bila rumah tangga memiliki kekuatan sosial maka dengan sendirinya rumah tangga tersebut akan dapat berdaya.

3. Partisipasi masyarakat.

Sejalan dengan konsep pemberdayaan yang telah dijelaskan sebelumnya, yang memposisikan masyarakat selain sebagai objek juga sekaligus menjadi subjek pembangunan. Pada kondisi ini dibutuhkan peranan dan keterlibatan yang aktif dari masyarakat, sehingga partisipasi dan kerjasama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan dapat terwujud. Dalam pengertian ini rakyat diasumsikan memiliki aspirasi nilai budaya yang perlu diakomodasikan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan bahkan pelestarian hasil-hasil pembangunan terhadap suatu program pemerintah. Terdapat nilai-nilai yang dimiliki atau dipegang oleh masyarakat setempat dimana program tersebut dilaksanakan, karena nilai-nilai ini memiliki peranan yang cukup penting dalam mendorong atau memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi atau ikut serta kedalam suatu program. Menurut Ruky (2003), nilai adalah sebagai pegangan seseorang, bersama dengan persepsi, kepribadian dan motif akan mempengaruhi seseorang dalam berlaku dan bersikap. Hal ini juga dipertegas oleh Gitosudarmo dan Mulyono (1996), yang mengatakan bahwa seseorang akan terdorong untuk melakukan suatu tindakan karena dia merasa memiliki kebutuhan yang ingin dipenuhinya, dengan kata lain kebutuhan akan mendorong dari belakang untuk

melakukan suatu kegiatan dan akan ditarik dari depan oleh harapan hasil yang akan ditimbulkan dari kegiatannya itu

Britha M (2001) mengatakan partisipasi memiliki banyak makna yang berbeda, antara lain :

- a. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dan masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.
- b. Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan menanggapi proyek- proyek pembangunan.
- c. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.
- d. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak sosial.
- e. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri.

Batasan partisipasi dapat dilihat beberapa persyaratan seperti sifat sukarela, peran aktif. Dialog dua arah secara konstruktif harus berjalan untuk tercapainya keterlibatan dan peranserta sesungguhnya dan oleh untuk masyarakat. Sejalan dengan pemikiran tersebut Ife (1996), memberikan beberapa alasan yang mendorong keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam suatu program yaitu:

- a. Masyarakat akan berperan serta jika masyarakat menganggap memang bermanfaat dan penting bagi mereka.
- b. Peran serta yang dilakukan akan membawa kearah perubahan yang lebih baik.
- c. Peran serta masyarakat diperlukan dan dihargai bukan hanya sebagai memenuhi persyaratan formal.
- d. Masyarakat merasa memang mampu untuk ikut berperan serta dan akan didukung pihak lain dalam kegiatan tersebut.
- e. Dari proses dalam peran serta tidak asing bagi masyarakat setempat atau sesuai dengan tatacara dan nilai-nilai setempat.

Berdasarkan penjelasan di atas terjadinya partisipasi masyarakat tidak secara otomatis masyarakat akan berpartisipasi tanpa adanya kondisi-kondisi yang mendorong atau memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam suatu program termasuk program pembangunan yang ada di dalamnya.

4. Dukungan birokrasi

Dukungan birokrasi dianalogikan dengan “*red tape*” atau kesemrawutan dengan segala bentuk kerja yang tidak efektif, pemborosan dan keangkuhan dan berbagai praktek perkoncoan, nepotisme serta berbagai pandangan miring terhadap birokrasi Indonesia bila dilihat dan kacamata awam. Tetap hal tersebut tidak sepenuhnya benar dikarenakan masih banyak masyarakat awam yang kurang mengerti hakekat dan konsep birokrasi yang sebenarnya, oleh karenanya kita harus memahami terlebih dahulu konsep birokrasi itu sendiri. Menurut Chander dan Plano (dalam Thoha:1991) birokrasi adalah “*system of authority relations defined by rationality development*” atau suatu sistem dan hubungan-hubungan wewenang yang ditugaskan melalui aturan-aturan yang dibangun secara rasional. Kemudian sebagai organisasi yang menjalankan sebuah kewenangan yang ada padanya birokrasi memperoleh otoritasnya atau legitimasinya bersumber dari otoritas tradisional), otoritas kharismatik dan otoritas rasional. Dari penjelasan tersebut dapatlah dikatakan bahwa salah satu sumber kewenangan birokrasi berupa otoritas atau legitimasi bersumber dari otoritas rasional merupakan ciri utama dan wujud organisasi modern sebagaimana konsep birokrasi ideal yang menganut paham weberian.

Birokrasi juga didefinisikan oleh Almond dan Powel (Alfian : 1991) sebagai sekumpulan jabatan atau tugas yang terorganisir secara formal yang berkaitan dengan

jenjang yang kompleks dan tunduk pada pembuat peran formal. Birokrasi Pemerintah menurut Thoha (2003), diartikan sebagai *officialdom* atau kerajaan pejabat dari sesuatu bentuk organisasi yang digolongkan modern. Di dalamnya terdapat tanda-tanda bahwa seseorang mempunyai yurisdiksi yang jelas dan pasti, mereka berada dalam area official yang yurisdiktif. Di dalam yurisdiksi tersebut seseorang mempunyai tugas dan tanggungjawab resmi (*official duties*) yang memperjelas batas-batas kewenangan pekerjaannya. Mereka bekerja dalam tatanan pola hierarki sebagai perwujudan dan tingkatan otoritas dan kekuasaannya. Mereka memperoleh gaji berdasarkan keahlian dan kompetensinya dan proses komunikasinya didasarkan pada dokumen tertulis (*the files*). Dikenal suatu model birokrasi yaitu birokrasi weberian yang memiliki karakteristik adanya spesialisasi atau pembagian kerja, adanya hirarki yang berkembang, adanya suatu sistem dan suatu prosedur dan aturan-aturan, adanya hubungan-hubungan kelompok yang bersifat impersonal dan adanya promosi dan jabatan yang berdasarkan atas kecakapan (Thoha, 2003). Selain itu Thoha melihat birokrasi Weber sebagai suatu mesin yang dibuat dalam bentuk biro-biro untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, disini birokrasi atau pejabat birokrasi tidak menetapkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai, karena hal tersebut merupakan area pejabat politik, pejabat birokrasi hanya sebagai alat atau mesin untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pejabat politik, pada birokrasi hegelian melihat bahwa birokrasi merupakan jembatan atau mediator yang menghubungkan kepentingan antara pemerintah dengan particular (kekuasaan politik dalam masyarakat), dengan kata lain birokrasi hegelian ini memposisikan birokrasi netral terhadap kekuatan-kekuatan masyarakat dan pada konsep birokrasi Marx,

menunjukkan keberadaan birokrasi pemerintah yang memihak pada kekuatan politik yang memerintah (Thoha, 2003).

Dari berbagai konsep birokrasi tersebut yang membedakan pandangan birokrasi menurut Weber, Hegel dan Marx terlepas dan orientasi birokrasi dan birokrasi menempatkan posisinya dalam menjalin hubungan antara kekuatan politik dengan masyarakat, untuk melihat birokrasi dalam melaksanakan fungsinya, Mas'ud, mengatakan berdasarkan perbedaan tugas pokok atau misi yang mendasari organisasi sekurang-kurangnya dibedakan dalam tiga kategori yaitu :

- a. Birokrasi pemerintahan umum, kegiatan pemerintah yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum, termasuk memelihara ketertiban dan keamanan dan tingkat pusat sampai daerah. Tugas ini bersifat "mengatur" (*regulative function*).
- b. Birokrasi pembangunan, yaitu organisasi pemerintah yang menjalankan salah satu bidang atau sektor khusus guna mencapai tujuan pembangunan seperti pertanian, kesehatan, pendidikan dan lain-lain, fungsi pokoknya adalah fungsi pembangunan. (*development function*).
- c. Birokrasi pelayanan, yaitu unit organisasi yang pada hakekatnya merupakan bagian atau langsung berhubungan dengan masyarakat, seperti rumah sakit, sekolah yang memberikan pelayanan atas nama pemerintah, fungsi pemerintah adalah pelayanan (*service*) kepada masyarakat (Mas'ud, 2003).

Dari berbagai penjelasan tersebut yang dimaksud birokrasi disini adalah organisasi pemerintah yang bekerja secara teratur dengan sistem yang baku dan hirarkis dengan pembagian tugas secara spesifik dan didasari pada rasionalitas dalam pencapaian tujuan dan memperoleh gaji dari negara.

Komitmen dalam kamus besar bahasa Indonesia (1995:515) diartikan sebagai perjanjian (keterikatan) untuk melakukan sesuatu kontrak. Jadi di sini birokrasi dilihat sebagai suatu lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas-tugas sebagaimana tersebut. Yang memiliki suatu perjanjian atau keterikatan tugas pokoknya sebagai

birokrasi pembangunan, yaitu birokrasi yang concern (terhadap keinginan terjadinya suatu proses pemberdayaan terhadap masyarakat, melalui pengembangan dengan pemberian dorongan, motivasi dan ransangan serta pemberian daya dan dilindungi agar masyarakat dapat mandiri dengan tidak selalu tergantung kepada Pemerintah.

Kontribusi dalam kamus besar bahasa Indonesia (1995: 523) diartikan sebagai sumbangan, disini merupakan suatu bentuk perhatian dan pemberian dari pemerintah/birokrasi terhadap suatu program pemberdayaan masyarakat, bagaimana pemerintah memberikan perhatian dan akses terhadap peluang ekonomi termasuk permodalan, lapangan kerja dan ketersediaan sarana prasarana pendukung bagi kelompok sasaran suatu program pemberdayaan. Serta dapat pula memberikan motivasi, dorongan dan rangsangan untuk berkembang, serta yang tidak kalah pentingnya adalah perlindungan dan keberpihakan terhadap masyarakat yang kurang berdaya tetapi dengan tidak membuat mereka tergantung terus kepada pemerintah. Untuk mendukung proses pemberdayaan masyarakat ini peranan partisipasi masyarakat sebagai objek sekaligus subjek pemberdayaan haruslah terlihat. Dapat juga melihat dan bagaimana memposisikan pemerintah atau birokrasi sebagai fasilitator dalam proses sistem edukasi kepada masyarakat, seperti pada tahapan penentuan rencana kegiatan diharapkan dapat memberikan kontribusinya dengan cara :

- a. Memberikan ruang yang lebar kepada masyarakat untuk menyampaikan ide, masukan, kritik, rasa keberatan, permintaan dan sebagainya, tanpa dibebani sanksi atau ancaman;

- b. Memberikan informasi secara transparan dan *aksesibel* kepada masyarakat yang menyangkut berbagai bentuk pembangunan lokal ataupun nasional;
- c. pelibatan masyarakat dalam formulasi kebijakan dengan melihat profesionalisme, kompetensi disamping nilai kepentingan masyarakat terhadap program pemberdayaan. (Sullstiyani: 2004).

Dari penjelasan tersebut komitmen dan kontribusi birokrasi dapat dikatakan pemerintah daerah memiliki komitmen pada pemberdayaan masyarakat yang berusaha memberikan daya pada masyarakat dengan kontribusi pemerintah sebagai wujud dan komitmen birokrasi berupa penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya.

5.. Kebijakan publik

Dalam berbagai literatur kebijakan publik, telah banyak para pakar memberikan definisi terhadap kebijakan publik, salah seorang pakar kebijakan publik Chandler dan Plano (dalam Keban, 2008:60) menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang kontinum oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan. Adanya pemenuhan terhadap nilai pemerintahan yang baik agar dapat mendukung pemerintah dalam menghasilkan kebijakan publik sebagaimana yang diharapkan oleh Chandler dan Plano tersebut dan mensyaratkan perlunya keterlibatan rakyat dalam pemerintahan menunjukkan adanya penyedia ruang publik untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Kebijakan publik menurut Shafritz dan Russell (dalam Keban, 2008:61) dimana kebijakan sebagai "*what ever a government decides to do or not to do* " (kebijakan

publik adalah apapun yang diputuskan oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu). Menurut Keban (2008:60) kebijakan publik tersebut dapat dibedakan ke dalam :

- a. Bentuk "*regulatory*" yaitu mengatur perilaku orang.
- b. Bentuk "*redistributif*" yaitu mendistribusikan kembali kekayaan yang ada, atau mengambil kekayaan dari yang kaya lalu memberikan kepada yang miskin.
- c. Bentuk "*distributif*" yaitu melakukan distribusi atau memberikan akses yang sama terhadap sumberdaya tertentu, dan
- d. Bentuk "*constituen*" yaitu yang ditujukan untuk melindungi negara.

Dari berbagai penjelasan tersebut, dapatlah dikatakan bahwa orientasi kebijakan sangat "*concern*" kepada masyarakat dan bagaimana memberdayakan serta memecahkan masalah publik. Dibutuhkan kebijakan publik yang mampu mengembangkan, memberi daya dan kemandirian bagi masyarakat yang masih kurang berdaya.

Kebijakan publik sebagai rangkaian kegiatan atau langkah tindakan di dalamnya terdapat proses yang memvisualisasikan sebagai rangkaian tahap yang saling bergantung dan diatur menurut urutan waktu. Dunn (2003:22-25) membagi proses pembuatan kebijakan kedalam lima tahapan :

- a. Penyusunan agenda kebijakan.

Pada tahap penyusunan agenda ini, harus ditentukan apa yang menjadi masalah publik yang perlu dipecahkan. (Dunn, 2003:226) mengemukakan bahwa perumusan masalah dapat dipandang sebagai suatu proses dengan empat fase yang saling tergantung, yaitu pencarian masalah (*problem solving search*), pendefinisian masalah (*problem definition*), spesifikasi masalah (*problem specification*) dan pengenalan masalah (*problem sensing*)

b. Formulasi kebijakan.

Pada fase ini, para analis mulai mengaplikasikan beberapa teknik analisis dalam upaya memperoleh suatu keyakinan bahwa sebuah pilihan kebijakan adalah lebih baik dari yang lain. Untuk itu dapat digunakan perangkat seperti analisis biaya dan manfaat, analisis keputusan dimana keputusan harus diambil dalam ketidakpastian dan keterbatasan informasi. Dalam konteks ini, penekanannya lebih pada pembahasan tentang alternatif - alternatif apa saja yang dapat dikembangkan dan berkaitan dengan masalah siapa saja yang terlibat dalam perumusan kebijakan. Untuk itu dibutuhkan *forecasting*, sehingga akan dihasilkan masa depan kebijakan (*policy futures*) berikut konsekwensi masing-masing kebijakan tersebut.

c. Adopsi kebijakan

Pada tahap ini ditentukan pilihan-pilihan kebijakan dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus diantara direktur lembaga setelah melalui proses rekomendasi.

d. Implementasi kebijakan

Tahap ini berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program. Pada tahapan ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah terseleksi. Tahap implementasi kebijakan terjadi setelah undang-undang atau peraturan ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut (Winarno, 2008:144-145)

e. Penilaian kebijakan

Pada tahap ini dilakukan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan, apakah telah sesuai dengan yang telah ditentukan atau tidak. Dalam tahap ini juga dilakukan evaluasi guna mengetahui proses pembuatan kebijakan, proses implementasi, konsekuensi kebijakan dan efektifitas dampak kebijakan.

6. Kesejahteraan masyarakat

Untuk lebih memahami tentang apa itu kesejahteraan, maka di bahas mulai dari ilustrasi tentang kemiskina. Kemiskinan adalah fenomena sosial yang nyaris sama tua dengan usia peradaban manusia. Di setiap negara selalu saja ada kemiskinan seberapapun baiknya negara itu. Kemiskinan dan kesejahteraan ibarat dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Ini telah menjadi fatsoen sosial bahwa dimana ada orang kaya pasti ada orang miskin.

Dalam pemahaman umum indikator kemiskinan disebabkan minimnya kepemilikan harta. Namun pemahaman itu kemudian berkembang dengan pemahaman bahwa kemiskinan juga disebabkan oleh keterbatasan akses pelayanan publik. Keterbatasan itu misalnya sulitnya pelayanan kesehatan, sulitnya mendapatkan akses-akses informasi, dan sebagainya. Pheni Chalid (Teori dan isu Pembangunan; 2006. 6.3) dikatakan bahwa kemiskinan yang banyak terjadi sekarang ini, pada umumnya didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan standar hidup minimum.

Dari berbagai pemahaman tentang kemiskinan, maka sangat perlu untuk menentukan ukuran bagi kemiskinan itu sendiri. Ukuran kemiskinan itu menjadi

sangat penting untuk menghitung tingkat perkembangan sosial masyarakat. Pada umumnya ukuran yang diperlukan adalah tingkat kehidupan sosial, ekonomi yang meliputi kesejahteraan, distribusi pendapatan, harapan hidup dan sebagainya.

Berangkat dari pemahaman dan gejala tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa “ Kesejahteraan adalah suatu keadaan atau kondisi seseorang, keluarga, kelompok masyarakat yang mana mereka telah dapat memenuhi kebutuhan standar serta dapat menikmati akses-akses pelayanan publik.

Banyak teori maupun indikator yang memperlihatkan tentang bagaimana mengukur tingkat kesejahteraan, namun yang paling dominan membicarakan indikator kesejahteraan adalah persoalan yang berkaitan dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Berkaitan dengan hal tersebut Mahi (2006 : 7) menyatakan: ”pengembangan perekonomian daerah yang tersusun dengan baik pada dasarnya akan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Ada 3 pilar penentu makro ekonomi suatu negara yakni (1) *pertumbuhan ekonomi*, (2) *pengendalian harga-harga* dan (3) *perluasan kesempatan kerja*.”

Selain persoalan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, persoalan sosial serta sarana dan prasarana juga merupakan indikator yang sangat penting dan relevan untuk dijadikan ukuran keberhasilan pembangunan dalam jangka pendek terhadap implementasi kebijakan pemerintah, membangun .untuk mewujudkan pemberdayaan agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan yang menjadi perbandingan yakni: *Human Development Index (HDI)* dan Indikator BKKBN. Hal tersebut sejalan dengan

pendapat Kuncoro yakni indikator kunci pembangunan pada dasarnya diklasifikasi menjadi (1) indikator ekonomi dan (2) indikator sosial.

Pada umumnya pakar ekonomi memberikan pengertian yang sama terhadap istilah pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, yakni sebagai kenaikan Pendapatan Domestik Bruto/Pendapatan Nasional Bruto (PDB/PNB) saja. Secara umum istilah pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menyatakan perkembangan ekonomi pada negara-negara maju sedangkan pembangunan ekonomi menyatakan perkembangan ekonomi pada negara-negara sedang berkembang.

a. *Human Development Index (HDI)*

United Nations Development Program (UNDP) dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dikaitkan dengan pembangunan sosial ekonomi yang mereka lakukan, baik di negara berkembang maupun di negara maju. Seperti halnya PQLI, HDI melakukan analisis berdasarkan 3 tujuan atau produk pembangunan (Chalid, 2006 : 6.19), yaitu: (1) usia panjang yang diukur dari tingkat harapan hidup, (2) pengetahuan yang diukur dari jumlah orang dewasa yang dapat membaca (diberi bobot dua pertiga) dan rata-rata tahun sekolah (diberi bobot sepertiga), serta (3) penghasilan yang diukur dengan pendapatan riil yang disesuaikan dengan daya beli mata uang masing-masing negara.

Kendati HDI memberikan wawasan yang lebih luas mengenai pembangunan, Todaro (dalam Chalid, 2006:6.19) memberikan catatan berikut:

- 1). Pembentukan HDI sebagian didorong oleh strategi politik yang didesain untuk memfokuskan perhatian pada aspek pembangunan kesehatan dan pendidikan;

- 2). Ketiga indikator tersebut merupakan indikator yang bagus namun bukan ideal (misalnya, Tim PBB ingin menggunakan status nutrisi bagi anak dibawah usia 5 tahun sebagai indikator kesehatan ideal, tetapi datanya tidak tersedia);
- 3). Nilai HDI suatu negara mungkin membawa dampak yang kurang menguntungkan karena mengalihkan fokus dari masalah ketidak merataan dalam negara tersebut;
- 4). Alternatif pendekatannya memandang GNP perkapita, dan kemudian melengkapinya dengan indikator sosial lain masih dihargai;
- 5). Kita harus selalu ingat bahwa indeks ini merupakan indikator pembangunan yang relatif, bukan absolut sehingga bila semua negara mengalami peningkatan pada tingkat tertimbang yang sama maka negara miskin tidak akan memperoleh penghargaan atas kemajuannya.

b. Indikator BKKBN

BKKBN mengeluarkan indikator untuk mengukur kesejahteraan masyarakat dengan cara mengukur pemenuhan kebutuhan baik fisik, maupun sosiologis masyarakat. Indikator tersebut menggambarkan kondisi sosial ekonomi keluarga di Indonesia. Berdasarkan pengukuran yang dilakukan akan didapat kriteria keluarga.

Kriteria keluarga tersebut digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dengan indikator berikut ini:

- 1). Keluarga Prasejahtera, yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti; kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, sandang, papan dan kesehatan.
- 2). Keluarga Sejahtera I (KS-I), yaitu keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar, tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi, dengan indikator keluarga melaksanakan ibadah menurut agama yang dianut, makan dua kali sehari atau lebih, anggota keluarga memakai

pakaian berbeda untuk dirumah, bekerja/sekolah dan bepergian, bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah, jika ada anggota keluarga yang sakit di bawa ke sarana kesehatan.

- 3). *Keluarga Sejahtera II (KS-II)*, yaitu keluarga yang telah memenuhi kebutuhan dasar minimal serta kebutuhan sosial psikologis, tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan pengembangan, dengan indikator anggota keluarga mampu makan daging dan telur, luas lantai rumah untuk tiap penghuni tak kurang dari 8 meter, punya penghasilan tetap, berpendidikan dan ikut program KB.
- 4). *Keluarga Sejahtera III (KS-III)*, yaitu keluarga yang telah memenuhi kebutuhan dasar, sosial psikologis, serta kebutuhan pengembangan, dengan indikator; ada upaya peningkatan pengetahuan agama, memiliki tabungan, ikut kegiatan di lingkungan tempat tinggal, berrekreasi minimal 6 bulan sekali, memperoleh informasi dari surat kabar, majalah, radio atau televisi.
- 5). *Keluarga Sejahtera III-Plus (KS III-Plus)*, yaitu keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar, sosiologis, kebutuhan pengembangan serta aktif dalam kegiatan sosial masyarakat.

B. Kerangka Berpikir

Sebagaimana telah diuraikan, bahwa program pemberdayaan masyarakat merupakan suatu program yang memberdayakan masyarakat pada suatu pendekatan dalam pembangunan yang tidak dapat dilepaskan dan hadirnya paradigma baru pembangunan berpusat pada rakyat (*People centered development*). Paradigma ini menuntut untuk menempatkan masyarakat atau masyarakat sebagai pusat perhatian dan sasaran sekaligus pelaku utama dalam pembangunan. Untuk itu segala upaya pembangunan harus selalu diarahkan pada penciptaan kondisi dan kesempatan yang memungkinkan masyarakat dapat menikmati kehidupan yang lebih baik, dan sekaligus memberi kesempatan yang lebih luas kepada mereka untuk melakukan pilihan-pilihan sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan karakteristik yang mereka miliki.

Pendekatan ini muncul sebagai reaksi terhadap timbulnya berbagai kesenjangan, baik kesenjangan kemajuan antar daerah, kesenjangan kemajuan antar sektor, maupun kesenjangan kemajuan dan kesejahteraan antar kelompok masyarakat, sebagai akibat dan pendekatan pembangunan yang bersifat *top down* dengan lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi. Karena itu pendekatan ini menempuh strategi dengan memberikan perhatian yang lebih banyak kepada lapisan masyarakat bawah yang masih tertinggal dengan memberikan kesempatan, fasilitas, dan perlindungan agar mereka dapat mengembangkan daya dan potensinya secara maksimal sehingga mampu bertahan dengan mencapai taraf hidup yang lebih baik secara mandiri.

1. Visi dan misi pemberdayaan

Visi adalah gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan yang ideal dan realistis. Sesuai dengan pengertian dan tujuan pemberdayaan sebagaimana dikemukakan di muka, maka visi dari pemberdayaan adalah terciptanya masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera dalam bidang kehidupan sehingga mereka mampu memecahkan dan memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri tanpa tergantung dengan pihak lain. Dalam konteks pembangunan, kemandirian disini berarti kewenangan untuk merencanakan, menetapkan, melaksanakan, dan mengendalikan program - program pembangunan sesuai dengan esensi dan prioritas kebutuhan mereka. Kemandirian ini akan dapat menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap seluruh program-program pembangunan yang dilaksanakan. Sehingga akan mengindikasikan adanya demokratisasi dalam pengelolaan pembangunan.

Dengan visi yang demikian itu maka yang menjadi misi dari pemberdayaan adalah mengembangkan dan mendayagunakan semua potensi yang dimiliki oleh masyarakat secara maksimal, baik potensi sumber daya alam maupun sumber daya sosial. Dengan demikian, diharapkan akan dapat meningkatkan ketahanan masyarakat, baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial Budaya, dan pertahanan keamanan, sehingga mereka dapat mempertahankan hidup secara lebih baik. Ketahanan yang dimaksudkan disini bukanlah ketahanan yang bermakna pendekatan security, melainkan suatu dinamika kehidupan masyarakat yang mampu melakukan proses pengembangan dan peningkatan kualitas diri dan lingkungannya secara mandiri.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberdayaan

Keberdayaan suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung sebagai prasyaratnya. Faktor-faktor pendukung yang merupakan prasyarat keberdayaan tersebut meliputi faktor pendidikan, kesehatan, penguasaan akses sumber-sumber kemajuan ekonomi, dan factor social budaya. Keterpaduan dan berbagai faktor tersebut secara serasi akan membentuk suatu kekuatan yang memungkinkan suatu masyarakat yang dapat bertahan (*survive*) dan mengembangkan diri secara mandiri dalam berbagai kondisi untuk mencapai tujuan hidupnya.

a. Faktor pendidikan

Keberdayaan suatu masyarakat mensyaratkan adanya penguasaan tingkat pendidikan yang memadai, atau dengan kata lain keberdayaan suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor pendidikan yang mereka miliki. Pendidikan memang merupakan penanda dan masyarakat modern. Melalui pendidikan masyarakat akan memperoleh informasi, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mempunyai pola pikir rasional dan memiliki sikap ini bisa serta keterampilan yang profesional dalam menghadapi berbagai permasalahan sehari-hari. Karena itu masyarakat terdidik memiliki kemungkinan lebih besar untuk berdaya ketimbang masyarakat yang kurang pendidikan. Faktor pendidikan ini bisa dilihat secara kualitatif. Secara kuantitatif adalah seberapa tinggi tingkat pendidikan formal dan seberapa luas tingkat pendidikan formal tersebut dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan. Semakin banyak jumlah masyarakat yang berpendidikan lebih tinggi maka akan semakin lebih berdaya dalam menghadapi berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Sedang secara kualitatif dapat dilihat dan profesionalisme dan kesadaran masyarakat yang

bersangkutan untuk berpartisipasi dalam program-program pembangunan. Faktor pendidikan memang tidak bisa hanya dilihat dari aspek kuantitas pendidikan formal, tetapi juga harus dilihat dari kualitas keterampilan dan sikap kesadaran masyarakat. Dengan demikian, maka upaya pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya adalah merupakan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan masyarakat. Yakni dalam arti peningkatan wawasan dan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam rangka mengaktualisasikan segala potensi yang mereka miliki untuk dapat mencapai tahap hidup yang lebih baik.

b. Faktor penguasaan akses sumber-sumber kemajuan ekonomi

Keberdayaan suatu masyarakat sangat erat kaitannya dengan masalah ekonomi. Semakin tinggi tingkat ekonomi masyarakat maka akan semakin besar peluang mereka untuk berdaya, sebab diakui atau tidak ekonomi adalah sumber materi kehidupan yang nyata. Karena itu keberdayaan masyarakat juga mensyaratkan dan sangat dipengaruhi oleh penguasaan mereka terhadap sumber-sumber kemajuan ekonomi, seperti akses modal, penguasaan teknologi, akses lapangan kerja, akses pengembangan sumber daya manusia, dan akses pasar. Bagi masyarakat golongan ekonomi lemah beberapa sumber kemajuan ekonomi di atas masih merupakan barang langka dan merupakan kendala utama bagi keberdayaan mereka. Kecilnya modal, rendahnya penguasaan teknologi, sempitnya peluang dan kesempatan kerja, terbatasnya pengembangan sumber daya manusia, dan tidak dikuasainya akses pasar, sering menjadi penyebab utama ketergantungan dan ketertinggalan masyarakat lapisan bawah. Padahal berbagai faktor tersebut merupakan prasyarat keberdayaan yang mutlak diperlukan.

c. Faktor sosial budaya

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya dengan faktor pendidikan, kesehatan, dan akses pada sumber-sumber kemajuan ekonomi, adalah faktor social budaya masyarakat yang bersangkutan. Keberdayaan masyarakat memang tidak bisa dilepaskan dari faktor sosial budaya, bahkan bisa dikatakan bahwa kualitas keberdayaan suatu masyarakat pada hakekatnya merupakan cerminan dan kualitas soasial budaya mereka.

Faktor sosial budaya ini meliputi aspek tata nilai, kelembagaan dan pola hubungan antara kelompok yang ada dalam masyarakat. Keberdayaan suatu masyarakat memang mensyaratkan adanya pemilikan tata nilai yang kondusif. Seringkali terjadi bahwa kendala keberdayaan itu bersumber dan adanya tata nilai social budaya masyarakat yang melahirkan sikap dan perilaku yang berlawanan dengan sikap dan tata nilai yang dipersyaratkan dalam keberdayaan. Sebagai contoh adalah sikap malas yang dilahirkan dari pandangan hidup yang *nerima ing pandum* (menerima nasib apa adanya), padahal keberdayaan mensyaratkan adanya etos kerja yang produktif. Contoh lain adalah sikap boros yang dilahirkan dan pandangan yang mementingkan hidup hari ini, padahal keberdayaan mensyaratkan adanya sikap hemat sebagai perwujudan dan pandangan hidup yang berorientasi ke masa depan. Masih banyak sikap dan tata nilai lainnya yang menjadi prasyarat keberdayaan, seperti tanggung jawab, terbuka terhadap perubahan, berorientasi, dan sebagainya. Apakah sikap dan tata nilai yang demikian itu dipunai dan berkembang dalam masyarakat, hal ini sangat berpengaruh terhadap tingkat keberdayaan mereka.

Di samping hal di atas, faktor sosial budaya yang cukup berpengaruh adalah keberadaan lembaga baik secara masyarakat baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas berkaitan dengan jumlah lembaga informal yang ada di masyarakat dapat menunjukkan tingkat keberdayaan yang tinggi. Secara kualitas berkaitan dengan berfungsi tidaknya lembaga masyarakat yang ada. Semakin berfungsi lembaga masyarakat yang ada menunjukkan semakin tingginya tingkat keberdayaan mereka.

Faktor sosial budaya lainnya yang juga menjadi prasyarat dan berpengaruh terhadap keberdayaan masyarakat adalah pola hubungan antarkelompok yang ada di dalamnya. Apakah pola hubungan antar kelompok yang ada dalam masyarakat bersifat setara dan adil serta tidak ada ketergantungan atau sebaliknya. Masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang didalamnya terdapat pola hubungan antar kelompok yang setara, adil, dan tidak ada ketergantungan dari suatu kelompok tertentu kepada kelompok yang lain.

Dengan demikian, maka upaya pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kongkritnya akan selalu bertumpu pada konteks sosial budaya masyarakat setempat dalam bentuk pemanfaatan nilai dan institusi masyarakat setempat dalam bentuk pemanfaatan nilai dan institusi masyarakat setempat yang telah ada. Pandangan masyarakat terhadap alam lingkungan yang ada disekitarnya adalah potensi sosial budaya yang perlu diakomodasikan. Lembaga-lembaga adat, keagamaan, dan sosial budaya lainnya, merupakan sarana dan wahana pemberdayaan yang harus didayagunakan secara maksimal. Sehingga upaya pemberdayaan masyarakat tidak akan mencabut masyarakat setempat dari akar social dan budaya mereka sendiri.

3. Prinsip-prinsip pemberdayaan

Upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengembangan potensi sumber daya yang mereka miliki haruslah diletakkan di atas beberapa prinsip sebagai berikut :

- a. Pemberdayaan masyarakat harus mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran secara langsung agar dapat berjalan secara efektif, sesuai dengan kehendak, kemampuan, dan kebutuhan masyarakat. Dengan pengikutsertaan tersebut diharapkan akan meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui pemberian pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggung jawabkan segala upaya peningkatan diri yang mereka lakukan. Partisipasi yang dimaksudkan adalah partisipasi yang betul-betul menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pemberdayaan dirinya, bukan hanya sekedar sebagai pemberi dukungan melalui mobilisasi terhadap program-program yang sebetulnya telah dirancang oleh pihak lain, termasuk pemerintah.
- b. Pemberdayaan masyarakat haruslah dilakukan secara terarah (*targetted*), artinya ditujukan langsung. Secara jelas kepada mereka yang betul-betul memerlukan dengan program yang dirancang untuk menyelesaikan permasalahan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Salah satu wujud penerapan prinsip ini adalah dengan memberikan prioritas kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan sebagai sasaran program.
- c. Pemberdayaan masyarakat juga menuntut adanya pemihakan secara nyata terhadap mereka yang perlu diberdayakan. Hal ini perlu dilakukan mengingat pemberdayaan pada prinsipnya adalah upaya *emergency* yang memerlukan

tindakan dan perlakuan khusus. Pemihakan yang terarah kepada mereka yang perlu diberdayakan ini tidak berarti merupakan tindakan diskriminasi, melainkan semata-mata untuk memberikan perlindungan dan percepatan agar proses pemberdayaan berjalan secara efektif. Sebab proses pemberdayaan bagi mereka yang lemah tidak bisa dibiarkan berjalan secara alami tanpa disertai dengan rekayasa dan manipulasi secara terarah dan sistematis. Suatu tindakan memihak dan melindungi masyarakat yang lemah dengan persaingan yang tidak seimbang dan ketergantungan pada pihak yang lebih kuat. Perlindungan adalah upaya untuk menjamin suatu kepentingan pada pihak tertentu yang dipandang perlu mendapatkan pengamanan sebagai wujud dan pemihakan yang perlu dilakukan. Sebab kegiatan pembangunan akan banyak bersinggungan dengan berbagai kepentingan masyarakat yang tidak mustahil akan menimbulkan dilema. Disamping berorientasi pada kepentingan dan pemanfaatan bagi masyarakat secara umum, harus dapat dipastikan bahwa hal itu tidak akan mengesampingkan kepentingan kelompok masyarakat yang justru kurang beruntung. Kepentingan kelompok masyarakat dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung ini sering kurang mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga sering menimbulkan problem sosial sendiri yang justru akan menghambat pencapaian tujuan program.

- d. Pemberdayaan masyarakat juga harus diarahkan untuk memampukan dan memandirikan masyarakat bersangkutan dan bukan untuk menciptakan ketergantungan. Prinsip kemandirian ini amat penting sebab tanpa ada kemandirian tidak mungkin terdapat keberdayaan. Seringkali terjadi bahwa

upaya pemberdayaan dengan memberikan perlakuan, bantuan, ataupun pemihakan dan perlindungan kepada yang lemah justru malah menciptakan ketergantungan dan menghilangkan kemandirian. Karena itu segala tindakan, bantuan, ataupun pemihakan dan perlindungan yang diberikan harus dalam konteks menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya potensi secara mandiri dan berkelanjutan.

- e. Pemberdayaan masyarakat harus dilakukan dengan memberikan kewenangan dalam pengambilan keputusan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengendalian kepada masyarakat melalui forum atau lembaga yang paling dekat dengan masyarakat. Prinsip ini amat penting agar rencana dan pelaksanaan pengelolaan pembangunan dapat betul-betul sesuai dengan potensi dan kebutuhan nyata masyarakat setempat.
- f. Pemberdayaan masyarakat harus dilakukan penuh keterbukaan dengan menciptakan kondisi atau situasi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui segala informasi yang berkaitan dengan perencanaan pelaksanaan, maupun pengelolaan keuangan. Hal ini penting, karena salah satu penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan selama ini adalah kurangnya keterbukaan, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap para pelaku pembangunan. Melalui prinsip dimaksudkan akan terdapat kontrol dan pengawasan secara terbuka oleh masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan sehingga dapat menghindari terjadinya hal-hal yang merugikan pihak masyarakat atau penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan.

g. Pemberdayaan masyarakat harus dilakukan dengan menggunakan segala potensi yang dimiliki masyarakat sendiri dalam setiap kegiatan. Hal ini didasarkan atas kenyataan bahwa dalam diri masyarakat terdapat berbagai potensi yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Di samping itu dengan prinsip tersebut juga akan menumbuhkan partisipasi dan rasa memiliki masyarakat terhadap kegiatan yang sedang dan akan dilaksanakan. Potensi masyarakat tersebut dapat berupa bahan material, dana, maupun tenaga. Karena itu dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan, bahan material, dana, atau tenaga masyarakat yang digunakan harus diperhitungkan sebagai bagian dan sumber pembiayaan kegiatan yang dikeluarkan oleh masyarakat secara swadaya.

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas diperoleh kerangka berpikir tentang kebijakan pemerintah daerah tentang pemberdayaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai berikut:

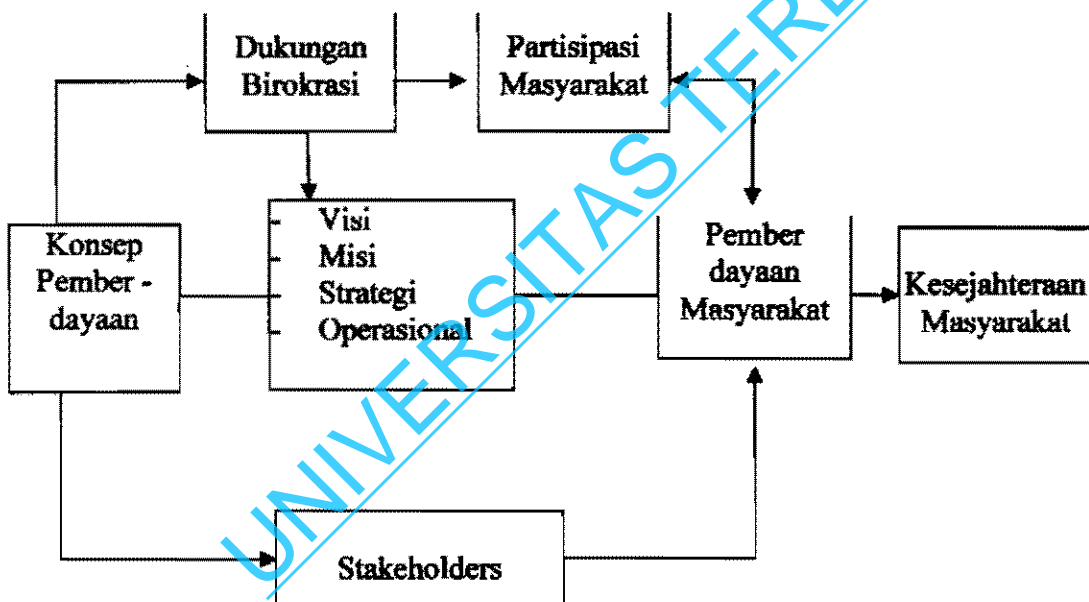
1. Kebijakan pemerintah tentang PPMK, memiliki peluang yang cukup besar untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pemberdayaan masyarakat serta pembentukan dan pengembangan titik pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Apabila kebijakan pemerintah daerah berjalan baik, maka diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Kota Bau-Bau.
2. Kinerja kebijakan pemerintah daerah dinyatakan baik apabila implementasi sesuai dengan rencana serta mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Informasi tentang ketaatan pelaksanaan kebijakan diperoleh berdasarkan hasil pemantauan (monitoring) sedangkan informasi pencapaian tujuan kegiatan diperoleh. Berdasarkan hasil evaluasi implementasi kebijakan pemerintah daerah

ditentukan oleh kebijakan itu sendiri yang didukung oleh organisasi pelaksanaan dan lingkungan dimana kebijakan dilaksanakan apabila faktor tadi baik, maka diasumsikan bahwa implementasi kebijakan berjalan dengan baik.

3. Perubahan derajat tingkat kehidupan masyarakat pada PPMK baik secara kuantitatif maupun kualitatif dapat dilihat dari peningkatan pendapatan per kapita, ketersediaan sarana dan prasarana dasar, kesehatan masyarakat dan sarana kesehatan, pendidikan, serta kondisi perumahan.

Secara garis besar, kerangka berpikir berkaitan dengan implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Bau-Bau dapat dilihat pada gambar (2.1) berikut:

2.1. Skema Kerangka Berpikir



C. Definisi Konsep dan Operasional

Untuk lebih memudahkan kita dalam memahami konsep pemberdayaan dan operasional Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di Kota Bau - Bau, maka penulis akan memberikan gambaran tentang bagaimana pemahaman pemerintah terhadap pemberdayaan serta operasionalnya terutama yang berkaitan dengan kebijakan dan teknis pelaksanaannya.

Pemberdayaan berasal dari kata *daya* yang berarti kekuatan atau kemampuan. Berdaya adalah suatu kondisi atau keadaan yang mendukung adanya kekuatan atau kemampuan itu. Dalam kehidupan bermasyarakat, keberdayaan adalah suatu kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat, sehingga masyarakat yang bersangkutan mampu bertahan dan mengembangkan diri secara dinamis. Keberdayaan ini meliputi keberdayaan di bidang ekonomi, sosial budaya, dan politik, yang merupakan sumber dari ketahanan nasional dari suatu bangsa.

Pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri, secara mandiri. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan demikian pemberdayaan adalah suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian, baik di bidang ekonomi, sosial budaya, dan politik.

Pemberdayaan masyarakat sebagai suatu strategi dalam pembangunan nasional berorientasi pada pemberian kesempatan kepada setiap anggota masyarakat untuk

dapat ikut serta dalam proses pembangunan dengan mendapatkan kesempatan yang sama dan dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara proporsional.

Pemberdayaan dalam bidang *ekonomi*, berarti menyangkut upaya peningkatan pendapatan dan tingkat hidup yang bertumpu pada kekuatan ekonomi sendiri sehingga masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri secara mandiri. Di *bidang sosial budaya*, berarti menyangkut upaya meningkatkan kehidupan sosial budaya yang berakar pada nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat setempat sehingga mereka tidak tercerabut dari akar budaya yang telah melingkupi kehidupan mereka selama ini. Di *bidang politik*, berarti menyangkut upaya peningkatan kemampuan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil keputusan sendiri mulai dari proses perencanaan sampai dengan pemantauan dan evaluasi berbagai program pembangunan yang mereka laksanakan.

Dengan demikian, konsep pemberdayaan bukan hanya menyangkut persoalan ekonomi, tetapi merupakan konsep yang menyangkut semua aspek kehidupan. Kesemua aspek kehidupan itu haruslah diberdayakan secara bersamaan dan integratif. Pemberdayaan ekonomi harus pula disertai dengan pemberdayaan sosial budaya dan politik. Begitu pula sebaliknya, konsep pemberdayaan diyakini sebagai strategi yang tepat dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemampuan ekonomi serta ketahanan nasional. Namun keyakinan tersebut menuntut adanya penerjemahan dalam bentuk program-program dan kegiatan-kegiatan usaha yang nyata. Dalam konteks yang demikian, kebijakan pemerintah kota Bau-Bau melalui program pemberdayaan masyarakat kelurahan (PPMK) telah melaksanakan beberapa program kegiatan baik yang bersifat fisik seperti pembangunan sarana prasarana

maupun pembangunan non fisik yaitu berupa pemberian bantuan dana bergulir bagi masyarakat yang memiliki usaha ekonomi produktif. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, masyarakat dan organisasi masyarakat yang ada di kelurahan diberi ruang yang sangat besar untuk melibatkan diri dan berpartisipasi. Selanjutnya pemerintah, mulai dari tingkat kota sampai dengan tingkat kelurahan dan dibantu oleh fasilitator secara intens terus melakukan bimbingan, arahan agar dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan petunjuk teknis sebagai pedoman umum pelaksanaan PPMK serta mengevaluasi kinerja dan hasil yang dicapai.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengambil unit analisis Pemerintah Kota Bau-Bau. Menurut Heryawan Wasito (1992:6) penelitian kualitatif dasarnya diartikan sebagai berikut, Pertama, suatu usaha untuk mengumpulkan, mencari, menganalisis fakta-fakta mengenai sesuatu masalah. Kedua, penelitian dari suatu bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip (*facts or principles*) dengan sabar, hati-hati serta sistematis. Ketiga, usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.

Moleong (2000:27) berpendapat bahwa penelitian sosial yang digunakan di lapangan adalah metode kualitatif dengan alasan pertama, lebih mudah menyesuaikan di lapangan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat peneliti dengan responden, ketiga, lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

B. Subjek Penelitian

Objek penelitian adalah program pemberdayaan masyarakat berisikan semua kegiatan dalam hal melakukan kegiatan penelitian dan lokasi penelitian berada di Kota Bau-Bau. Sebagai responden dalam penelitian ini adalah masyarakat kelurahan

yang bertempat tinggal di tiga kecamatan yang ada di Kota Bau-Bau yaitu aparat pemerintah, tokoh masyarakat, ketua LPM dan stakeholder.

C. Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan instrument berupa pedoman wawancara, dan wawancara dilakukan pada aparat pemerintah yaitu Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (1orang) selaku penanggung jawab program tingkat Kota Bau-Bau, ketua tem sekretariat tingkat kota (1orang), Lurah yang menjadi obyek penelitian (10orang), tokoh masyarakat masing-masing 3 orang setiap kelurahan yang terdiri dari ketua LPM disemua lokasi penelitian (masing-masing 1orang) *stockholder* yaitu tokoh pendidikan (1orang) dan masyarakat sebagai sasaran program (masing-masing 10 orang).

D. Prosedur Pengumpulan data

Prosedur pengumpulan data di antaranya adalah studi, dokumentasi dan wawancara yang terstruktur dan jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berhubungan dengan obyek dan permasalahan yang diteliti, cara ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan dari berbagai literatur, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berkaitan dengan pokok-pokok masalah.

Data primer adalah suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui penelitian di lapangan.

E. Teknik Analisis Data

Untuk mengolah data atau analisis data yang telah dikumpulkan di lakukan dengan cara triangulasi data (pengecekan keabsahan data) dan analisis isi (*Content Analysis*) jika dengan cara triangulasi kredibilitas data masih menghasilkan data yang berbeda maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut sehingga data dianggap benar, kebenaran dan kecocokannya selama penarikan kesimpulan. Sementara, analisis isi (*Content Analysis*) digunakan pada sebagian penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicabel*), dan sah data dengan memperhatikan konteksnya. Analisis isi berhubungan dengan komunikasi atau isi komunikasi, maka setiap komunikasi selalu berisi pesan dalam sinyal komunikasi, baik berupa verbal maupun nonverbal. Sehingga makna komunikasi menjadi amat dominan dalam setiap komunikasi.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Bau-Bau

1. Letak geografis, luas dan batas wilayah

a. Letak geografis,

Daerah Kota Bau-Bau adalah salah satu daerah yang ada di jazirah Sulawesi Tenggara. Dilihat dari letaknya, Kota Bau-Bau tepatnya berada dibagian selatan pulau Buton dan secara geografis terletak di bagian selatan garis katulistiwa diantara $5,21^{\circ}$ - $5,30^{\circ}$ Lintang Selatan dan di antara $122,30^{\circ}$ - $122,47^{\circ}$ Bujur Timur.

b. Luas wilayah

Kota Bau-Bau adalah merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Buton yang awalnya terdiri dari 4 (empat) kecamatan. Namun semenjak tahun 2006 Kota Bau-Bau telah menjadi 6 (enam) kecamatan dengan luas wilayah 221,00 Km² yang terdiri Kecamatan Betoambari 27,89 Km², Kecamatan Murhum 6,45 Km² (pecahan dari Kecamatan Betoambari), Kecamatan Wolio 17,33 Km², Kecamatan Kokalukuna 9,44 Km² (pecahan dari Kecamatan Wolio) Kecamatan Sorawolio 83,25 Km² dan Kecamatan Bungi seluas 76,64 km².

c. Batas wilayah

Kota Bau Bau berbatasan pada sebelah Utara dengan Kecamatan Kapuntori Kabupaten Buton; sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton sebelah Selatan dengan Kecamatan Batauga Kabupaten Buton dan sebelah Barat dengan Selat Buton.

Gambaran batas wilayah Kota Bau-Bau menurut Daerah seperti pada Tabel 4.1

Tabel 4.1
Batas wilayah Kota Bau-Bau menurut Daerah

No	Daerah	Batas Wilayah			
		Sebelah Utara	Sebelah Selatan	Sebelah Timur	Sebelah Barat
1	2	3	4	5	6
1	Kota Bau -Bau	Kecamatan. Kapontori	Kecamatan Batauga	Kecamatan Pasarwajo	Selat Buton
2	Kec. Betoambari	Selat Buton	Kecamatan Batauga	Kecamatan Murhum	Selat Buton
3	Kec. Murhum	Selat Buton	Kecamatan Betoambari	Kecamatan Wolio	Selat Buton
4	Kec. Wolio	Selat Buton	Kecamatan Sorawolio	Kecamatan Kokalukuna	Kec. Murhum
5	Kec. Koka lukuna	Kecamatan Bungi	Kecamatan Wolio	Kecamatan Sorawolio	Selat Buton
6	Kec. Sorawolio	Kecamatan Bungi	Kecamatan Sampolawa	Kecamatan Pasarwajo	Kec. Wolio
7	Kec. Bungi	Selat Buton	Kecamatan Sorawolio	Kecamatan Kapontori	Selat Buton

Sumber : Kota Bau-Bau Dalam Angka Tahun 2007/2008

2. Topografi dan Hidrologi

a. Topografi

Kondisi topografi Daerah Kota Bau-Bau pada umumnya memiliki permukaan yang bergunung, bergelombang dan berbukit-bukit. Di antaranya gunung dan berbukit-bukit terbentang dataran yang merupakan daerah-daerah potensial untuk mengembangkan sektor pertanian.

b. Hidrologi

Kota Bau-Bau memiliki sungai yang besar yaitu sungai Bau-Bau yang membatasi Kecamatan Wolio dan Kecamatan Murhum dan membelah Kota Bau-Bau. Sungai tersebut umumnya memiliki potensi yang dapat dijadikan sebagai sumber tenaga, irigasi dan kebutuhan rumah tangga.

c. Keadaan iklim daerah Kota Bau-Bau

Keadaan iklim di Daerah Kota Bau -Bau umumnya sama dengan daerah lain di sekitarnya, yang mempunyai dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau.

Musim hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember dan Maret. Pada bulan-bulan tersebut angin barat yang bertiup dari Asia dan Samudera Pasifik yang mengandung banyak uap air. Musim kemarau terjadi bulan Maret sampai bulan Oktober. Pada bulan-bulan ini angin Timur yang bertiup dari Australia kurang mengandung uap air. Pada tahun 2007 terjadi hari hujan sebanyak 168 dengan curah hujan sebanyak 2 017,4mm, dimana curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Pebruari sebesar 362,5 mm, sedangkan curah hujan terkecil terjadi pada bulan September sebesar 12,7 mm.

Suhu udara di Kota Bau-Bau pada tahun 2008 berkisar antara 21,6°C sampai dengan 33,4°C. Untuk kecepatan angin yang terjadi pada tahun 2006, pada bulan september 3,8 Knot/Sec sedangkan kecepatan terendah rata-rata terjadi pada bulan juni yakni sebesar 2,0 Knot/ Sec

3. Keadaan Demografis

a. Jumlah penduduk.

Penduduk daerah Kota Bau-Bau menurut hasil sensus penduduk (SP) tahun 1990 berjumlah 77.224 jiwa dan sepuluh tahun kemudian tepatnya pada sensus tahun 2000 telah bertambah hingga mencapai 106.092 jiwa. Jumlah ini diambil dari hasil sensus penduduk di kecamatan-kecamatan bentukan kota Bau-Bau. Data 2007 proyeksi penduduk yang dilakukan BPS berasal dari survei penduduk Antar Sensus 2005 (SUPAS 05) penduduk Kota Bau-Bau sebanyak 124.609 jiwa. Untuk data selengkapnya jumlah penduduk yang dirinci menurut kecamatan dari tahun 2001 sampai tahun 2007 disajikan pada Tabel 4.2

Tabel 4.2
Penduduk Kota Bau-Bau menurut Kecamatan Tahun 2001-2007

Ta hun	Beto - ambari	Mur Hum	Wo Lio	Koka luku na	Sora wo lio	Bungi	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2001	50 064	-	41 480	-	5 719	10 712	107975
2002	49 913	-	41 570	-	5 865	12 200	109548

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2003	53 482	-	45 475	-	6 161	11783	116901
2004	54 886	-	46 794	-	6 404	12418	120502
2005	55 195	-	47 057	-	6 440	12488	121180
2006	13 648	42075	32406	15101	6 502	12607	122339
2007	13 901	42830	33028	15378	6 624	12848	124609

Sumber : Kota Bau-Bau dalam Angka Tahun 2008
Data 2001-2005 Belum Pemekaran

b. Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kota Bau-Bau pada tahun 1990 sebanyak 77.224 dan pada tahun 2000 sebanyak 106.092 jiwa, sehingga rata-rata laju pertumbuhan pertahun selama kurun waktu 10 tahun sebesar 3,23 % dan kurun waktu tahun 2006 sebesar 1,86 % yaitu dari 122.339 jiwa menjadi 124.609 jiwa ditahun 2007.

Dari enam kecamatan yang ada di Kota Bau-Bau, pertumbuhan penduduk tertinggi ada di Kecamatan Wolio dengan pertumbuhan sebesar 1,92 persen, disusul Kecamatan Bungi 1.91 persen. Sedang pertumbuhan terkecil adalah terdapat di Kecamatan Murhum sebesar 1.79 persen. Selengkapnya jumlah penduduk dan rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kota Bau-Bau menurut kecamatan akan digambarkan pada Tabel 4.3

Tabel 4.3
Jumlah dan Rata-Rata Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bau-Bau Menurut
Kecamatan Tahun 1990, 2000, 2007

Kecama- Tan	Penduduk				Laju - Pertumbuhan (%)	
	1990	2000	2006	2007	1990 - 2000	2006 - 2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Betoambari	33 722	49 039	13 648-	13 901	3,82	1,85
Murhum	-	-	42 075	42 830	-	1,79
Wolio	30766	40985	32 406	33 028	2,91	1,92
Kokalukuna	-	-	15 101	15 378	-	1,83
Sorawolio	4366	5618	6 502	6.624	2,55	1,88
Bungi	8,370	10 450	12 607	12 848	2,24	1,91
Kota Bau - Bau	77.224	106 092	122339	124609	3,23	1,86

Sumber : Kota Bau-Bau dalam Angka Tahun 2008

(-) : Data tidak diperoleh karena masih bergabung pada kecamatan induk.

c. Kepadatan penduduk

Luas areal Kota Bau-Bau adalah 221.00 Km². Kepadatan penduduk kota Bau-Bau tahun 1990 sebesar 349 jiwa per km², kemudian tahun 2000 adalah sebesar 480 jiwa per Km² dan selanjutnya pada tahun 2007 meningkat menjadi 564 jiwa per Km². Selengkapnya kepadatan penduduk Kota Bau-Bau akan kami tampilkan pada Tabel 4.4

Tabel 4.4
Kepadatan Penduduk Kota Bau-Bau Menurut Kecamatan
Tahun 1990, 2000, 2007

Kecamatan	Luas Area (Km ²)	Penduduk			Kepadatan Perpenduduk Per Km ²		
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Beto -	27,89	33 722	49 039	13 901	982	1428	498
2. Murhum	6,4 5	-	-	42 830	-	-	6 640
3. Wolio	7,33	30766	40 985	33028	1 149	1 531	1 906
4. Koka	9,44	-	-	15 378	-	-	1 629
5. Sorawolio	83,26	4 366	5618	6 624	52	67	80
6. Bungi	76,64	8 370	10450	12 848	109	136	168
Jumlah	221,00	77 224	106 092	124 609	349	430	564

Sumber : Kota Bau-Bau dalam Angka Tahun 2008

(-) : Data tidak di peroleh karena belum pemekaran.

d. Persebaran penduduk

Jumlah penduduk Kota Bau-Bau tahun 2007 tercatat sebanyak 124.609 jiwa yang penyebarannya adalah 42.830 jiwa (34,37 persen) di Kecamatan Murhum, 33,028 jiwa (26,51 persen) di Kecamatan Wolio, 15,378 jiwa (12,34 persen) di Kecamatan Kokalukuna, 13.901 jiwa (11,16 persen) di Kecamatan Betoambari, 12.848 jiwa (10,31 persen) di Kecamatan Bungi dan 6.624 jiwa (5,32 persen) di Kecamatan Sorawolio. Selengkapnya persebaran penduduk Kota Bau-Bau menurut kecamatan akan ditampilkan pada Tabel 4.5

Tabel 4.5
Persebaran Penduduk Kota Bau-Bau menurut Kecamatan
Tahun 1990, 2000, 2007

Kecamatan	1990		2000		2007	
	Pendu - Duk	% Per Seba Ran	Pendu duk	% Per Seba Ran	Pendu Duk	% Per Seba Ran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Betoam bari	33 722	43,67	49 039	46,22	13 901	11,16
2. Murhum	-	-	-	-	42 830	34,37
3. Wolio	30 766	39,84	40 985	38,63	33 028	26,51
4. Kokalu kuna	-	-	-	-	15 378	12,34
5. Sorawolio	4 366	5,65	5 618	5,30	5 624	5,32
6. Bungi	8 370	10,84	10 450	9,85	12 848	10,31
Kota Bau - Bau	77 224	100,00	106 092	100,00	124 609	100,00

Sumber : Kota Bau-Bau dalam Angka Tahun 2008

(-) Data tidak diperoleh karena belum pemekaran tahun 1990-2000

e. Umur Penduduk

Umur penduduk Kota Bau-Bau menunjukkan bahwa pada tahun 2007 adalah 59,39 persen atau sebanyak 74.008 jiwa yang termasuk usia produktif dan penduduk non produktif adalah 40,61 persen atau sebanyak 50.601 jiwa. Selanjutnya menurut

jenis kelamin, jumlah penduduk tahun 2007 sebanyak 61.395 jiwa atau 49.27 persen adalah laki-laki dan sebanyak 63.214 jiwa atau 50.73 persen adalah perempuan. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan atau rasio jenis kelamin penduduk tahun 2007 sebesar 97.12 yang berarti setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 97 orang penduduk laki-laki. Selengkapnya penduduk Kota Bau-Bau menurut kelompok umur dan jenis kelamin akan kami tampilkan pada Tabel 4.6

Tabel 4.6

**Penduduk Kota Bau-Bau Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2006-2007**

Kelompok Umur	Laki – Laki		Perempuan		Jumlah	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0 – 4	7212	7 763	7 686	7 440	14 898	15 203
10 – 14	7316	7 877	7907	7 653	15 223	15 530
20 - 24	5590	6 017	6980	6 756	12 570	12 773
35 - 39	3201	3446	3774	3653	6975	7099
50 – 54	1746	1 881	2054	1 988	3 800	3 869
60 – 64	1086	1 170	1328	1 285	2 414	2 455
75 +	380	409	527	509	907	918
Jumlah	57 027	61 395	65 312	63 214	122 339	124 609

Sumber : Kota Bau-Bau dalam Angka Tahun 2008

f. Keadaan sosial

Kota Bau-Bau telah melakukan berbagai usaha guna terciptanya kesejahteraan masyarakat dibidang sosial yang lebih baik. Usaha tersebut meliputi kegiatan dibidang pendidikan, agama, kesehatan, ketertiban dan keamanan masyarakat serta sosial lainnya.

1). Pendidikan.

Sebagaimana diamanatkan oleh GBHN bahwa sasaran pembangunan pendidikan dititikberatkan pada peningkatan mutu dan perluasan kesempatan belajar pada semua jenjang pendidikan yaitu mulai dari tingkat TK sampai dengan Perguruan Tinggi. Upaya peningkatan mutu pendidikan yang ingin dicapai tersebut dimaksudkan untuk mencapai sumber daya manusia yang seutuhnya. Sedangkan perluasan kesempatan belajar dimaksudkan agar penduduk usia sekolah memperoleh kesempatan belajar yang seluas-luasnya. Informasi tentang perkembangan pendidikan meliputi jumlah sekolah, guru dan murid tahun 2007/2008 baik yang berada di bawah lingkup Departemen Pendidikan Nasional maupun di luar Departemen Pendidikan Nasional (Departemen Agama dan Departemen Kesehatan) di Kota Bau-Bau secara berturut-turut akan di tampilkan pada Tabel 4.7 dan Tabel 4.8

Tabel 4.7
Jumlah Sekolah, Guru, Murid Menurut Tingkat Sekolah Di Lingkungan Dinas
Pendidikan Nasional Tahun 2007 / 2008

Tingkat Pendidikan	Sekolah (School)	Guru*	Murid	Rata - Rata		
				Guru Perse Kolah	Murid Per seko Lah	Murid per Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. TK	62	359	2546	6	41	7
2. SD	71	1130	18114	16	255	16
3. SMP	26	688	7970	26	307	12
4. SMU	22	821	9707	37	441	12

Sumber : Kota Bau-Bau dalam Angka Tahun 2008

Tabel 4.8
Jumlah sekolah, Guru Dan Murid Di Luar Lingkup Departemen Pendidikan Nasional
Menurut Departemen / Dinas Yang Membawahi
Tahun 2007 / 2008

Departemen Yang Membawahi / Jenis Sekolah	Status	Sekolah	Guru	Murid
1	2	3	4	5
1. Dep. Agama				
a. Raudatul Athfal (TK)	Negeri	-	-	-
	Swasta	6	31	238
b. Madrasah Ibtidayah (SD)	Negeri	1	38	268
	Swasta	3	29	274
c. Madrasah Tsanawiah (SLTP)	Negeri	1	30	246
	Swasta	4	81	195
d. Madrasah Aliyah / (SMA)	Negeri	1	46	677
	Swasta	2	43	97

1	2	3	4	5
2. Dinas Kesehatan				
a. Sekolah Perawat Kesehatan (PSK)	Negeri	-	-	-
	Swasta	-	-	-
b. Akademi Perawat (Akper)	Negeri	-	-	-
	Swasta	-	-	-
c. Akbid	Swasta	-	-	-

Sumber : Kota Bau-Bau dalam Angka Tahun 2008
 (-) : Data tidak diperoleh

Selain data tersebut di atas, di Kota Bau-Bau terdapat pula lembaga pendidikan tinggi setingkat Universitas sebagaimana digambarkan dalam Tabel 4.9;

Tabel 4.9
 Dosen Perguruan Tinggi dan Mahasiswa Menurut Perguruan Tinggi
 Tahun 2007 / 2008

Perguruan Tinggi	Dosen		Jum Lah	Mahasiswa		Jum Lah
	Tetap	Luar Biasa / Tidak Tetap		Laki - Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. UNIDAYAN	98	30	128	2 332	1 578	3910
2. STAI	20	20	40	232	675	907
3. UNISBUN	32	28	60	272	518	790
4. UMB	75	107	182	1.020	1 080	2100
5. IST	32	9	41	171	244	415
6. AKPER	13	23	36	64	154	218
7. AMIK MILAN	6	7	13	63	70	133
8. AKBID	-	-	-	-	-	-

Sumber : Kota Bau-Bau dalam Angka Tahun 2008
 (-) : Data tidak diperoleh

2). Kesehatan dan Keluarga Berencana

Pembangunan dibidang kesehatan di Kota Bau-Bau diarahkan pada peningkatan tingkat kesehatan dengan memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Upaya perbaikan kesehatan masyarakat tersebut akan ditingkatkan melalui pemberantasan berbagai macam penyakit, perbaikan gizi masyarakat serta pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Demikian pula tujuan pembangunan Program Nasional Keluarga Berencana adalah terwujudnya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan keluarga demi terciptanya Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NfKKBS).

Untuk mencapai sasaran pembangunan diatas, baik di bidang kesehatan maupun di bidang Keluarga Berencana di Kota Bau-Bau telah digiatkan pembangunan sarana dan prasarana serta pelayanan kesehatan Keluarga Berencana.

Data indikator sarana dan pelayanan kesehatan serta jumlah tenaga kesehatan di Kota Bau-Bau akan di sajikan pada Tabel 4.10

Tabel 4.10
Fasilitas dan Tenaga Kesehatan di Kota Bau-Bau Tahun 2003 - 2007

Fasilitas dan Tenaga Kesehatan (1)	2003 (2)	2004 (3)	2005 (4)	2006 (5)	2007 (6)
1. Fasilitas Kesehatan					
a. Rumah Sakit	2	2	2	2	2
b. Puskesmas	9	11	12	12	13
c. Puskesmas Pembantu	16	14	13	13	12
d. Puskesmas Keliling	4	4	9	12	12
e. Puskesmas Plus	-	-	1	3	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Tenaga Kesehatan					
a. Dokter Spesialis					
b. Dokter Gigi	6	6	7	6	6
c. Dokter Umum	4	3	1	6	8
d. Apoteker	14	11	24	23	17
e. Sarjana Kes.masyarakat	2	3	5	5	5
f. Sarjana Keperawatan (SKP)	1	4	8	15	15
	-	-	1	2	2
g. Perawat (DIII + SPK)	228	143	177	185	129
h. Anastesi	2	2	4	2	2
i. Anastesis Lab/ Kesehatan	4	6	4	6	2

Sumber : Kota Bau-Bau dalam Angka Tahun 2008

(-) : Data tidak diperoleh

3). Agama

Kegiatan pembangunan di bidang agama terlihat pada pembangunan sarana peribadatan, pembinaan umat beragama dan kegiatan keagamaan lainnya seperti terlihat pada Tabel 4.11;

Tabel 4. 11
Tempat Peribadatan di Kota Bau-Bau Menurut Kecamatan
Tahun 2007

Kecamatan	Tempat Peribadatan				
	Mesjid	Musholla	Gereja Katolik	Gerja Protestan	Pura / Vihara
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Betoambari	29	14	-	-	-
2. Murhum	-	-	-	-	-
3. Wolio	34	8	1	2	-
4. Kokalukuna	-	-	-	-	-
5. Sorawolio	10	2	-	1	-

1	2	3	4	5	6
6. Bunga	16	2	1	-	1
Jumlah	89	26	2	3	1

Sumber : Kota Bau-Bau dalam Angka Tahun 2008

(-) : Data tidak ada

B. Deskripsi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Sebagai Strategi Pemberdayaan Masyarakat Kota Bau-Bau

Program pemberdayaan dengan memberikan penjelasan tentang latar belakang lahirnya program, apa yang menjadi tujuan dan sasaran program, organisasi pengelola dan pelaksana program serta mekanisme kerja yang menyangkut tahapan pelaksanaan kegiatan ini.

Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Kota Bau - Bau pada dasarnya merupakan kebijakan desentralisasi fiskal pada tingkat kelurahan yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bau-Bau berupa dana hibah (*Block Grant*).

PPMK merupakan upaya pemerintah Kota Bau-Bau untuk memberikan respon positif dalam merespon beberapa usulan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) baik pada tingkat Kelurahan, Kecamatan maupun pada tingkat Kota pada tahun anggaran berjalan, sekaligus diharapkan program ini dapat menjadi motivasi untuk memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Program ini merupakan jawaban atas harapan masyarakat terhadap pembangunan secara umum. Usulan pembangunan masyarakat melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang selama ini dilaksanakan pada kenyataannya sebagian besar tidak terealisasi. Bilapun ada pembangunan fisik

biasanya pelaksanaannya melalui mekanisme tender. Kenyataan tersebut akan berimplikasi pada rasa apatisnya masyarakat terhadap pelaksanaan musyawarah perencanaan Pembangunan (Musrembang) maupun terhadap kegiatan pembangunan di daerahnya serta akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pemerintah Kota Bau-Bau menyadari hal tersebut dengan membuat suatu kebijakan disentralisasi fiskal pada tingkat kelurahan yang kemudian dipaket dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Kota Bau-Bau.

Sasaran kegiatan dari program tersebut adalah pembangunan sarana dan prasarana fisik yang merupakan kebutuhan utama masyarakat setempat serta kegiatan non fisik berupa bantuan dana bergulir kepada mereka atau kelompok orang yang memiliki potensi untuk dikembangkan.

Program ini mempunyai beberapa ketentuan umum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan PPMK sesuai buku petunjuk teknis Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bau-Bau sebagai berikut :

1. Dana program PPMK bersumber dari APBD Kota Bau-Bau yang dialokasikan pada semua kelurahan yang ada di Kota Bau-Bau (41 Kelurahan).
2. Besarnya dana yang dialokasikan untuk setiap kelurahan pada setiap tahun adalah bervariasi dimana pada setiap tahun mengalami perkembangan dengan alokasi penggunaan secara umum dapat dibagi menjadi dua kegiatan utama sebagai berikut :
 - a. Dana Kegiatan Pembangunan Fisik dan Non Fisik yang terbagi :
 - Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana fisik
 - Bantuan Dana bergulir bagi kelompok Usaha Ekonomi Produktif

- Bantuan kegiatan Karang Taruna, Majelis Talim dan Remaja Mesjid
- b. Dana operasional Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang terbagi :
- Insentif Tim Pelaksana Program PPMK Tingkat Kelurahan.
 - Administrasi dan Pelaporan.
3. Penerima adalah masyarakat kelurahan yang paling membutuhkan. Tim Pelaksana Kegiatan adalah pengurus LPM Sebanyak 3 Orang yang di tetapkan melalui rapat musyawarah pengurus LPM pada masing masing kelurahan. Pengurus Program PPMK adalah pengurus LPM yang mempunyai waktu mengurus kegiatan PPMK pada Tahun anggaran berjalan.
4. Penyaluran Dana dilakukan melalui Bank Pembangunan Daerah yang direkomendasikan oleh Kepala Sekretariat Program dan disetujui oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bau-Bau sebagai penanggung Jawab Program. Penyaluran Dana terbagi 2 tahapan pencairan yaitu 50% tahap I dan 50% tahap II.
5. Penentuan Kegiatan yang akan didanai oleh program ini direncanakan secara partisipatif oleh masyarakat kelurahan dalam musyawarah didampingi oleh fasilitator yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Bau-Bau dan petugas dari Sekretariat Kota.
6. Bidang kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat diarahkan untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik, non fisik agar dapat menunjang kegiatan ekonomi masyarakat atau peningkatan kegiatan kualitas hidup masyarakat. dengan mempedomani dokumen perencanaan pembangunan baik tahunan maupun lima tahunan.

Dalam penentuan dan pelaksanaan kegiatan harus mempertimbangkan beberapa prinsip dasar dalam penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance) seperti prinsip partisipasi, penegakan Hukum dan Transparasi.

C. Organisasi Pengelola dan Pelaksana

Untuk pengelola dan pelaksana organisasi program maka berdasarkan petunjuk teknis Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) menunjukkan organisasi pengelola dan pelaksanaan, tugas dan tanggung jawab serta adanya tahapan-tahapan pelaksana sebagaimana berikut ini :

1. Organisasi Program

a. Tingkat kota

1). Penanggung jawab program adalah Kepala BPM

2). Pelaksana program adalah tim teknis terdiri dari :

- Sekretariat
- Ketua Program / Koordinator fasilitator kota (1 Orang)
- Tim monev monitoring evaluasi

b. Tingkat kecamatan

1). Pembina dan pengawas program adalah camat.

2). Pelaksana tim program PPMK kecamatan yang terdiri dari :

- Kasi PMD Kecamatan.
- Koordinator fasilitator
- Fasilitator

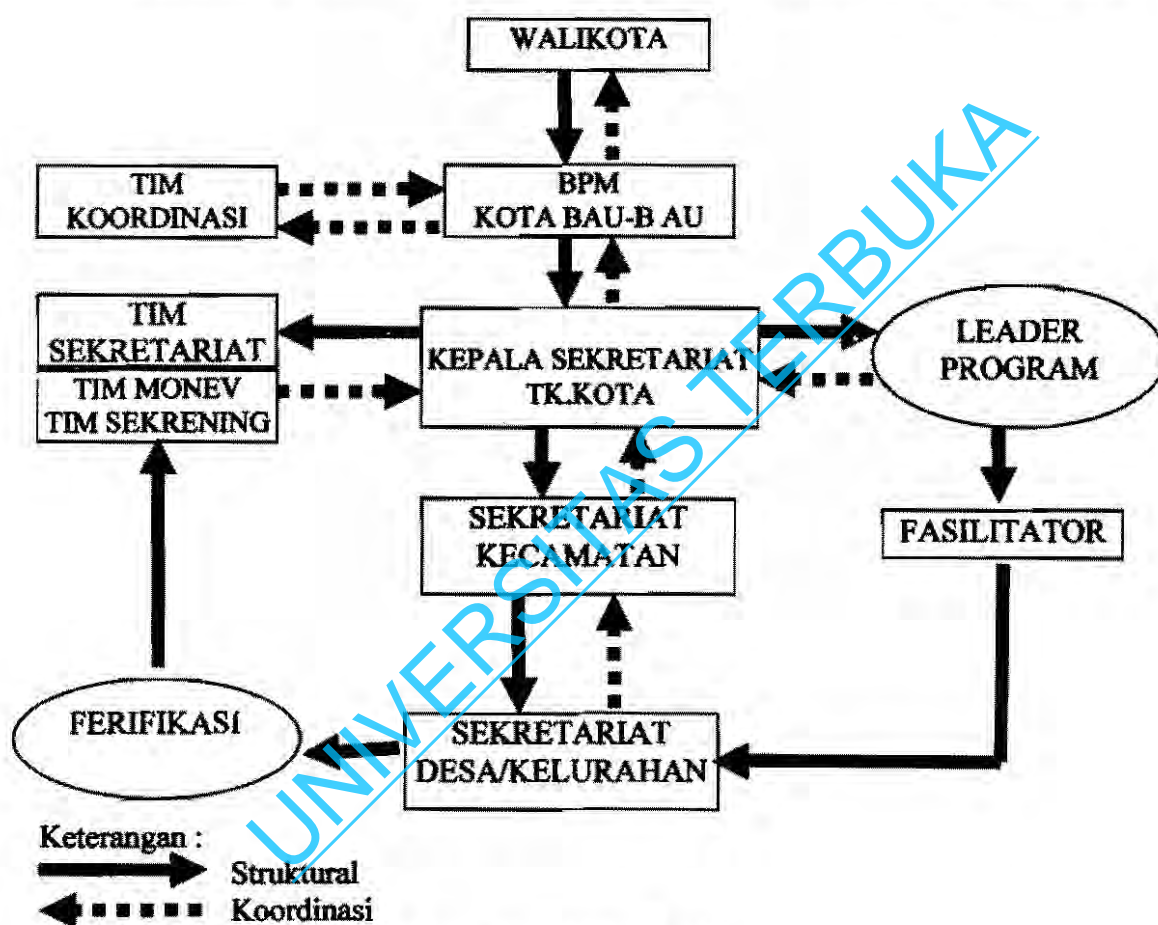
c. Tingkat kelurahan

- 1). Pembina dan pengawas program adalah Lurah
- 2). Penanggung jawab / pelaksana program adalah 3 orang dari unsur LPM yang akan bertugas sebagai ketua, sekretaris dan bendahara.

Sebagai gambaran tentang organisasi pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Kota Bau-Bau, berikut ini akan disajikan Struktur Organisasi seperti pada Gambar 4.1

Gambar 4.1

STRUKTUR ORGANISAI PROGRAM PEBERDAYAAN MASYARAKAT



Sumber Data : BPM Kota Bau – Bau, Desember 2009

Berdasarkan Gambar 4.1 maka diuraikan sebagai berikut :

2. Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan maupun pada tingkat Kota.

a. Sekretariat tingkat Kota

- Bertanggung Jawab terhadap terselenggaranya program pada tingkat Sekretariat Kecamatan dan Kelurahan.
- Membantu terselenggaranya forum musyawarah pada Tingkat Kecamatan dan tingkat Kota.
- Menyusun juklak dan juknis kegiatan dan perlengkapan administrasi pelaksanaan kegiatan.
- Melaksanakan Pengadaan Fasilitator pendamping dan pelatihan Fasilitator Pendamping.
- Melakukan sosialisasi dan diseminasi program pada Tingkat Kota dan Kecamatan.
- Melakukan verifikasi usulan dan memproses administrasi pencairan Dana.
- Melakukan Monitoring dan Evaluasi atas kesesuaian usulan perencanaan dan realisasi pelaksanaan program.
- Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala dan setiap tahap kegiatan pada Walikota.
- Membantu kelancaran program pada Sekretariat Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
- Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan dalam berbagai bentuk.

b. Sekretariat tingkat Kecamatan.

- Bertanggung jawab terhadap terselenggaranya kegiatan pada tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- Melakukan sosialisasi pada tingkat Desa/Kelurahan.
- Melakukan verifikasi usulan pada Tingkat Kelurahan dan membantu penyelenggaraan musyawarah dalam pembahasan pada Tingkat Kelurahan.
- Melakukan monitoring dan Evaluasi baik perencanaan pelaksanaan Program.
- Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala yang disampaikan pada Camat dan Kepala BPM c/q Kepala Sekretariat Program Tingkat Kota.

c. Tim pelaksana kegiatan.

- Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan keberlanjutan program.
- Menyelenggarakan musyawarah Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Hasil dari kegiatan ini adalah ditetapkan prioritas kegiatan yang akan didanai melalui program PPMK dan disusun dalam bentuk berita acara penyepakatan usulan baik fisik yang dilampiri undangan pertemuan dan daftar pertemuan.
- Usulan kegiatan disepakati berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan secara rasional atau dapat bermanfaat dan berkelanjutan bagi masyarakat kelurahan.
- Memfasilitasi kelompok masyarakat peserta program.
- Melakukan pengolahan keuangan secara benar.
- Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan secara teratur.

- Membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan pada Lurah, dan Camat c/q Kepala Sekretariat Kecamatan.

d. Fasilitator PPMK

Berdasarkan gambar 4.1 uraian tugas fasilitator PPMK dapat di uraikan sebagai berikut:

- Melakukan sosialisasi program dan melaksanakan pertemuan kelurahan.
- Memfasilitasi masyarakat kelurahan untuk melakukan musyawarah yang lebih partisipatif terlihat dari responsifitas masyarakat yang menghadiri pertemuan lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya. Fasilitator yang berkualitas lebih mengarah pada analisis kebutuhan sesuai dengan potensi dan daya dukung wilayah serta mampu menetapkan skala prioritas sesuai kebutuhan.
- Melakukan pendampingan untuk menciptakan kemandirian pada masyarakat dalam mempersiapkan, mengkaji dan menganalisis data base pada tingkat kelurahan. Penyiapan data base merupakan faktor penting dalam melakukan perencanaan yang lebih akurat dan rasional termasuk keadaan dan potensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki.
- Membangun Komunikasi yang lebih dinamis dalam forum musyawarah dan mempunyai keinginan untuk berpendapat.
- Memberi peluang pada kaum perempuan dan pemuda untuk hadir dan berpartisipasi dalam mengusulkan program pembangunan yang berkenaan dengan kepentingan perempuan dan pemuda.

- Memberi pertimbangan rasional dan aplikatif pada masyarakat dalam melakukan usulan program dengan menggunakan pendekatan *Strengths Weaknesses Opportunities Threats* (SWOT).
- Mendampingi dan memfasilitasi masyarakat dalam merumuskan usulan program pembangunan termasuk perhitungan anggaran pembangunan yang dibutuhkan.
- Memfasilitasi tim pelaksanaan kegiatan PPMK dalam penyusunan proposal usulan kegiatan.
- Melakukan verifikasi usulan kegiatan.
- Melaksanakan kegiatan pendampingan pada tim pelaksana kegiatan PPMK
- Melakukan pendampingan tim pelaksana PPMK dalam pencairan dana.
- Membantu tim pelaksanaan kegiatan PPMK dalam pengelolaan administrasi keuangan.
- Membantu tim pelaksana kegiatan PPMK dalam pembuatan laporan pelaksanaan dan pengembangan kegiatan setiap tahapan.
- Mendokumentasikan setiap tahapan kegiatan secara tertib.
- Mengisi instrumen kerja dengan benar dan menyerahkannya ke sekretariat tingkat Kota pada setiap akhir bulan.
- Membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan pada koordinator fasilitator / leader program atau pada kepala sekretariat tingkat Kota.

3. Tahapan pelaksanaan

a. Sosialisasi dan diseminasi program tingkat kota.

Sosialisasi dan diseminasi program tingkat kota dilaksanakan oleh BPM Kota Bau-Bau untuk memperkenalkan gambaran program secara umum.

b. Penentuan fasilitator pendamping.

Penentuan fasilitator pendamping dilakukan oleh BPM Kota Bau-Bau yang direkrut dari fasilitator perencanaan pembangunan partisipatif Kota Bau-Bau

c. Pelatihan fasilitator.

1). Pelatihan perencanaan pembangunan partisipatif dengan pendekatan

PRA/PUA dan SWOT

2). Pelatihan penyusunan kegiatan dan analisis kelayakan kegiatan.

3). Pelatihan pengenalan dan penggunaan instrumen kerja program

4). Diskusi bulanan untuk meningkatkan kapasitas tim.

d. Sosialisasi tingkat Kelurahan

Dilakukan oleh fasilitator yang telah ditunjuk bersama tim Pengelola Program tingkat Kecamatan dan pengelola Tingkat Kota

e. Identifikasi, penentuan dan kesepakatan kegiatan.

Dilakukan oleh fasilitator bersama-sama dengan LPM dan tim pelaksana kegiatan, yang dihadiri oleh Lurah sebagai pembina program di tingkat Kelurahan. Pendekatan yang dilakukan dalam identifikasi kegiatan adalah pendekatan PRA dengan memperhatikan karakteristik masing-masing wilayah kelurahan. Selanjutnya setelah tahapan identifikasi adalah penentuan kegiatan

dengan pendekatan SWOT melalui mekanisme musyawarah kelurahan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dasar seperti asas 10 Prinsip Tata Pemerintahan Yang baik (*Good Governance*) yaitu: Partisipasi, Penegakan hukum transparansi, Responsiveness/ Tanggap, Kesetaraan/Kesejajaran, Wawasan kedepan, efektifitas, efisiensi, Profesionalisme, Akuntabilitas/Pertanggung gugatan dan pengawasan, demi untuk kepentingan banyak orang yang disepakati melalui forum musyawarah kemudian Fasilitator dan LPM membuat Berita Acara musyawarah penetapan kegiatan yang dilampiri undangan pertemuan dan daftar hadir peserta yang di undang.

f. Penyusunan usulan kegiatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

Fasilitator akan memfasilitasi (mendampingi) masyarakat dalam penyusunan kegiatan berupa kegiatan pembangunan sarana/prasarana fisik serta pembuatan format rencana pembiayaan dan format laporan pertanggung jawaban keuangan termasuk pembukuan.

Khusus pelayanan pinjaman dana bergulir diutamakan warga masyarakat yang sangat membutuhkan dan telah memulai usaha misalnya jual sayur, jual kue, jual ikan dan barang lainnya. Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi berdasarkan hasil penelitian untuk peminjaman dana bergulir sebagai berikut :

1. Foto kopy KTP yang telah dilegalisir oleh pemerintah kelurahan
(terlampir dalam proposal)
2. Berkelompok dan mempunyai pengurus kelompok , nama kelompok dan alamat kelompok.

3. Menyusun Proposal rincian jumlah pinjaman yang dibutuhkan.
 4. Permohonan peminjam (setiap peminjam) ditanda tangani oleh suami dan istri yang disetujui oleh tim pelaksana kegiatan dan fasilitator serta diketahui oleh Lurah yang dibuktikan dengan masing-masing bertanda tangan (terlampir dalam proposal).
 5. Surat kesepakatan pengembalian yang memuat tentang kesanggupan pengembalian dana pinjaman setiap bulannya dengan mencatumkan besarnya pinjaman dan jumlah cicilan bulanan yang ditanda tangani oleh peminjam bersama ketua tim pelaksana program PPMK yang disetujui oleh Lurah.
 6. Surat pernyataan kesediaan mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan pengembalian dan bersedia menanggung resiko bila mengingkari perjanjian yang telah disepakati.
- g. Analisis kelayakan usulan kegiatan

Fasilitator dan LPM juga bertanggung jawab untuk melakukan Verifikasi dan memberikan rekomendasi kelayakan atas usulan/yang diajukan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat. Setelah dilakukan analisis kelayakan, maka fasilitator membuat berita acara Verifikasi dengan melampirkan :

- a. Usulan Kegiatan (Proposal)
- b. Hasil analisis kelayakan teknis, ekonomi dan sosial.
- c. Daftar hadir peserta Verifikasi.

Hasil penelitian ini menentukan kenyataan bahwa kelayakan-kelayakan yang harus dipenuhi dalam mengajukan usulan sebagai berikut.

1). Kelayakan teknis.

Kegiatan yang diusulkan harus rasional secara teknis baik pelaksanaannya maupun pembiayaannya termasuk memenuhi aspek-aspek :

- a. Apakah kegiatan yang direncanakan sesuai dengan besarnya dana yang tersedia.
- b. Kesiapan tenaga, bahan baku dan sumberdaya lainnya (SDA, SDM)
- c. Prioritas dan pemanfaatannya untuk kepentingan umum.
- d. Mayoritas pemanfaatannya adalah golongan pra sejahtera.
- e. Ada kesepakatan keberlanjutan.
- f. Ada *trickle down effec*.

2). Kelayakan ekonomis

Pertimbangan kelayakan ekonomis perlu dilakukan karena sangat menentukan dalam pencapaian manfaat dan tujuan dana yang diberikan.

Aspek-aspek harus diperhatikan adalah :

- a. Investasi harus dapat memberikan dorongan terhadap dinamika kehidupan sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya.
- b. Pemanfaatan usaha yang tersedia termasuk pasokan bahan baku.
- c. Kemampuan mengelola dan upaya berkelanjutan.
- d. Ada *trikle dawn effec* dan *multi player effec* yang signifikan.

3). Kelayakan sosial

Dalam kelayakan sosial aspek yang diperhatikan adalah :

- a. Penerima program tidak cacat sosial.
- b. Kegiatan yang diusulkan secara sosial dapat diterima dan tidak bertentangan dengan budaya masyarakat.
- c. Mempunyai komitmen yang tinggi untuk memberikan dukungan dalam upaya pelaksanaan program dan keberlanjutan program.

h). Verifikasi tingkat kota

Verifikasi tingkat kota dicairkan secara berjenjang mulai dari pelaksana tingkat kelurahan, kecamatan dan tingkat Kota untuk melihat kelayakan-kelayakan (teknis, ekonomi, sosial) usulan yang masuk dan telah diverifikasi pada tingkat kelurahan, selanjutnya Tim PPMK Kota memberikan Rekomendasi hasil verifikasi atas setiap usulan untuk Tim pelaksana Kelurahan untuk menyelesaikan administrasi pencairan dan penyaluran dana.

i). Pencairan, penyaluran dan pengelolaan dana.

Penggunaan dan pencairan anggaran dengan menggunakan Format Surat Perjanjian Peberian Dana (SP2D), Berita Acara Penarikan Penggunaan Dana (BAPPD), Surat Pernyataan Kesanggupan Penelesaian Pekerjaan (SPKP2), dan format-format lainnya. Tata cara pengisian format tersebut oleh tim pelaksana program di kelurahan akan difasilitasi oleh fasilitator. Pencairan dana terdiri dari dua tahapan. Tahap I 50% dan tahap II 50%. Pencairan tahap kedua hanya dapat dilakukan apabila LPM sebagai pengelola anggaran telah mempertanggungjawabkan anggaran tahap I melalui forum transparansi tingkat kelurahan yang

dihadiri oleh masyarakat dan LPM. Penyampaian laporan keuangan pada sekretariat kota melampirkan daftar hadir dan undangan kegiatan forum transparansi tingkat kelurahan.

Pencairan anggaran tahap kedua juga hanya dapat dicairkan, apabila tim monitoring sekretariat kota telah melakukan evaluasi dan yakin bahwa pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan perencanaan dan tidak terdapat masalah.

Pencairan dana PPMK dapat dilakukan setelah memenuhi syarat administrasi keuangan dan mendapat persetujuan kepala BPM selanjutnya bendahara PPMK dapat mencairkan anggaran tahap II.

j). Dokumentasi perkembangan fisik dan biaya

Setiap tahapan kegiatan akan didokumentasikan termasuk perkembangan fisik dan biaya. Tata cara pengisian format perkembangan fisik dan biaya oleh tim pelaksana program PPMK difasilitasi oleh fasilitator kota.

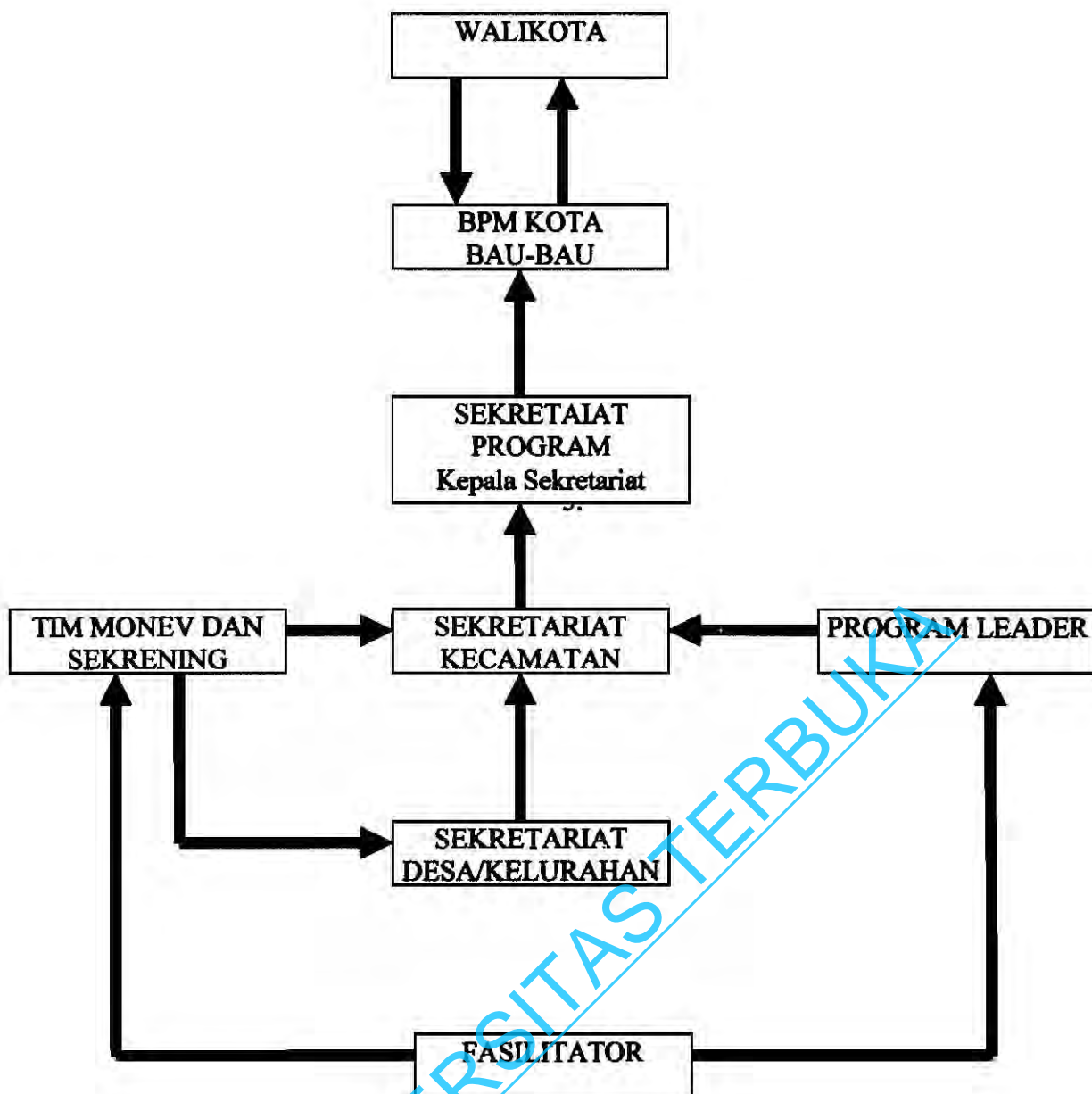
k). Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Monitoring dan evaluasi program, dilakukan secara berjenjang dan periodik mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan dan sekretariat kota pelaporan pada tingkat kelurahan dilakukan oleh LPM. Sekretariat kecamatan membuat laporan pada sekretariat kota setiap bulan dan triwulan. Selain itu, fasilitator membuat laporan pelaksanaan pendampingan kepada sekretariat kota setiap bulan. Pelaksanaan monitoring evaluasi (monev) dilakukan oleh tim PPMK tingkat kota setiap bulan dan secara insidental jika diperlukan.

Untuk mengoptimalkan kontrol masyarakat pada program maka LPM sebagai pelaksana kegiatan akan memberikan laporan dalam pertemuan atau forum masyarakat setiap akhir bulan yang dihadiri oleh fasilitator, lurah dan tim sekretariat tingkat kota. Laporan tersebut menyangkut kegiatan pada tahun yang sedang berjalan dan kegiatan PPMK tahun sebelumnya. Selengkapnya alir pelaporan dan monev akan disajikan pada Gambar 4.2

UNIVERSITAS TERBUKA

GAMBAR 4.2 ALIR PELAPORAN DAN MONEV



Sumber Data ; BPM Kota Bau-Bau .

1). Sanksi

Sanksi adalah salah satu bentuk pemberlakuan kondisi karena adanya pelanggaran atas peraturan dan tata cara yang telah ditetapkan di dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) tahun 2008. Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab berbagai pihak yang terkait dalam pengelolaan kegiatan. Sanksi terhadap penyimpangan dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) dapat berupa sanksi administrasi. Sanksi administrasi, yaitu pemberhentian pemberian dana PPMK, tidak dapat mengelola dana Program PPMK dengan baik, seperti : terlambat penyampaian laporan kemajuan perkembangan fisik dan keuangan, menyalahi prinsip-prinsip pencairan dana Program PPMK, menyalahgunakan dana Program PPMK, penyimpangan prosedur, hasil kegiatan tidak terpelihara atau tidak dapat dimanfaatkan. Kelurahan yang terkena sanksi tersebut, akan dimasukkan sebagai kelurahan yang bermasalah, sehingga dapat ditunda pencairan dana yang sedang berlangsung, atau tidak dialokasikan untuk tahun berikutnya.

D. Problematika untuk Memulai Pemberdayaan dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat

1. Problematika Untuk Memulai Pemberdayaan Masyarakat.

Hasil penelitian pada bagian ini mendeskripsikan kondisi birokrasi pengelola dan masyarakat, baik dari segi kemampuan, potensi ekonomi maupun struktur sosial masyarakat. Deskripsi ini dimaksudkan sebagai landasan mengapa

diperlukannya program pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan serta membentuk karakteristik tertentu dalam masyarakat, ketika memberikan respons terhadap program pemberdayaan dalam bentuk partisipasi masyarakat, untuk mencapai berbagai bentuk pemberdayaan melalui PPMK.

a. Birokrasi pengelola program dan wilayah administrasi.

Secara umum wilayah Kota Bau-Bau terdiri dari enam (6) wilayah kecamatan yang bila dibagi perwilayahnya terdiri dari Kecamatan Wolio, Kecamatan Murhum, Kecamatan Betoambari, Kecamatan Sorawolio, Kecamatan Kokalukuna dan Kecamatan Bungi .

Dari enam (6) wilayah kecamatan terdapat empat puluh satu (41) kelurahan.

Dalam penelitian ini, hanya mengambil sampel 3 Kecamatan dari enam (6) Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Betoambari, terdiri dari lima (5) kelurahan dan di wakikan tiga (3) kelurahan yaitu; Kelurahan Waborobo Kelurahan Sulaa, dan Kelurahan Lipu.
2. Kecamatan Kokalukuna terdiri dari enam (6) kelurahan dan di wakikan tiga (3) yaitu Kelurahan Liwuto, Kelurahan Sukanayo, dan Kelurahan Kadolo.
3. Kecamatan Bungi terdiri dari delapan (8) kelurahan dan diwakikan empat (4) kelurahan yaitu Kelurahan Ngkari-Ngkari, Kelurahan Kalia-lia, Kelurahan Kolese dan Kelurahan Liabuku.

Selain birokrasi pengelola program dan wilayah administrasi maka sumberdaya manusia birokrasi pengelola program dan tingkat pendidikan dapat ditampilkan seperti tertera pada Tabel 4.12

Tabel 4. 12
**KUALITAS SUMBER DAYA PENGELOLA PROGRAM PPMK
 KOTA BAU-BAU**

NO	WILAYAH	JABATAN	PENDIDIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kecamatan Betoambari	- Camat	Sarjana
	Kelurahan Waborobo	- Lurah	Sarjana
		- LPM	SMA
		- Fasilitator	Sarjana
	Kelurahan Sulaa	- Lurah	Sarjana
		- LPM	Sarjana
		- Fasilitator	Sarjana
	Kel. Lipu	- Lurah	Sarjana
		- LPM	Sarjana
		- Fasilitator	Sarjana
2	Kec. Kokalukuna	- Camat	Sarjana (S2)
	Kel. Liwuto	- Lurah	Sarjana
		- LPM	Sarjana
		- Fasilitator	Sarjana
	Kel. Sukanayo	- Lurah	SMA
		- LPM	SMA
		- Fasilitator	Sarjana
	Kel. Kadolo	- Lurah	SMA
		- LPM	Sarjana
		- Fasilitator	Sarjana

(1)	(2)	(3)	(4)
3	Kec. Bungi	- Camat - Lurah - LPM - Fasilitator	Sarjana Sarjana Sarjana SMA
	- Kel. Ngkari-Ngakri	- Lurah - LPM - Fasilitator	Sarjana SMA Sarjana
	-Kel. Kalia-Lia	- Lurah - LPM - Fasilitator	Sarjana SMA Sarjana
	-Kel. Kolese	- Lurah - LPM - Fasilitator	Sarjana SMA Sarjana
	-Kel. Liabuku	- Lurah - LPM - Fasilitator	Sarjana SMA Sarjana

Sumber Data BPM Kota Bau-Bau

Dari tabel tersebut bila tingkat pendidikan yang dijadikan indikator untuk melihat kualitas sumber daya manusia pengelola program, maka kemampuan dalam memahami dan menafsirkan program PPMK tidak menjadi habatan utama. Adanya deskresi yang diberikan kepada pengelola program pada tingkat lapangan, maka diperlukan birokrasi pengelola program untuk memiliki kemampuan dan tekad dalam melaksanakan fungsinya secara efektif, kreatif dan penuh inovatif. Birokrasi pengelola harus memiliki kemampuan dalam merangsang partisipasi masyarakat dan organsasi kemasyarakatan, serta pengelola program dilakukan

dengan transparan dan responsif. Permulaan Kegiatan selalu didahului dengan mekanisme musyawarah sebagai wujud responsifitas pengelola program. Sumberdaya birokrasi dan pengelola program dapat lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkannya. Seperti halnya dalam kegiatan usaha ekonomi produktif, terlihat dari berbagai mekanisme yang terbangun dalam pengelolaannya. Pengelola memberikan waktu pengembalian yang bervariasi dan selambat-lambatnya 10 bulan, namun waktu pembayaran cicilan awal diberi kesempatan satu sampai dengan dua bulan dari masa pengambilan dana tersebut.

Pemberian dana bergulir pada program PPMK tidak secara sendiri-sendiri, tetapi secara berkelompok dengan melihat jenis usaha kelompok tersebut. Besaran dana pinjaman yang diberikan diatur dalam petunjuk teknis yaitu paling besar adalah Rp. 500.000, perorang yang jika diakumulasi per kelompok menjadi Rp. 5.000.000. Penentuan jumlah anggota per kelompok juga telah diatur yaitu sekurang-kurangnya lima orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang. Banyaknya kemudahan yang diciptakan oleh pengelola sehingga masyarakat dan kelompok usaha tidak terlalu terbebani. Meski berbagai kemudahan yang diberikan oleh program PPMK kepada masyarakat namun untuk mempertahankan keberlanjutan program, telah dibuat pula aturan-aturan mengikat berupa sanksi. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab.

b. Kondisi masyarakat sebagai sasaran program PPMK

Problematic utama bagi pengelola program PPMK adalah struktur sosial masyarakat dan tingkat perekonomian masyarakat. Harapan memotivasi

masyarakat untuk dapat berpartisipasi dan berswadaya dibutuhkan kondisi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bau-Bau. Dukungan pengelola program dan kemampuan organisasi bentukan masyarakat dalam membantu menghubungkan antara kebutuhan masyarakat dengan pengelolaan program. Indikator ekonomi masyarakat dijadikan sebagai salah satu faktor pertimbangan. Pada Tabel 4.13 berikut ini terlihat jumlah penduduk, jumlah Kepala Keluarga (KK) dan KK miskin yang berada di wilayah dari beberapa kecamatan dan kelurahan yang ada di Kota Bau-Bau yang dapat dijadikan sebagai salah satu problem untuk memulai keberdayaan pada masyarakat kelurahan .

Tabel 4.13
DATA KEPALA KELUARGA MISKIN KELURAHAN
KOTA BAU-BAU

N O	KECA MATAN	KELU RAHAN	JUM LAH PENDU DUK	JUM LAH KK	JUMLAH KK MISKIN	K E T
1	2	3	4	5	6	7
1	Kec. Kokalukuna	1. Kel. Waruruma	2961	723	452	
		2. Kel. Lakologou	1974	485	311	
		3. Kel. Kadolo Moko	4850	1077	741	
		4. Kel. Kadolo	2333	480	283	
		5. Kel. Liwuto	2171	522	269	
		6. Kel. Sukanayo	2309	553	315	
	JUMLAH		16598	3840	2371	

1	2	3	4	5	6	7
2	Kec. Betoambari	1. Kel. Waborobo	1220	282	231	
		2. Kel. Labalawa	1059	283	212	
		3. Kel. Kato bengke	6166	1562	885	
		4. Kel. Lipu	4464	1189	746	
		5. Kel. Sulaa	1371	340	297	
		JUMLAH	14280	3656	2371	
3	Kec. Bungi	1. Kel. Liabuku	1329	351	234	
		2. Kel. Wallabuku	1314	315	244	
		3. Kel. Ngkari- Ngkari	1965	513	239	
		4. Kel. Kam- peonaho	1844	412	316	
		5. Kel. Palabusa	1746	418	310	
		6. Kel. Kalia-lia	2053	504	459	
		7. Kel. Kolse	987	285	232	
		8. Kel. Lowu- Lowu	1998	441	346	
		JUMLAH	13236	3239	2380	

Sumber Data BPM Kota Bau-Bau kadaan 6 juni tahun 2008

2. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa dalam memulai kegiatan pemberdayaan masyarakat terdapat beberapa masalah yang dapat mempengaruhi kegiatan pemberdayaan itu sendiri. Agar dapat mewujudkan tujuan yang hendak dicapai PPMK dalam memberdayakan masyarakat, maka diperlukan strategi yang akan dilaksanakan dan dipandang cukup efektif dan efisien untuk diterapkan dan dikembangkan, seperti yang diungkapkan oleh salah seorang tim sekretariat tingkat kota bahwa ;

“ untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai oleh program PPMK, maka dilakukan beberapa pendekatan yang merupakan strategi dalam pelaksanaan program tersebut. Strategi yang kami lakukan adalah seperti strategi pemberdayaan pada umumnya yaitu melalui Pendekatan kelompok, penguatan kelembagaan, pendampingan, pengembangan sumber daya manusia dan pemberian stimulan” . (wawancara, 27-12-2008)

Kelima strategi tersebut merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dan saling mempunyai keterkaitan yang erat satu sama lain. Dan merupakan satu paket yang mesti ada dalam setiap program pemberdayaan masyarakat.

a. Pendekatan kelompok

Pendekatan kelompok adalah strategi pemberdayaan masyarakat yang dipandang masih relevan untuk masyarakat di luar wilayah perkotaan, sebab masyarakat sekitar wilayah tersebut kebanyakan secara ekonomi, sosial, budaya dan politik dalam posisi yang relatif lemah dan akan sulit memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi secara sendiri-sendiri. Potensi-potensi yang mereka miliki secara individual meskipun kecil akan dapat menjadi potensi yang amat berarti manakala diakumulasikan menjadi kekuatan kelompok. Upaya pemberdayaan akan menjadi terlalu luas dan tidak efektif jika dilakukan secara individual, karena itu pendekatan kelompok adalah strategi yang paling efektif dan efisien dalam upaya pemberdayaan potensi dan kemampuan masyarakat. Dengan pendekatan kelompok ini pula diharapkan masyarakat yang lemah akan mempunyai posisi tawar yang kuat dan seimbang jika harus berhubungan dengan kelompok atau anggota masyarakat yang lebih kuat.

Pendekatan kelompok juga akan dapat kebersamaan dan tanggung jawab bersama dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Seperti yang dikatakan salah seorang masyarakat pemanfaat program ;

Dengan adanya sistim berkelompok yang dibangun sangat memberi pengaruh terhadap pribadi kami. Kami merasa bahwa keberadaan kami tidak sendirian, tetapi masih memiliki saudara yang senasib. Kami dapat lebih akrab dan bersahabat serta lebih banyak waktu untuk selalu berdiskusi tentang masalah yang kita alami.. (Wawancara, 27-12-2008)

b. Penguatan kelembagaan

Selain pendekatan kelompok, penguatan kelembagaan juga merupakan strategi yang cukup efektif dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pemukiman desa / kelurahan. Lembaga-lembaga sosial yang ada di masyarakat pada prinsipnya merupakan media yang cukup efektif untuk mengatur masyarakat dalam melakukan serangkaian program kegiatan. Upaya pengelolaan sumberdaya alam dan pemukiman desa / kelurahan tidak bisa melepaskan diri dan keterlibatan lembaga – lembaga masyarakat setempat yang ada. Hal ini memang tidak diharapkan untuk membentuk lembaga baru, tetapi lebih dari sebagai untuk memberdayakan dan memfungsikan lembaga yang ada agar berfungsi secara maksimal sesuai dengan tugas masing-masing. Lembaga-lembaga masyarakat yang ada dapat berupa lembaga adat, lembaga keagamaan, lembaga ekonomi, atau bahkan juga lembaga-lembaga semi pemerintah atau lembaga pemerintah yang ada di desa.

Strategi penguatan kelembagaan juga dapat memberikan peluang kepada masyarakat untuk melakukan proses belajar dalam mengorganisir

kemampuan dan potensi yang mereka miliki agar dapat dikembangkan secara maksimal dalam mengelola sumberdaya alam dan pemukiman desa / kelurahan. Dalam kaitan dengan hal tersebut, salah seorang tim Sekretariat Kota Bau-Bau mengatakan ;

“Penguatan kelembagaan juga akan meningkatkan kemampuan dan posisi tawar warga masyarakat dalam berinteraksi dengan pihak-pihak lain, baik dalam berinteraksi ekonomi, sosial budaya, maupun politik. Selanjutnya juga dengan penguatan kelembagaan akan meningkatkan rasa percaya diri masyarakat dalam mengatasi berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Dengan demikian sekaligus akan dapat melindungi masyarakat dan tindakan-tindakan pihak lain yang dapat merugikan kepentingan mereka”. (wawancara, 27-12-2008)

Strategi ini dilakukan dalam pelaksanaan program PPMK, terbukti dengan pelaksanaan kegiatan program, dimana diberikan sepenuhnya kepada organisasi bentukan masyarakat (LPM) sebagai penanggung jawab pada tingkat lapangan. Dikatakan ketua LPM kelurahan Kali-ha ;

“Pelibatan organisasi kemasyarakatan (LPM) dalam kegiatan program pemberdayaan memang sangat strategis. Disamping memberi ruang bagi kami untuk berpartisipasi, karena akan lebih mudah membangun komunikasi dengan masyarakat. Dengan demikian apa yang menjadi harapan program bisa tercapai”. (wawancara, 28-12-2008)

c. Pendampingan

Strategi pendampingan merupakan strategi yang lazim dipakai dalam program-program pemberdayaan dan pembangunan masyarakat. Hal ini disadari atas pemikiran bahwa masyarakat, terutama masyarakat desa, secara umum berada dalam kondisi yang lemah, baik secara ekonomi, sosial budaya, maupun politik. Kondisi yang demikian itu seringkali menjadi salah satu kendala yang cukup serius bagi pelaksanaan program-program dan

kegiatan pembangunan yang seharusnya melibatkan pihak masyarakat secara aktif. Pendampingan adalah salah satu solusi yang diharapkan dapat mengatasi kendala tersebut.

Melalui pendampingan diharapkan akan dapat memberikan pembelajaran dan kesadaran kepada masyarakat untuk mengenali dirinya sendiri, menggali potensi dan kemampuan yang mereka miliki, mengidentifikasi berbagai kendala dan kelemahan yang menghambat serta merumuskan rencana dan alternatif pemecahan masalah yang perlu mereka ambil. Dengan demikian tugas utama pendamping adalah menyelenggarakan dialog untuk menggali kebutuhan-kebutuhan masyarakat, menggali sumber-sumber potensi yang tersedia, mengidentifikasi spesifikasi masalah yang dapat dipecahkan dan mengorganisir masyarakat untuk mengambil keputusan secara tepat.

d. Pengembangan sumber daya manusia.

Proses pemberdayaan masyarakat merupakan proses Pengembangan sumberdaya manusia dari berbagai aspek secara komprehensif dan integratif. Pengembangan sumber daya manusia merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pemberdayaan masyarakat. Pengembangan sumberdaya manusia merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya insani masyarakat baik yang berkaitan dengan pengetahuan, sikap, keterampilan maupun kinerja mereka. Hal ini merupakan suatu keharusan dalam setiap program pembangunan, sebab pada hakekatnya pembangunan itu adalah pembangunan untuk masyarakat yang dilakukan dari dan oleh masyarakat.

Strategi pengembangan sumberdaya manusia merupakan strategi yang mengarah pada penciptaan pra kondisi agar dikemudian hari masyarakat dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri. Sejalan dengan hal tersebut, maka dalam pelaksanaan program PPMK pengembangan sumber daya manusia terlihat dengan jelas dimana semua unsur yang terlibat dalam kegiatan PPMK khususnya terhadap pengelola dan masyarakat sasaran telah terjadi upaya-upaya pengembangan SDM baik melalui pelatihan tentang pemahaman program, maupun secara teknis pelaksanaan kegiatan. Pemerintah melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bau-Bau, sangat menyadari bahwa program pemberdayaan hanya akan terwujud bila didukung oleh segenap komponen yang memiliki komitmen yang tinggi untuk melakukan perubahan dalam kehidupan. guna mendukung tercapainya tujuan program, maka salah seorang tim Kota mengatakan ,

Dalam pelaksanaan program PPMK, pemerintah kota merekrut Fasilitator sebagai tenaga yang akan mendampingi program. Mereka direkrut dari fasilitator perencana pembangunan partisipatif. Tentu dengan kemampuan yang mereka miliki diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan keberdayaan masyarakat. (Wawancara, 28-12-2008)

e. Pemberian stimulan

Strategi lain dalam pemberdayaan masyarakat yang sampai saat ini masih cukup efektif adalah dengan pemberian stimulan. Stimulan yang diberikan biasanya dalam bentuk dana hibah, baik hibah murni maupun hibah bergulir (*revolving fund*). Dana stimulan ini dimaksudkan hanya sebagai *entry point* untuk menggali dan menggerakkan potensi-potensi yang secara laten sebetulnya tersedia dalam masyarakat. Dengan demikian

pemberian dana stimulan dimaksudkan bukan untuk menyediakan pembiayaan dari semua komponen program, melainkan hanya memberikan dana pendamping yang tidak dapat disediakan sendiri oleh masyarakat.

Strategi pemberian dana stimulan harus disertai dengan ketersediaan masyarakat untuk melakukan swadaya sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Bentuk swadaya ini dapat berupa dana, tenaga, pemikiran, waktu atau hal-hal lain yang mendukung pencapaian tujuan program kegiatan. Memang dalam praktek sering terjadi dilema, disatu sisi jika salah pendekatan dan sosialisasi pemberian dana stimulan justru akan dapat menciptakan ketergantungan masyarakat, tetapi di sisi lain tanpa pemberian dana stimulan akan sulit melakukan motivasi *Verbal educational* yang manfaatnya terkadang tidak bisa dirasakan secara langsung dan nyata. Gambaran tentang pemberian dana stimulan berupa besaran anggaran program pemberdayaan masyarakat kelurahan dan alokasi penggunaannya tahun 2006-2008 disajikan pada tabel 4.14.

UNIVERSITAS TERBUKA

Tabel 4.14
Dana Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK)
Dan Alokasi penggunaannya Per Kelurahan Dalam Tahun 2006-2008

N O	Tbn	Besar Dana (Rp)	Alokasi Penggunaan	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1	2006	Rp33.157.894.74	<ul style="list-style-type: none"> - Insntif tim pelaksana Kegiatan (TPK). - Biaya Administrasi, Pelaporan dan dokumentasi - Biaya / Anggaran Pembangunan - Bantuan Pengembangan Kegiatan PKK 	<ul style="list-style-type: none"> Rp.2.000.000 Rp 657.894 Rp. 30.000.000 Rp. 500.000
			Jumlah	33. 157.894,74
2	2007	Rp. 50.000.000	<ul style="list-style-type: none"> - Insntif tim pelaksana Kegiatan (TPK). - Biaya Administrasi, Pelaporan dan dokumentasi - Biaya / Anggaran Pembangunan Fisik - Biaya / Anggaran Pembangunan Non Fisik - Bantuan Karang Taruna Bantuan Remaja Masjid 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 4.400.000 Rp. 600.000 Rp 20.000.000 Rp 20.000.000 Rp 2.500.000 Rp 2.500.000
			JUMLAH	Rp. 50.000.000
3	2008	Rp. 50.000.000	<ul style="list-style-type: none"> - Insntif tim pelaksana Kegiatan (TPK). - Biaya Administrasi, Pelaporan dan dokumentasi - Biaya / Anggaran Pembangunan - Bantuan Pengembangan Kegiatan PKK - Bantuan Majelis Ta'lim 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 4.400.000 Rp. 600.000 Rp .40.000.000 Rp. 2.500.000 Rp. 2.500.000
			JUMLAH	Rp. 50.000.000

Sumber BPM Kota Bau – Bau diolah

Berdasarkan data pada Tabel 4.14, terlihat bahwa besaran anggaran bagi pembiayaan kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 sangat bervariasi.

Dari gambaran kegiatan PPMK tersebut di atas, nampak bahwa pengalokasian dana pada tahun 2007 mengalami tambahan kegiatan yaitu kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) berupa bantuan pinjaman dana bergulir, bantuan kegiatan Karang Taruna serta bantuan bagi kegiatan remaja Masjid. Bantuan pinjaman dana bergulir dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) diperuntukan bagi masyarakat miskin yang memiliki usaha ekonomi produktif. Pemberian modal pinjaman ini diatur sedemikian rupa dengan pertimbangan dapat memberikan ruang dan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat dalam mengembangkan usahanya .

E. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) sebagai *Local Policy Government*

Salah satu penyebab terjadinya kegagalan pelaksanaan kegiatan pembangunan di daerah disebabkan program atau kegiatan pembangunan tersebut tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat dan juga tidak menjawab permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat. Cara efektif untuk mencapai keberhasilan pembangunan di daerah adalah dengan melibatkan masyarakat secara langsung mulai dari proses identifikasi masalah sampai dengan tahap pelaksanaan kegiatan.

Dalam proses pemberdayaan masyarakat dibutuhkan dukungan dan peran aktif dari segenap komponen di tingkat lokal, termasuk di antaranya adalah sumber keuangan dan sumber daya manusia yang dimiliki daerah. Pemerintah daerah dapat melaksanakan fungsinya secara efektif apabila mendapatkan kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran di sektor publik.

Sejalan dengan otonomi daerah maka daerah diberi kebebasan untuk mengatur rumah tangganya sendiri termasuk di dalamnya mengatur masalah keuangan. Walaupun daerah sudah di beri kebebasan namun dominasi peranan pusat dalam menetapkan prioritas pembangunan di daerah masih ada. Oleh karena itu, munculnya kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah di harapkan dapat menyelesaikan masalah keuangan yang terjadi antara pusat dan daerah.

Strategi yang diluncurkan untuk melakukan pembangunan adalah dengan melakukan kebijakan desentralisasi fiskal pada tingkat kelurahan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK). Program ini diharapkan dapat memberi perubahan bagi masyarakat kota Bau-Bau terutama berkaitan dengan masalah ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Dalam penelitian ini hanya melihat program PPMK sebagai kebijakan Pemerintah Daerah dilihat dari Dukungan Birokrasi, Peranan *Stakholder* dan Partisipasi Masyarakat dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat guna tercapainya kesejahteraan.

1. Komitmen Birokrasi Untuk Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat

Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) merupakan program yang mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Kota Bau-Bau hingga pemerintah terendah yaitu kecamatan dan kelurahan. Kesuksesan dan kegagalan dalam pengelolaan program ini sangat mempengaruhi penilaian dari kinerja atau *performance* pemerintah tingkat lapangan. Wawancara dengan anggota tim Sekretariat tingkat kota mengatakan;

Keberhasilan dan kesuksesan dalam pengelolaan program PPMK pada tingkat lapangan merupakan catatan tersendiri Bapak Walikota dalam mengadakan penilaian sehingga berakibat pada pergeseran atau mutasi pejabat di semua tingkatan mulai dari tingkat kota sampai pada lurah. Termasuk tim pelaksana kegiatan (LPM) akan tidak diberi kesempatan kembali untuk mengelola pada tahun berikut apabila memiliki catatan buruk dalam mengelola kegiatan tersebut sehingga sukses tidaknya dalam mengelola program ini akan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelola secara keseluruhan. (Wawancara, 10-12-2008).

Pada tahun 2006-2008 di Kota Bau-Bau belum pernah terjadi pergeseran lurah, camat ataupun tim pengelola lainnya yang diindikasikan karena ketidakberhasilan pengelolaan program PPMK di kelurahan masing-masing. Hal ini menunjukkan keseriusan dan kepedulian semua pihak terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain itu pula disebabkan karena mekanisme kerja yang dibangun dengan sistem pengawasan yang baik akan sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program PPMK Kota Bau-Bau. Indikator penilaian keberhasilan dalam mengelola kegiatan PPMK terlihat melalui hasil pembangunan-pembangunan sarana pendukung yang terbangun, berjalannya program ekonomi produktif serta aktifitas pemerintah kelurahan dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan kesesuaian antara

kegiatan yang ada pada dokumen perencanaan kelurahan dengan hasil yang diperoleh dan tidak terjadinya gejolak di masyarakat sebagai dampak negatif dari pengelolaan kegiatan PPMK. Hasil wawancara dengan beberapa lurah mengatakan sebagai berikut :

“Dalam pelaksanaan program ini tidak pernah terjadi gejolak yang berarti, yang terjadi hanyalah perdebatan dalam pengajuan usulan dimana mereka cenderung saling memaksakan kehendak. Namun semua dapat teratasi dengan memberikan pemahaman serta argument-argument dari pihak-pihak yang berkompeten yang sangat memahami prinsip-prinsip pelaksanaan program tersebut.” (Wawancara Lurah Liwuto 20-11-2008)

Hal yang sama dikatakan pula oleh lurah Sukanayo ;

Dalam pelaksanaan program PPMK tidak ada masalah yang berarti, yang ada hanya debat antar peserta yang mengajukan usulan dimana masing-masing mereka menginginkan kegiatan pada masing-masing lingkungan mereka, sementara dana sangat kecil apabila harus dibagi per lingkungan. Kegiatan tersebut dapat saja kami bagi sepanjang kegiatan yang mereka ajukan dapat didanai dengan anggaran yang ada atau kesanggupan mereka untuk melakukan kegiatan tersebut dengan dana yang ada tapi tetap mengacu pada kebutuhan prioritas masyarakat. (Wawancara, 20-11-2008)

Tim pelaksana pada tingkat kelurahan diberikan kewenangan dalam mengelola program. Buku petunjuk teknis hanya sebagai *guidance*, secara umum bagi pengelolaan program oleh birokrasi pengelola program di lapangan, sedangkan intervensi dari pemerintah kota dapat dikatakan sangat kurang. Pengelola di tingkat kota dan dibantu oleh fasilitator lebih pada pemberian petunjuk teknis penyusunan proposal kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta penyusunan laporan kegiatan. Salah seorang anggota tim PPMK tingkat kota mengatakan ;

“Dalam program PPMK ini kami tidak melakukan intervensi dalam pengelolaannya, baik itu kegiatan fisik maupun non fisik seperti kegiatan

ekonomi produktif. Apa yang dibantu itu semua kami serahkan penentuannya pada mekanisme kerja pengelola program PPMK di tingkat kelurahan. Kami hanya mengawasi agar kegiatan tidak bertentangan dengan petunjuk teknis misalnya kegiatan fisik apa saja yang boleh dibiayai melalui program PPMK dan besaran pembiayaannya tidak berlebihan secara perhitungan teknis serta siapa saja yang menerima bantuan dana bergulir itu tergantung masyarakat dan tim pelaksana kegiatan di tingkat kelurahan.” (Wawancara, 20-11-2008).

Pada kegiatan pembangunan sarana pendukung/kegiatan fisik PPMK, pengelola di tingkat kelurahan diberikan kewenangan yang besar dalam mengelola kegiatan yang akan dilakukan. Keberhasilan dan pencapaian tujuan program sangat dipengaruhi oleh dukungan dan komitmen dari semua pihak yang ada dalam sistem itu. Secara umum bagi daerah pengelolaan PPMK dengan dukungan pemerintah yang baik akan memperlihatkan hasil yang baik pula, dan sebaliknya bila tidak ada atau kurang dukungan dari pemerintah untuk memberdayakan masyarakat dalam kegiatan PPMK, maka hasil PPMK akan terhambat

Kreativitas dan inovasi yang terbangun dalam pengelolaan program PPMK yang mendapatkan dukungan yang baik dari birokrasi pengelola program PPMK di tingkat lapangan akan memberikan pemberdayaan bagi masyarakat dan organisasi bentukan masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip pengelolaan program PPMK secara baik, inovatif dan kreatif mendorong partisipasi dan keterlibatan masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan yang ada.

Hal lain membuktikan betapa besarnya dukungan birokrasi dalam mewujudkan pemberdayaan di Kota Bau-Bau adalah dialokasikannya dana/anggaran PPMK di setiap kelurahan. Setiap tahun mengalami peningkatan yaitu tahun 2006 sebesar Rp. 33.157.894.74, tahun 2007 meningkat menjadi Rp. 50.000.000 dan tahun 2008 tidak mengalami perubahan yaitu Rp. 50.000.000.

a. Sumber daya manusia birokrasi pengelola program

Keberadaan Fasilitator dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) akan membantu masyarakat dalam mewujudkan pelaksanaan program pemberdayaan. Pada saat proses pelaksanaan program PPMK mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan program dan pemeliharaan dilakukan secara penuh dan rasa tanggung jawab. Pengelolaan ekonomi produktif secara administrasi dikelola oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) termasuk pertanggungjawaban administrasi keuangan program. Keberadaan Fasilitator dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagai pendamping program dan penanggungjawab operasional kegiatan memberi pelaporan baik secara lisan maupun administrasi kepada pengelola tingkat atasnya.

Dalam program pemberdayaan perlu dibuka ruang yang luas bagi masyarakat dan lembaga bentukan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam program pemberdayaan, sebagaimana dikatakan oleh Sulistiyani (2004) salah satu posisi birokrasi sebagai fasilitator dilihat dari terdapatnya ruang yang diberikan kepada masyarakat untuk menyampaikan ide, masukan, kritik, rasa keberatan, permintaan dan sebagainya tanpa

dibebani sanksi atau ancaman. Kondisi seperti ini akan terwujud bila sumber daya birokrasi mampu menyediakan hal tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut wujud dukungan birokrasi dalam program pemberdayaan terlihat dari besarnya ruang yang dibuka bagi tempat berpartisipasi masyarakat untuk memikirkan masalahnya secara bersama dan memecahkannya melalui mekanisme musyawarah. Apabila sumber daya birokrasi tidak mampu memahami dan menafsirkan program secara baik, maka partisipasi masyarakat tidak akan tercapai, sehingga yang terjadi kemudian adalah pelaksanaan program pemberdayaan yang hanya bersifat slogan saja dan menggunakan paradigma lama dalam pelaksanaan program pemerintah di lapangan.

Keberadaan birokrasi dalam membantu kegiatan program pemberdayaan dirasakan masyarakat ataupun birokrasi di tingkat kelurahan. Pemerintah Kota yang dalam hal ini tim sekretariat bersama Fasilitator mampu memberikan bimbingan teknis kepada aparat kelurahan. Sumber daya manusia pengelola di tingkat kota dan fasilitator (*leader program*) memiliki kemampuan yang cukup baik untuk memberikan bimbingan teknis kepada pengelola di tingkat kelurahan. Salah seorang Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di kelurahan mengatakan,

" Bila kami mengalami kesulitan dalam melaksanakan kegiatan pekerjaan kami, maka pemerintah kota melalui tim sekretariat kota dan fasilitator program akan memberikan bimbingan teknis kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan pekerjaan tugas yang diberikan tepat waktu walaupun dengan waktu yang terasa sempit". (Wawancara, 20 -12-2008)

Dengan kondisi seperti ini terlihat bahwa kemampuan atau dukungan sumber daya birokrasi dalam pengelolaan program pemberdayaan sangat berpengaruh besar. Demikian juga dengan dukungan lurah dan camat sebagai penanggungjawab kegiatan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program. Sebaliknya tanpa dukungan camat dan lurah maka ruang untuk berpartisipasi dalam program pemberdayaan sulit untuk diperoleh, sehingga sasaran masyarakat yang akan diberdayakan melalui proses pemberian motivasi dan dorongan untuk berpartisipasi akan sulit dilaksanakan.

b. Peran Fasilitator dan Mekanisme Kerja Birokrasi Pengelola Program.

Fasilitator dapat memberikan kontribusi pada program PPMK melalui tiga cara : *Pertama*, memberikan ruang yang lebar kepada masyarakat untuk menyampaikan ide, masukan, kritik, rasa keberatan, permintaan dan sebagainya tanpa dibebani sanksi atau ancaman; *Kedua* memberikan informasi secara transparan dan fleksibel kepada masyarakat yang menyangkut berbagai bentuk pembangunan lokal ataupun nasional; *Ketiga*, melibatkan masyarakat dalam mengformulasikan kebijakan dengan melihat profesionalisme dan kompetensi disamping nilai kepentingan masyarakat terhadap program pemberdayaan.

Secara umum fungsi fasilitator yang dimainkan sudah terlihat baik. Di seluruh kelurahan pengelolaan PPMK dimulai dengan membicarakan pada mekanisme musyawarah yang dihadiri oleh unsur masyarakat, lembaga kemasyarakatan, RT dan RW untuk penentuan kegiatan yang akan

dilakukan serta kelompok yang akan mendapat bantuan pinjaman modal usaha ekonomi produktif. Begitu pula pada saat pelaksanaan dan hasil kegiatan program fungsi fasilitator dan pemerintah berjalan secara efektif. Adanya ruang publik yang tersedia untuk berpartisipasi serta birokrasi, mampu membantu memecahkan berbagai permasalahan, menerima ide dan masukan. Tim pengelola di tingkat kelurahan diharapkan mampu memberikan serta membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat mengenai program PPMK. Sebagian besar tim pelaksana kegiatan telah dapat melakukan hal tersebut, namun ada juga yang dianggap belum. Seorang masyarakat Kelurahan Liwuto memberikan komentarnya;

" Program ini sebenarnya sangat bagus, apalagi dikelola oleh tim yang bagus juga. Meskipun dananya relatif kecil tapi kalau dipahami oleh masyarakat ini akan sangat memberi manfaat. Setidaknya apa yang menjadi kebutuhan kita dapat dibangun melalui dana program PPMK. Kalau dana tidak mencukupi, ya kita swakarya, kita bantu kerja atau apa saja yang dapat kita lakukan. program ini memberikan keleluasaan bagi kita untuk kita menentukan kegiatan apa yang kita akan lakukan sehingga apa yang kita programkan pada saat musrembang bisa kita bangun melalui dana PPMK. Selain itu kami merasa diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau masukan terhadap keinginan-keinginan yang kita harapkan, walaupun kadang keinginan kami bertentangan dengan petunjuk program tetapi melalui penjelasan dari pemerintah dan pengelola program kami menjadi paham. Jadi apa yang kita usulkan melalui mekanisme musrembang tidak pernah tersahuti, dapat kita lakukan melalui kegiatan PPMK." (Wawancara, 22-12-2008)

Bila pengelola program tidak dapat memainkan perannya dengan baik, maka tujuan dari program tidak akan tercapai. Kondisi ini akan terjadi apabila pengelola program tidak memberi ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan PPMK. Tidak adanya akses informasi program, pengelolaan yang terkesan tertutup serta pelaksanaannya yang

tidak berdasarkan pada mekanisme musyawarah yang baik dalam penentuan kegiatan yang akan dilakukan masyarakat.

Dengan demikian, maka kegiatan yang dilakukan hanyalah merupakan usulan yang diajukan oleh orang tertentu saja dan bahkan cenderung memaksakan usulan dari pemerintah saja. Pemberian diskresi yang sangat besar kepada pemerintah kelurahan dalam membangun mekanisme kerja dalam pelaksanaan program sering dimanfaatkan oleh birokrasi lapangan untuk melaksanakan program secara baik ataupun untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari pengelola program. Kenyataan yang diperoleh adalah pemerintah kelurahan dan tim pelaksana kegiatan diberi kewenangan yang besar, sehingga mendapat ruang yang besar untuk berinovasi dan berkreasi guna mencapai keberdayaan masyarakat. Mekanisme kerja yang memperlihatkan birokrasi melaksanakan fungsi fasilitatornya dengan baik terjadi secara umum. Dimulai dengan melakukan musyawarah dengan masyarakat (LPM) dan organisasi kepemudaan lainnya seperti Karang Taruna. Organisasi kepemudaan ini menentukan kegiatan fisik berupa sarana dan prasarana seperti jalan usaha tani, jalan setapak, drainase, gedung sekolah TK, gedung serba guna / balai pertemuan, sumbu galian termasuk merehabilitasi kantor pemerintah (Kantor Kelurahan) yang belum mendapatkan dana khusus untuk perbaikan ataupun pembangunannya. Demikian pula halnya dengan pemberian modal bagi Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Untuk mendapatkan bantuan pinjaman modal usaha ekonomi produktif didasarkan pada skala prioritas

yaitu dengan melihat masyarakat yang sangat membutuhkan. Hasil wawancara dengan seorang lurah Liwuto mengatakan bahwa:

" Saya sebagai lurah adalah penanggung jawab program pada tingkat kelurahan, sedang yang mengelola / melaksanakan kegiatan adalah tim pelaksana kegiatan yang diambil dari unsur LPM. Selanjutnya TPK dalam melakukan pekerjaan akan didampingi oleh seorang fasilitator. Pelaksanaan program ini didahului mekanisme musyawarah untuk merencanakan dan di tindak lanjuti dengan pelaksanaan program. Dalam melakukan musyawarah kegiatan, saya bersama tim pengelola lain baik dari tim sekretariat, fasilitator selalu proaktif dalam memberikan arahan ataupun pertimbangan-pertimbangan yang rasional dalam menentukan kegiatan. Selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan baik itu kegiatan fisik maupun non fisik (usaha ekonomi produktif) dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang diangkat melalui forum musyawarah pada tingkat LPM. Mekanisme itu sudah diatur dalam petunjuk teknis. Saya sebagai penanggung jawab bersama fasilitator sebagai pendamping program tinggal mengawasi saja sekaligus membantu kalau terdapat hal – hal yang menghambat dalam pelaksanaannya. " (Wawancara, 15-10-2008)

Hasil penelitian ini juga menemukan adanya Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) memanfaatkan dan menyalahgunakan kewenangan yang diberikan. Hal ini dipertegas dari hasil wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa:

" Mungkin karena mekanisme kontrol dari masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang kurang efektif membuat tim pelaksana kegiatan menggunakan otoritasnya dan dapat memanfaatkan program untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya saja yaitu pengelola tersebut tidak membuka informasi yang seluas-luasnya bagi masyarakat sehingga kegiatan fisik yang dibangun ditangani langsung oleh TPK dengan menunjuk langsung tenaga tukang tanpa mempertimbangkan keahlian yang dimiliki tapi hanya didasarkan pada kedekatan atau karena adanya kerjasama yang dapat menguntungkan pengelola, begitu pula dengan bantuan pinjaman modal usaha diberikan kepada kalangan terdekatnya saja, dan terjadi pemberian bantuan yang tidak sesuai dengan dana yang diterima dan menjadi macet, disinilah praktek kolusi dimainkan LPM seperti yang terjadi di kelurahan Sukarayo. " (wawancara, 15-11-2008)

Dari kondisi tersebut di atas, mekanisme kerja yang terbangun dengan pemberian diskresi yang ada terlihat bahwa kesemuanya terpulung dari kemampuan dan dukungan birokrasi. Kemampuan birokrasi pengelola dalam membangun mekanisme kerja yang kondusif dibutuhkan tekad dan kualitas sumber daya birokrasi pendukungnya. Dengan mekanisme kerja yang baik akan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.

Berdasarkan pengamatan peneliti, posisi *stakeholders* seperti organisasi kepemudaan tidak akan bereaksi bila tidak diberikan ruang oleh pengelola program. Begitu pula masyarakatnya masih belum menanggapi program ini bila tidak mendapatkan dukungan dari birokrasi pengelola. Seperti halnya yang terjadi di Kelurahan Waborobo, pengelola kegiatan tidak memberi ruang pada organisasi kepemudaan. Kondisi ini membuat organisasi ini tidak melibatkan diri dalam kegiatan program PPMK.

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) bersama fasilitator PPMK yang mampu melaksanakan fungsi sebagai mediator yang baik dapat mengurangi intervensi pemerintah dalam mengelola program ini.

2. Partisipasi Masyarakat Yang Terbangun Melalui PPMK

Program pemberdayaan masyarakat kelurahan (PPMK) yang mulai digulirkan tahun 2005 sampai sekarang, telah memberikan nuansa baru bagi model pembangunan masyarakat kelurahan. Program ini merupakan salah satu solusi dalam upaya untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat. Sasmita (1996), mengatakan pemberdayaan merupakan pembaharuan lembaga-lembaga

sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya, sehingga terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Partisipasi sebagai suatu proses aktif dari masyarakat dalam mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasan untuk melakukan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan serta terjadinya dialog antara masyarakat setempat dengan unsur birokrasi agar memperoleh informasi. Keberdayaan masyarakat mulai terlihat ketika akan merencanakan kegiatan PPMK, dimulai dengan mengadakan musyawarah bersama mengenai hal-hal yang akan dibangun, mekanisme pelaksanaannya dan siapa yang akan melaksanakan dan mendapatkan bantuan pinjaman modal semuanya dibicarakan dalam pertemuan dan bertanggung jawab untuk memelihara hasil pembangunan tersebut.

Pemahaman dan informasi yang diperoleh melalui pertemuan dalam sosialisasi program PPMK diharapkan dapat memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan program. Selain itu dengan dikelola secara mandiri oleh masyarakat setempat dapat memberdayakan masyarakat di wilayah kelurahan termasuk yang memiliki keahlian seperti tukang kayu, tukang batu untuk dapat berpartisipasi secara aktif mendukung kegiatan fisik program PPMK, seperti terjadi di Kelurahan Waborobo hasil wawancara dengan seorang masyarakat mengatakan,

" Kami sangat senang dengan program ini, karena kami masyarakat bisa mendapat pekerjaan, meskipun kami dibayar/ diupah dengan harga yang lebih kecil dari upah pada umumnya tapi kami tidak berkeberatan. Kami sadari kalau ini bukan proyek tapi hanyalah bantuan dari pemerintah untuk masyarakat kelurahan dalam membangun daerah kami. Apalagi yang kita bangun adalah

kampung sendiri. Jadi pada prinsipnya kami sangat senang dan tidak mempersoalkan besar atau kecilnya upah yang kami diberikan, karena manfaatnya kami juga yang merasakan.” (Wawancara, 15-11-2008)

Hal yang sama pula seorang masyarakat di Kelurahan Kalia-lia dalam wawancara mengatakan,

” Program ini sangat baik karena dalam proses pelaksanaannya melibatkan masyarakat. Mulai dari tahap perencanaan kami diberi kesempatan untuk mengajukan usulan, kemudian yang melaksanakan kegiatan itu adalah masyarakat dari kelurahan kami sendiri. Selanjutnya kami masyarakat dapat pula mengetahui apa-apa yang akan dikerjakan termasuk anggarannya, karena kegiatan yang akan dilakukan sudah dimusyawarakan sehingga memudahkan dalam pengawasannya.” (Wawancara, 16 – 11 – 2008)

Kondisi seperti tersebut di atas, menunjukkan bahwa program ini sangat diharapkan oleh masyarakat. Masyarakat mendapatkan hasil sebagai tambahan pendapatan, sehingga beranggapan bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi daerahnya. Masyarakat memahami bahwa selisih upah yang ada merupakan bagian dari kontribusi mereka yang dinilai. Swadaya masyarakat merupakan gambaran adanya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi. Keadaan ini menunjukkan keberhasilan dari birokrasi pengelola program yang mampu memberikan pemahaman dan mendorong masyarakat serta melibatkannya dalam kegiatan PPMK.

Masyarakat berswadaya dengan memberikan bantuan dalam berbagai bentuk sebagai bukti partisipasi masyarakat secara aktif. Disisi lain terlihat pemanfaatan sumber daya manusia lokal yang memiliki keahlian khusus seperti tukang kayu ataupun tukang batu, dilibatkan secara aktif dalam kegiatan pembangunan. Dengan pelibatan tersebut selain menyediakan lapangan pekerjaan juga memberdayakan masyarakat yang memiliki keahlian. Kesadaran

dari masyarakat tersebut dikarenakan bangunan yang dikerjakan merupakan kebutuhan hasil kesepakatan bersama warga, dan nantinya dimanfaatkan secara bersama oleh warga sekitar. Hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat yang memiliki keahlian khusus di Kelurahan Liwuto;

" Program seperti ini sangat kami harapkan, karena dapat memberikan kepada kami peluang kerja dan merasa diberdayakan keahlian yang kita miliki, sebelumnya bila ada pembangunan fisik di kelurahan ini kami tidak pernah dilibatkan, karena pihak pengelola biasanya berasal dari luar sehingga mereka tentunya menggunakan tenaga-tenaga dari luar pula. Seharusnya kalau ada kegiatan pembangunan meskipun dikelola oleh pihak luar tapi harus tetap menggunakan tenaga kerja dari kelurahan itu. Sebab untuk apa harus mencari tukang kayu atau tukang batu dari luar. Kecuali daerah itu tidak ada yang memiliki keahlian baru bisa mengambil tukang dari luar. Tapi kegiatan itu biasanya Proyek bukan program seperti ini. Makanya kami sangat senang dengan kegiatan ini, karena kami merasa diberdayakan. Tentunya dengan melibatkan kami sebagai tukang akan melakukan yang terbaik mengingat yang kami bangun ini adalah untuk diri kami sendiri dan kami yang memanfaatkan jadi kualitasnya harus bagus walaupun bayarannya tidak sesuai dengan standar proyek, selisihnya itu merupakan sumbangan swadaya kami untuk kelurahan ini." (Wawancara, 05-12-2008)

Bila mekanisme kerja yang dibangun oleh pengelola tingkat kelurahan berkesan tertutup, maka partisipasi masyarakat dalam kegiatan PPMK sulit terwujud. Meski dalam proses penetapan kegiatan dilakukan melalui mekanisme musyawarah namun dalam pelaksanaan kegiatannya tidak melibatkan masyarakat, mengakibatkan masyarakat tidak peduli terhadap kegiatan PPMK. Salah seorang masyarakat Kelurahan Sukanayo mengatakan,

" Kami tidak tahu PPMK itu seperti apa, kami hanya diundang rapat pada saat sosialisasinya, tapi setelah itu kami tidak tahu lagi kelanjutan program itu, apakah program itu sesuai diharapkan atau tidak kami tidak lagi mengetahui. Siapa tukang atau tenaga kerja yang dipakai itu juga kami tidak tahu, karena pengelola program tidak menyampaikan kepada kami bahwa siapa tenaga kerja yang harus dilibatkan. Mungkin karena kami juga sibuk dengan kegiatan kami, karena kami juga bekerja. Tapi harapan kami kegiatan yang akan dilakukan benar-benar sesuai dengan kesepakatan masyarakat dan tenaga kerja yang

digunakan adalah mereka yang berasal dari kelurahan kami sendiri."
(Wawancara, 05-12-2008)

Pada kegiatan ekonomi produktif memberikan pembelajaran kepada masyarakat terhadap pengembangan potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Kelompok usaha penerima bantuan dapat saja tidak terlibat secara langsung dalam pembuatan keputusan tentang siapa yang akan mendapatkan bantuan pinjaman modal, tetapi kemampuan birokrasi untuk melihat potensi yang dimiliki oleh masyarakatnya telah memberikan warna tersendiri bagi program ini. Dari pengelolaan ekonomi produktif, merangsang partisipasi masyarakat dalam program ini, dan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong (*encourage*), memotivasi dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya (Sulistiyani : 2001). Memang diperlukan dorongan dan komitmen birokrasi untuk menciptakan kondisi ini.

Dalam Pelaksanaan PPMK di Kelurahan Kolese sebagai salah satu kelurahan yang diteliti membawa manfaat dalam pengembangan masyarakat. Melalui pemberian bantuan pinjaman modal ekonomi produktif terlihat dari kejelian pemerintah kelurahan bersama dengan lembaga masyarakat dalam menentukan kelompok sasaran yang perlu dikembangkan dan terciptanya partisipasi masyarakat karena menganggap memang bermanfaat dan penting

baginya serta akan membawa ke arah perubahan yang lebih baik. Pengelola program memberi manfaat dalam pengelolaan PPMK ekonomi produktif. Seluruh kelompok usaha masyarakat, telah mampu membayar cicilan pinjaman tahun 2007 dan pada tahun 2008 telah digulirkan kembali dana yang ada. Hal ini terjadi karena masyarakat memahami manfaat yang diperoleh bila membayar cicilan secara kontinyu. Di Kelurahan Kolese terlihat partisipasi kelompok sasaran dalam pengelolaan PPMK ekonomi produktif berjalan sukses. TPK Kelurahan Kolese mengatakan,

" Kami berupaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, selain itu kami benar-benar menjalankan sesuai dengan arahan dan petunjuk teknis yang ada. Kami juga mempunyai cara khusus untuk merangsang mereka melunasi pembayaran cicilan yaitu dengan memberikan harapan kepada mereka bila mereka mampu membayar cicilan tepat waktu dengan bunga yang ditetapkan 1% maka tahun berikutnya mereka akan mendapatkan bantuan pinjaman lagi, namun bila mereka dengan sengaja tidak melunasi kewajibannya tanpa alasan yang memungkinkan untuk pemberian kompensasi, maka mereka akan dikenai sanksi yaitu apa yang menjadi jaminan atas pinjaman akan dilelang dan selanjutnya mereka akan direkomendasikan kepada pihak pemerintah untuk mendapatkan perhatian dan tidak akan diberikan lagi bantuan dalam bentuk apapun dan dari program manapun. Dan kami juga memberikan pemahaman kepada mereka bahwa program ini bukan bantuan hibah tetapi ada tanggung jawab yang harus ditunaikan serta manfaat bagi mereka adalah dapat mengembangkan usaha karena mereka memang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai bukti masih dapat diberdayakan." (Wawancara, 06-12-2008)

Hal ini dirasakan oleh kelompok penerima yang mendapatkan manfaat dari bantuan pinjaman yang diberikan. Sebelumnya diberikan penjelasan dan informasi mengenai program ini dan keuntungan yang dapat diperoleh bila dapat berpartisipasi secara aktif, hal ini sebagai komitmen dari pengelola PPMK untuk mengembangkan potensi kelompok usaha. Dikatakan seorang masyarakat penerima pinjaman Kelurahan Lipu sebagai berikut :

" Pinjaman PPMK ini sangat membantu kami untuk mengembangkan usaha dengan bantuan ini kami dapat menambah jenis jualan dan memperbesar jualan, dengan pinjaman 1% dan waktu pengembalian maksimal 10 bulan, itu sangat tidak memberatkan apalagi pembayarannya tidak langsung ditunaikan paa bulan berikut setelah pengambilan pinjaman, tetapi setelah dana tersebut dikelola satu bulan dari waktu pinjaman. Kemudian kami juga dijanjikan akan diberikan lagi bila cicilan lunas. Keadaan ini membuat semangat kami untuk berpartisipasi dan kooperatif dalam membayar cicilan yang dipinjamkan." (Wawancara, 06-12-2008)

Salah seorang anggota kelompok usaha Kelurahan Kolese mengatakan,

" Pinjaman ini sangat membantu mengembangkan usaha kami, tetapi mungkin ke depan besarnya dapat ditingkatkan karena seperti usaha kami ini dengan bantuan pinjaman Rp. 500.000,- masih belum dapat membantu secara berarti untuk mengembangkan usaha kami karena masih banyak jenis jualan yang belum kami sediakan, seandainya diberikan pinjaman Rp. 1.000.000 – 2.000.000, baru dapat terasa karena usaha seperti kami ini pak, makin banyak variasi jualan makin cepat berkembang, karena masyarakat pun bila datang membeli dan barangnya tidak ada menjadi malas lagi datang ke tempat kami karena barang yang dijual tidak lengkap, tetapi secara umum bantuan pinjaman ini sangat berarti bagi pengembangan usaha kami." (Wawancara, 07-12-2008)

3. Peranan dan Keterlibatan Organisasi Bentukan Masyarakat dalam PPMK

PPMK mendorong tingkat kelurahan untuk berinovasi, berkreasi agar dapat memberdayakan masyarakat dengan berbagai model mekanisme kerja yang terbangun. Dengan memberikan deskresi yang seluas – luasnya akan memunculkan berbagai informasi yang dilakukan oleh pelaksana di tingkat lapangan dalam kegiatan PPMK. Namun demikian pemberian kewenangan merupakan proses belajar dan sebagai upaya penguatan bagi organisasi kemasyarakatan yang merupakan partner pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Karang Taruna dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta oraganisasi lainnya merupakan suatu

organisasi yang keberadaannya sangat diharapkan keterlibatannya dalam berpartisipasi terhadap kegiatan pembangunan. Namun pada program PPMK keterlibatan LSM secara langsung tidak dapat terlihat. Bila berasumsi LSM sebagai lembaga yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat yang sifatnya independent secara finansial dan memiliki kepedulian yang sangat luas tentang berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari (Ryker : 1995), maka di lapangan tidak terlihat LSM terelibat secara struktural program, tetapi secara individu terdapat beberapa yang merupakan anggota LSM yang hadir sebagai fasilitator atau konsultan, pendamping program dan mereka adalah juga merupakan fasilitator perencana pembangunan partisipatif Kota Bau-Bau. Dengan demikian pelaksanaan kegiatan PPMK dapat berjalan dengan baik seperti yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Pelibatan fasilitator pada PPMK ini membantu bila dilihat dari latar belakang mereka yang rata-rata memiliki kemampuan dalam memahami program pemberdayaan dan perencanaan pembangunan partisipatif, sehingga ketimpangan atau kesalahan-kesalahan dalam mengelola program ini dapat teratasi.

Hasil wawancara dengan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Bau-Bau mengatakan,

" Dalam pelaksanaan PPMK di Kota Bau-Bau, kami tidak melibatkan LSM secara kelembagaan, tetapi kami melibatkan fasilitator yang bertugas mendampingi program ditingkat lapangan. Mereka kami rekrut dari fasilitator perencana pembangunan partisipatif Kota Bau-Bau. Tentu harapan kami dengan kapasitas dan pengalaman yang mereka miliki akan dapat membantu mensukseskan pelaksanaan PPMK ini. Meski dalam perekrutan fasilitator berimplikasi kepada peningkatan biaya operasional PPMK, tetapi kami tidak mempermasalahakan hal itu. Kami hanya berharap dengan profesionalisme mereka dapat bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya serta benar-

benar mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan program pembangunan di Kota Bau-Bau. Dan ini merupakan salah satu komitmen kami pula untuk mengsucceskan program ini yang mana program pemberdayaan ini merupakan salah satu strategi pemerintah Kota Bau-Bau dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidup masyarakat Kota Bau-Bau baik ekonomi, sosial, budaya maupun politik.” (Wawancara, 10-11-2008)

Begitu pula hasil wawancara dengan Tim sekretariat tingkat kota mengenai keterlibatan LSM, dikatakan bahwa,

“ Kami tidak melibatkan LSM secara struktur kelembagaan, tetapi secara individu terdapat banyak diantara fasilitator merupakan anggota LSM yang rata-rata diantara mereka memiliki pengalaman pada kegiatan-kegiatan pendampingan. Selain itu mereka adalah merupakan fasilitator perencanaan pembangunan partisipatif Kota Bau-Bau. Kami merasa yakin bahwa dengan melibatkan mereka (fasilitator) akan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sehingga apa yang menjadi tujuan dari program ini dapat terwujud. Namun demikian kami terbuka apabila ada LSM yang secara sukarela mau melibatkan diri untuk membantu masyarakat bersama dengan tim pengelola membantu masyarakat dalam upaya membangun keberdayaan mereka.” (Wawancara, 20-12-2008)

Bila LSM sebelumnya lebih memaknai LSM sebagai institusi masyarakat di akar rumput maka dapat saja organisasi kepemudaan, keagamaan dan berbagai asosiasi masyarakat lainnya yang menjadikan penyeimbang atau partner bagi pemerintah di tingkat lapangan dapat diberikan apresiasi terhadap organisasi yang seharusnya melaksanakan fungsi LSM tersebut. Keberadaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dan organisasi kepemudaan (karang taruna) mungkin dapat diberikan apresiasi yang positif dengan melihat peranan yang dimainkan. Organisasi bentukan masyarakat merupakan salah satu yang dikatakan sebagai stakeholders dalam program ini. Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) merupakan lembaga non pemerintah atau NGO yang menjadi partner pemerintah ditingkat lapangan dalam mengelola kegiatan pembangunan

serta pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) pemerintah Kota secara penuh melibatkan LPM sebagai tim pelaksana kegiatan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program pada tingkat Kelurahan. Hal ini dimaksudkan agar tercipta penguatan kelembagaan LPM. Lembaga ini memiliki biaya operasional dari pemerintah kota yang diberikan tiap tahun dan melekat pada anggaran program PPMK kelurahan. Keanggotaan Tim pelaksana Kegiatan ini semua berasal dari unsur LPM dan tidak ada intervensi pemerintah dalam penentuan keanggotaannya. Sepenuhnya diberikan kepada masyarakat untuk membentuknya dan pemerintah hanya memfasilitasi dan melegalisasinya saja.

Untuk membantu mengadakan analisis terhadap organisasi kemasyarakatan, maka LPM dan karang taruna digunakan analogi LSM. Hal ini lebih memudahkan memberikan apresiasi terhadap peranan yang dimainkan oleh kedua organisasi tersebut

Pada saat pelaksanaan program PPMK di tingkat lapangan komitmen dan dukungan pengelola program bila informasi positif maka mungkin saja keterlibatan LSM tidak terlalu diperlukan, tetapi pada saat banyaknya terjadi penyimpangan serta salah sasaran kegiatan PPMK seharusnya LSM mampu memainkan peranannya. Karena seperti diuraikan sebelumnya ketika pelaksanaan program PPMK ditingkat lapangan memberikan informasi negatif, justru tidak ada keterlibatan LSM dan masyarakat hanya pasif karna minimnya informasi.

Menurut Munawar (1990) menyebutkan bahwa dalam struktur pengelolaan program PPMK mulai dari tingkat Kota, Kecamatan sampai memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Lembaga ini walaupun berasal dari masyarakat tetapi pelibatangannya dalam program PPMK secara organisasi dan tidak dapat dilihat sebagai individu atau pribadi masyarakat yang duduk sebagai anggota LPM. Analisis ini akan lebih melihat lembaga bentukan masyarakat yaitu LPM dan Karang taruna sebagai *stakeholders*. Program ini tercipta dikarenakan kesadaran pemerintah pada tingkat kota dalam memainkan peranan sebagai inovator yaitu senantiasa mendorong partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan lainnya dalam pembangunan. Adanya kesadaran bahwa masyarakat pada dasarnya mempunyai potensi untuk melakukan banyak hal demi kepentingan dan kebutuhan mereka dan pada sisi lain, mereka juga telah turut aktif dalam menjaga keberlanjutan pembangunan. Kenyataan di atas mirip dengan pendapat (Munawar,1990) yang menyatakan bahwa selain fungsi inovator juga melaksanakan fungsi fasilitator yaitu memberikan ruang yang lebar kepada masyarakat dan organisasi bentukan masyarakat untuk menyampaikan ide, masukan, rasa keberatan, dan permintaan sebagainya tanpa beban dan sanksi. Secara jelas dituangkan dalam petunjuk teknis sebagai acuan dalam melaksanakan program PPMK. Kondisi ini dimanfaatkan oleh LPM ataupun organisasi kemasyarakatan lainnya dalam program PPMK di Kota Bau-Bau. Sebagian besar LPM di setiap Kelurahan dalam pengelolaan program PPMK mampu memainkan peranannya dimulai dari keberadaannya pada struktur pengelola program, pada saat perencanaan kegiatan

LPM serta mampu dalam pengelolaan program yang memposisikan *stakeholders* sebagai mitra birokrasi.

Pengelola program telah mendorong lembaga kemasyarakatan untuk dapat berperan secara aktif dalam menentukan apa yang menjadi kebutuhan prioritas masyarakat. Lebih jauh lagi kepercayaan birokrasi untuk memberikan ruang bagi LPM untuk mengelola sendiri kegiatan bersama dengan masyarakat. Keterlibatan LPM sebagai informasi positif dimana pemerintah memposisikan LPM sebagai penanggung jawab kegiatan pembangunan, sehingga semua kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik yang ada dalam program PPMK sepenuhnya menjadi tanggung jawab LPM dan karena itu diharapkan LPM mengelola kegiatan ini dengan transparan terutama pengelolaan keuangannya sehingga menjadikan masyarakat berpartisipasi secara aktif untuk melaksanakan kegiatan pembangunan yang dilakukan. Ketua LPM Kelurahan Liabuku mengatakan,

" Kami memang LPM bertanggungjawab terhadap semua pelaksanaan kegiatan program dikelurahan baik fisik maupun kegiatan ekonomi produktif, tetapi kami dalam mengelola mengedepankan prinsip transparansi dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan ide, gagasan ataupun usulan terhadap pelaksanaan program. Dengan mekanisme seperti ini ternyata respons masyarakat sangat baik, karena pengelolaan ini kami membicarakan dan mengelolanya secara transparan pada masyarakat tentang maksud kegiatan ini serta besaran dana yang akan dikelola serta bangunan apa yang akan dilakukan sehingga tidak terkesan tertutup." (Wawancara, 15-12-2008)

Kondisi seperti ini terjadi karena terdapatnya komitmen dari birokrasi kelurahan dan LPM dalam menjalankan fungsi masing-masing. Lurah Liwuto mengatakan,

" Mekanisme pengelolaan program PPMK dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan (LPM) itu sudah diatur dalam petunjuk teknis , mungkin hal ini dimaksudkan agar LPM lebih berdaya dan belajar bertanggungjawab dalam mengelola kegiatan yang melibatkan masyarakat, karena dengan melibatkan mereka maka interaksi secara aktif pada saat mengelola dan melaksanakan pembangunan fisik atau kegiatan non fisik dalam program PPMK dapat terwujud sehingga pada akhirnya akan mampu merangsang partisipasi masyarakat yang hasil akhirnya diharapkan masyarakat bisa berdaya." (Wawancara, 15-12-2008)

Dengan sinergi yang terbangun antara birokrasi kelurahan dengan organisasi kemasyarakatan telah mampu mendorong masyarakat secara aktif dan berswadaya pun dapat terjadi dalam kegiatan ini. Masyarakat melihat bahwa pengelolaan program dilakukan secara transparan dimana kegiatan yang dilakukan betul-betul merupakan kebutuhan masyarakat dan masyarakat mendapatkan manfaat langsung dari kegiatan ini, sehingga mendorong masyarakat dalam meningkatkan keberdayaannya. Salah seorang masyarakat yang berprofesi sebagai tukang bangunan di Kelurahan Liwuto mengatakan,

" Kami berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan ini karena dikelola secara terbuka dan kami mengetahui berapa dana yang disiapkan serta apa yang akan dibangun, sehingga bila dananya kurang, kami siap untuk secara swadaya membantu walaupun mungkin tidak terlalu besar tapi kami bisa membantu dengan tenaga dan sebagian keahlian kami, ya kalau proyek, tukang yang ada dibayar Rp. 35.000,- tiap harinya dengan kegiatan ini kami mau dibayar dengan Rp. 20.000 per harinya dan selisihnya anggaplah sumbangan kami sebagai masyarakat." (Wawancara, 12-11-2008)

Implikasi bila dana stimulan dari program tidak cukup, maka masyarakat diharapkan berswadaya untuk mencukupi biaya kegiatan pembangunan yang telah direncanakan bersama. LPM dan semua unsur yang berkompeten dalam program mampu memfasilitasi masyarakat dalam mengorganisasikan,

mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan pembangunan serta memobilisasi sumber daya masyarakat untuk menentukan kegiatan apa yang mendesak untuk segera dilakukan.

Secara umum pelaksanaan program PPMK tidak melibatkan LSM, bila LSM secara kelembagaan. Namun dengan melibatkan fasilitator sebagai pendamping program dan LPM atau organisasi bentukan masyarakat yang lainnya seperti Karang Taruna telah dapat menggantikan peranannya.

4. Kegiatan pemberdayaan dalam mewujudkan keberdayaan masyarakat.

Untuk membahas masalah kesejahteraan, maka tidak akan terlepas dari masalah kemiskinan. Kesejahteraan dan kemiskinan ibarat dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Ini seolah menjadi *fatsoen* sosial bahwa dimana ada orang kaya pasti ada orang miskin. Dalam pembahasan pada bagian ini akan diketengahkan masalah kemiskinan yang merupakan sasaran program sebagai acuan untuk melihat salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Masalah kemiskinan saat ini dirasakan sudah sangat mendesak untuk ditangani khususnya di wilayah perkotaan. Salah satu ciri umum dari kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai dengan kualitas perumahan dan permukiman yang jauh dibawah standar kelayakan dan mata pencaharian yang tidak menentu (Pedoman Umum P2KP : 2007). Selanjutnya pemahaman umum indikator kemiskinan adalah disebabkan minimnya kepemilikan harta. Namun pemahaman itu kemudian berkembang dengan pemahaman bahwa kemiskinan juga disebabkan

pada keterbatasan akses pelayanan publik yang meliputi sulitnya pelayanan kesehatan, sulitnya mendapatkan akses-akses informasi, sulitnya mendapatkan pelayanan pendidikan dan sebagainya. Maka keterlibatan pemerintah menjadi penting karena masalah kemiskinan adalah merupakan tanggung jawab Negara sebagai pemegang mandat rakyat.

PPMK diluncurkan oleh pemerintah Kota Bau-Bau dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini pula diharapkan menjadi motivasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan pembangunan dan diharapkan dapat berpengaruh pada peningkatan perekonomian dan dinamika sosial masyarakat.

Kebijakan ini untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan di tingkat lokal terhadap masyarakat sehingga melahirkan sebuah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang memperoleh legitimasi dari masyarakat. Pada akhirnya dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mandiri dan berkelanjutan dengan dukungan sumber daya lokal. Beberapa kegiatan yang dilakukan melalui program PPMK dalam upaya meningkatkan kesejahteraan adalah sebagai berikut :

a. Pemberian Bantuan Dana Pembangunan Sarana dan Prasarana

Telah dikemukakan terdahulu bahwa kegiatan yang didanai melalui anggaran PPMK adalah berupa kegiatan fisik dan nonn fisik berupa bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Kegiatan fisik yang telah dilaksanakan diseluruh kelurahan di Kota Bau-Bau adalah berupa

pembangunan jalan setapak, jalan usaha tani, gedung sekolah (IK) dan alat-alat permainannya, gedung serba guna, sarana olah raga, rehab kantor Kelurahan, drainase, MCK, Talud, perpipaan air bersih, knot dawn dan sebagainya. Semua kegiatan yang dilakukan merupakan hasil kesepakatan masyarakat yang dianggap sebagai kebutuhan utama dan diharapkan dapat memberi manfaat baik dari aspek ekonomi maupun sosial budaya.

Terlihat bahwa melalui program PPMK telah banyak terbangun sarana dan prasarana yang memberikan manfaat yang sangat berarti bagi masyarakat. seperti yang dikatakan ketua LPM Kelurahan Liwuto,

“ Dalam kurun waktu tiga tahun (tahun 2006 – 2008) di kelurahan Liwuto telah banyak pembagunan yang dihasilkan melalui program PPMK. Khusus pembangunan fisik, yang sudah terbangun adalah pembagunan jalan setapak, pembagunan jalan usaha tani, pembagunan sarana olah raga, pembagunan gedung sekolah dan perbaikan infra struktur lainnya. Dimana semua kegiatan pembagunan ini sangat memberi manfaat bagi masyarakat.” (wawancara. 20-12-2008).

Hal ini dikatakan pula oleh salah seorang tokoh pendidikan (kepala sekolah TK Bahari),

“ Kami sebagai insan pendidikan sangat berterimakasih kepada pemerintah yang telah memurunkan program PPMK ini. Sebelum adanya program ini, kami melakukan aktifitas belajar diruang yang sangat tidak mendukung yaitu dengan meminjam ruang posyandu yang hanya berukuran 4m x 5m. Ukuran tersebut sudah termasuk ruang belajar(dua kelas) dan kantor para guru. Bisa dibayangkan dengan kondisi yang seperti itu tentu tidak akan memberi hasil seperti yang diharapkan oleh tujuan pendidikan itu sendiri. Dengan adanya program PPMK ini, apa yang menjadi harapan kami yaitu pembangunan gedung skolah TK telah terealisasi. Hari ini kami telah mempunyai gedung tersendiri dengan ukuran 4m x 8m (duaruang belajar) dan 3m x 4m untuk satu ruang perkantoran.” (wawancara,20-12-2008)

Begitu pula yang dikatakan salah seorang anggota karang taruna,

“ Kami merasa bahwa, adanya program PPMK ini sangat memberi manfaat bagi kelurahan kami. Selain kegiatan pembangunan sarana dan prasarana jalan setapak, gedung sekolah TK, kegiatan kepemudaan juga telah dibangun melalui program ini yaitu pembuatan sarana olah raga (bulu tangkis). Dengan adanya sarana olah raga ini, maka kegiatan tahunan yang biasa dilakukan di kelurahan kami seperti PORSENI telah dapat dilakukan dengan kondisi lapangan yang cukup memadai, karena lapangan yang ada dibangun secara permanen.” (wawancara, 20-12-2008)

Di Kelurahan Ngkari-Ngkari, kegiatan pembangunan fisik salah satu yang memanggakan adalah pembangunan gedung serba guna. Meski dibangun dengan tiga tahun anggaran namun hasil yang didapatkan sangat memuaskan, seperti yang dikatakan oleh Ketua LPM Kelurahan Ngkari – Ngkari bahwa :

“ Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan melalui program PPMK khususnya di kelurahan kami sangat memberi manfaat. Dari sekian kegiatan yang kita programkan, gedung serbaguna ini yang paling kita prioritaskan. Dengan adanya gedung ini, maka setiap kegiatan musyawarah baik untuk kepentingan pembangunan sosial ekonomi, serta acara-acara budaya juga dapat kami lakukan di gedung serbaguna.” (wawancara, 22-12-2008)

Hal ini dipertegas pula oleh fasilitator Kelurahan Ngkari-Ngkari mengatakan,

“ Saya melihat bahwa program PPMK yang dilaksanakan di Kelurahan Ngkar-Ngkari cukup berhasil. Salah satu pembagunan yang dilaksanakan adalah pembagunan gedung serbaguna. Meski dibangun dengan tiga tahun anggaran (Rp. 60.000.000) namun hasil yang didapatkan sangat memuaskan. Dengan ukuran 10m x 12m dan konstruksi yang sangat baik, jika bangunan tersebut dilaksanakan melalui mekanisme tender/proyek mungkin akan menelan dana kisaran Rp. 150.000.000. Kegiatan seperti ini dapat terlaksana karena masyarakat Ngkari-Ngkari memiliki sifat dan budaya kegotong royongan yang tinggi.” (wawancara, 02-01-2009)

Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa program PPMK dari aspek pembangunan fisik terutama dari pelayanan publik telah dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat pada umumnya.

b. Pemberian bantuan dana bergulir bagi kelompok usaha ekonomi produktif.

Selain bantuan dana bagi pembangunan sarana dan prasarana fisik, PPMK juga memprogramkan kegiatan non fisik berupa bantuan usaha ekonomi produktif. Sasaran dari program ini adalah memberikan bantuan modal pada kelompok masyarakat yang memiliki usaha dan berpotensi untuk dikembangkan. Pemberian dana bergulir dilakukan sejak tahun 2007 dengan alokasi per kelurahan sebesar Rp. 20.000.000. Dana tersebut dikelola langsung oleh tim pelaksana kegiatan (LPM).

Salah satu aspek permasalahan yang dihadapi masyarakat kurang mampu adalah permodalan. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi pada aspek permodalan sangat penting dan urgen sehingga penanganannya harus tepat dalam arti sasaran dari kegiatan ini betul-betul sampai pada yang membutuhkan. Tim pelaksana tingkat kelurahan bersama pemerintah kelurahan benar-benar dapat menjalankan fungsinya dengan sebai-baiknya, sehingga apa yang menjadi tujuan dari program ini dapat terwujud.

Dari hasil pengamatan selama melakukan penelitian, dana tersebut diberikan kepada kelompok masyarakat yang memiliki usaha seperti menjual sayur, ikan, kue, tukang kayu dan bahkan diberikan kepada mereka yang berprofesi tukang ojek dan petani. Kelurahan Ngkari-Ngkari,

mayoritas peminjam adalah berprofesi petani, sedangkan di kelurahan Kolese dan Waborobo terdapat beberapa orang peminjam yang berprofesi sebagai tukang kayu dan tukang ojek. Pemberian dana bergulir bagi masyarakat dirasakan sangat membermanfaat.

Hasil wawancara dengan salah seorang peminfaat dana PPMK dari kelompok Penjual Sayur di Kelurahan Lipu mengatakan :

" Setelah kami mendapatkan dana pinjaman dari Program PPMK alhamdulillah kami merasa terbantu dan dapat menambah modal sekaligus dapat meningkatkan usaha jualan dan pendapatan kami." (wawancara, 28-12-2008)

Kemudian responden penjual ikan di Kelurahan Kolese mengatakan bahwa :

" Dengan dana pinjaman modal dari Program PPMK yang diberikan kepada kami cukup memberi manfaat karena yang tadinya jualan kami hanya sedikit dan satu jenis ikan saja karena terbatasnya modal, maka dengan tambahan modal dari PPMK menjadikan jualan ikan kami bervariasi sehingga pendapatan kami juga dapat meningkat." (wawancara, 28-12-2008)

Selanjutnya keterangan dari salah sorang petani yang sempat ditemui mengatakan bahwa :

" Kami merasa terbantu dengan adanya dana Program PPMK yang di niniamkan kepada kami karena disamping hunannya kecil juga dapat

“ Dengan adanya kebijakan Pemerintah melalui Program PPMK khususnya dana usaha ekonomi produktif yang disalurkan kepada kelompok usaha masyarakat (Pokmas) mereka sangat merasakan manfaatnya disamping mereka dapat mengakses modal dengan mudah juga bunganya sangat rendah serta yang terpenting adalah mereka dapat mengembangkan usahanya yang dapat berdampak kepada peningkatan pendapatan mereka.” (wawancara, 29-12-2008)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa program PPMK berupa bantuan dana bergulir bagi kelompok masyarakat yang memanfaatkan dapat memberi dampak positif namun kondisi positif yang memprihatinkan dimana bantuan dana yang diberikan tidak dapat dikembangkan, sehingga dana tersebut mengalami kemacetan. Kondisi yang memprihatinkan itu bukan karena kelalaian pengelola program atau peminjam tetapi karena kondisi di luar jangkauan manusia, seperti yang dikatakan oleh salah seorang peminjam yang keseharian adalah sebagai pedagang ikan keliling ;

“ Terus terang dana bergulir yang diberikan kepada saya sangat memberi manfaat karna saya dapat menambah modal usaha saya. Tetapi dalam beberapa waktu ini, saya mengalami kemacetan. Bukan karena saya tidak mau membayar tapi karena saya dalam beberapa kali mengalami kerugian. Dana yang ada pada saya terbatas sehingga dengan mengalami beberapa kali kerugian dana yang kami gunakan sebagai modal akan semakin habis. Jangankan untuk mengembalikan, mencukupi kebutuhan sehari-hari saja sangat susah” . (Wawancara, 28 – 12 – 2008)

Hal ini dipertegas oleh salah seorang fasilitator yang mengatakan :

“ Bahwa untuk mengelola dana bergulir terdapat beberapa factor yang mempengaruhi antaralain disebabkan faktor mental baik peminjam maupun pengelola, lemahnya sistim pengawasan atau faktor lain diluar jangkauan manusia. Di beberapa kelurahan misalnya, terdapat peminjam yang tidak dapat mengembalikan pinjamannya. Hal ini bukan dikarenakan peminjam tersebut memiliki mental yang tidak baik tetapi lebih karena

faktor yang diluar jangkauan mereka. Mereka hanyalah sebagai penjual ikan keliling yang tidak selamanya mengalami keuntungan. Selain itu barang yang mereka dagangkan bukanlah barang yang dapat bertahan dalam beberapa hari, sehingga ketika barang yang mereka dagangkan tidak laku maka dapat dipastikan mereka akan mengalami kerugian." (Wawancara, 03-01-2009)

Jika mengacu pada pemahaman kemiskinan yakni kurangnya kepemilikan harta atau ketidak mampuan dalam memenuhi kebutuhan standar minimum, maka upaya mewujudkan keberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah dilakukan oleh PPMK belum dapat sepenuhnya terwujud.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada bab temuan dan pembahasan, maka simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut Dukungan birokrasi baik pada tingkat kota, kecamatan maupun pada kelurahan dalam pelaksanaan Program PPMK terlihat sangat baik. Pada pengelolaan kegiatan PPMK di seluruh kelurahan yang ada dalam wilayah Kecamatan Kokalukuna, Kecamatan Bungi dan Kecamatan Betoambari terlihat dukungan yang besar dari birokrasi pengelola program yang memiliki komitmen untuk memberdayakan masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa dukungan birokrasi dalam rangka mensukseskan PPMK sangat baik.

Keberhasilan program ini selain dukungan birokrasi pada tingkat atas yaitu dengan membangun sistem pengawasan yang baik sangat ditentukan pula oleh dukungan birokrasi di tingkat lapangan.

Partisipasi masyarakat dalam PPMK sangat ditentukan oleh kemampuan tim pelaksana di tingkat lapangan serta dukungan dari semua tim yang ada dalam sistem itu, baik dari tim kota, tim kecamatan, tim kelurahan, maupun fasilitator sebagai pendamping program. Pemahaman tim pengelola program tentang konsep pemberdayaan masyarakat menjadi modal utama bagi tercapainya partisipasi masyarakat. Pengelolaan program yang transparan serta komitmen semua unsur pelaksana program untuk memberdayakan masyarakat akan mendorong partisipasi masyarakat dan menghasilkan swadaya serta keberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam berbagai bentuk. Terlihat pada saat musyawarah untuk

memutuskan kegiatan, pelaksanaan kegiatan pembangunan hingga pemeliharaan hasil pembangunan masyarakat telah ikut melibatkan diri. Dalam kegiatan fisik seperti pembangunan infrastruktur telah tercipta partisipasi masyarakat yaitu dengan adanya swadaya baik berupa materi seperti pembebasan lahan mereka untuk kepentingan umum, tenaga, pikiran melalui usulan atau saran maupun gagasan yang diberikan demi terciptanya keberdayaan masyarakat melalui program PPMK. Selanjutnya pada kegiatan ekonomi produktif menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat juga cukup baik. Secara umum peranan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan PPMK cukup memberikan harapan kepada pengelola program dan pemerintah dalam mewujudkan keberdayaan masyarakat.

Peranan *stakeholders* dalam PPMK yaitu lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dan organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna terlihat cukup memberikan warna tersendiri bagi pengelolaan PPMK. Hampir di seluruh kecamatan, organisasi kemasyarakatan ini telah mampu memainkan peranannya dalam mendorong terciptanya keberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan PPMK dapat mempengaruhi kesuksesan pelaksanaan PPMK. Dengan adanya dukungan dari para tokoh masyarakat, maka LPM dalam mengelola kegiatan bersama dengan masyarakat terlihat mampu menunjukkan hasil yang positif. Berbagai kreasi dan inovatif sebagai strategi dalam melaksanakan program telah dilakukan.

Berbagai upaya mewujudkan keberdayaan masyarakat telah dilakukan pemerintah melalui PPMK. Pemberian dana yang diperuntukan bagi pembangunan sarana dan prasarana fisik serta bantuan modal usaha ekonomi produktif telah dapat

dimanfaatkan oleh masyarakat dan hasilnya sangat menggembirakan. Terbangunnya sarana pendidikan, sarana kesehatan, jalan setapak, jalan usaha tani, sarana olah raga, gedung serba guna serta berbagai infra struktur lainnya telah dapat merubah lingkungan menjadi suatu kondisi yang memadai sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses kegiatan sosial, ekonomi, budaya yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup mereka. Begitu pula dengan bantuan dana usaha ekonomi produktif, sangat memberi manfaat bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan, karena disamping dapat meningkatkan omset jualan mereka juga dapat meningkatkan pendapatan mereka. Dengan demikian, secara umum PPMK dapat mempengaruhi kualitas kehidupan masyarakat baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya maupun politik sebagai upaya mewujudkan masyarakat yang mandiri.

B. SARAN

Mengingat banyaknya manfaat yang didapatkan melalui PPMK, maka diharapkan program ini tetap dipertahankan sebagai salah satu strategi dalam mewujudkan keberdayaan masyarakat.

Sebagaimana permasalahan dalam penulisan tesis ini serta temuan dalam melakukan penelitian, maka sebagai masukan adalah : *Pertama*, dukungungan birokrasi harus tetap dipertahankan dan bahkan ditingkatkan sehingga tujuan pelaksanaan PPMK dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan. Meningkatkan kemampuan semua unsur pengelola PPMK sehingga memudahkan dalam memberi pandangan atau persespsi tentang kegiatan pemberdayaan. *Kedua*, lebih memberi ruang kepada masyarakat untuk melibatkan diri. Dengan demikian diharapkan dapat

mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan PPMK. *Ketiga*, keterlibatan stakeholder sangat mempengaruhi suksesnya pelaksanaan PPMK. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan PPMK harus tetap melibatkan stakeholder dengan memberi ruang yang seluas – luasnya. Hal ini dimaksudkan agar mereka lebih berperan dalam membantu tim pengelola PPMK baik memberi informasi tentang tujuan PPMK kepada masyarakat maupun masukan kepada tim pengelola program tentang kegiatan apa dan segala permasalahannya dalam pelaksanaan PPMK.

Untuk lebih meningkatkan keberdayaan masyarakat, maka perlu dipikirkan oleh pemerintah Kota Bau – Bau agar menambah besaran dana PPMK secara proporsional sebesar Rp. 100.000.000 per kelurahan. Pemberian dana tersebut ditentukan dari keberhasilan pengelolaan program di wilayah masing-masing, dengan ketentuan kelurahan yang memiliki *Performance* kurang baik penambahan dana PPMK dapat ditunda dahulu, sehingga akan memberikan rangsangan bagi pengelola program untuk memperlihatkan *performance* yang baik sesuai harapan masyarakat.

Penambahan dana PPMK diharapkan dapat memberi keleluasaan bagi masyarakat agar lebih memiliki keleluasaan dalam melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan baik yang bersifat fisik maupun non fisik seperti pemberian bantuan dana bergulir bagi usaha ekonomi produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, dan N. Syamsuddin. (1991). *Profil budaya politik Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafindo.
- Bryant, C. dan White, L.C. (1989). *Manajemen pembangunan untuk negara berkembang*. Jakarta: LP3ES.
- Britha, M. (2001). *Metode penelitian partisipasi dan upaya pemberdayaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- BPM Kota Bau-Bau. (2005). *Petunjuk teknis pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat kelurahan Kota Bau – Bau*.
- Burhan, B. (2007). *Metotologi penelitian kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Dwiyanto, Agus, *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Yokyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
- Dunn, (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edi, S. (1997). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*. Yogyakarta: Aditama.
- Handyaningrat, Soewarno. *Administrasi pemerintahan dalam pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Heryawan,W. (1992). *Pengantar metodologi penelitian*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Ife, Jim. (1996). *Community Development Creating Alternative Vision Analysis And Practise*, Addison Wesley Longman Australia Pty Ltd. Melbourne.
- Ida, B.M. (2004) *Fisipol Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kartono, Kartini. (1994). *Pemimpin dan kepemimpinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada.
- Keban, T. Y. (2008). *Enam dimensi administrasi konsep, teori dan isu*. Yogyakarta: Gava Media.

- Koontz, H (1993). *Manajemen, diterjemahkan oleh Antarikso, dkk*, Erlangga.
- Mas'ood, Mohtar. (2002). *Ekonomi Politik Pembangunan (Modul Perkuliahan MAP-UGM)*, MAP UGM
- . (2003). *Politik, birokrasi dan pembangunan* Yogyakarta: Pustaka Pelajar .
- Ndraha, Taiidziduhu. (1983). *Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di beberapa desa*. Jakarta: (Studi Kasus) IIP.
- Prijono, S. Onny dan Pranaka, A.M.W. (1996). *Pemberdayaan konsep, kebijakan dan implementasi*. Jakarta: Centre For Strategic And International Studies. .
- Prasetya, I. (2006). *Metodologi penelitian administrasi*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Pheni, C. (2006). *Teori dani isu pembangunan* . Jakarta: Univrsitas Terbuka.
- Ruky, S. A. (2003). *Sumber daya manusia berkualitas*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Riduwan. (2008). *Metode dan tehnik menyusun tesis*. Bandung : Alfabeta.
- Salim Peter dan Salim Yenni. (1991). *Kamus Bahasa Indonesia kontemporer, modern*. Jakarta: English press .
- Siagian. (2003). *Administrasi pembangunan konsep, dimensi dan strateginya*. Jakarta: Haji Masagung.
- Sumodiningrat,G. (1997). *Pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat*. Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara.
- Sulistiyani, T. A. dan Rosidah. (2003). *Manajemen sumber daya manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sulistiyani, T. A. (editor). (2004). *Memahami good governance dalam prspektif Sumber daya manusia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sulistiyani, T. A. (2004). *Kemitraan dan model - model pemberdayan*. Yogyakarta .Gava Media.

- Sugiyono, (2007). *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: CV. Alfa Beta.
- Tjokrowinoto, M. (2001). *Birokrasi dalam polem*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tjokrowinoto, M.(1995). *Politik pembangunan* . Yogyakarta: PT. Tiara Wacana .
- Thoha, M. (2003). *Birokrasi dan politik di Indonesia* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. .
- Usman, R. (2008). *Metodologi penelitian sosial dan ekonomi*. Bandung : CV. Alfa Beta .
- .(1991). *Prespektif Perilaku Birokrasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Winarno, B. (2008). *Teori dan proses kebijakan publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

UNIVERSITAS TERBUKA

No	Nama Kelurahan	Jenis Program	Volume	Sifat	Realisasi		Jumlah (Rp)	Ket
					PPMK (Rp)	Swadaya (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. KECAMATAN BETOAMBARI								
1	KELURAHAN KATOBENGKE	- Pembuatan Balai Pertemuan - Bantuan PKK - Biaya Operasional Pengelola & Adm	1 Paket 1 Paket 3 Orang	Baru Baru Baru	30,000,000.00 500,000.00 2,657,894.74	3,950,000.00 - -	33,950,000.00 500,000.00 2,657,894.74	
					33,167,894.74	3,950,000.00	37,107,894.74	
2	KEL.SULAA	- Rehab Berat Gedung TK - Bantuan PKK - Biaya Operasional Pengelola & Adm	10 X 11 meter 1 Paket 3 Orang	Rehab Baru Baru	30,000,000.00 500,000.00 2,657,894.74	500,000.00 - -	30,500,000.00 500,000.00 2,657,894.74	
					33,167,894.74	500,000.00	33,657,894.74	
3	KEL. WABOROBO	- Drainase (P=4, 10 M X L = 100 Cm) Dueker (P = 8 M X L = 2 M) - Rehab TK Padu Ling. Labalawa - Bantuan PKK - Biaya Operasional Pengelola & Adm	1 Paket 8 X 7,25 m 1 Paket 3 Orang	Baru Rehab Baru Baru	20,200,000.00 9,800,000.00 500,000.00 2,657,894.74	- - - -	20,200,000.00 9,800,000.00 500,000.00 2,657,894.74	
					33,167,894.74	-	33,167,894.74	
4	KEL. LIPU	- Jalan Setapak - Bantuan PKK - Biaya Operasional Pengelola & Adm	1 Paket 1 Paket 3 Orang	Baru Baru Baru	30,522,894.74 500,000.00 2,657,894.74	2,500,000.00 - -	33,022,894.74 500,000.00 2,657,894.74	
					33,880,789.48	2,500,000.00	36,180,789.48	
II. KECAMATAN KOKALUKUNA								
1	KEL. LIWUTO	- Pembuatan Lapangan Bulu Tangkis (18 X 7 M) - Rapat Beton Jalan Lingk. Matanayo (135 X 5 m) - Pemb. Jalan Tangga (25M X 1,5 M) dan jalan Setapak Lingk. Tanjung Batu (25 M X 2 M) Pembuatan Jalan Tangga Lingk. Tanga (50 M X 1,5 M) - Bantuan PKK - Biaya Operasional Pengelola & Adm.	126 M ² 202,5 M ² 37,5 M ² 50 M ² 75 M ² 1 Paket 3 Orang	Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru	6,955,000.00 7,970,000.00 8,790,000.00 - 6,285,000.00 500,000.00 2,657,894.74	3,775,000.00 200,000.00 1,260,000.00 900,000.00 - -	10,730,000.00 8,170,000.00 10,050,000.00 7,185,000.00 500,000.00 2,657,894.74	
					33,167,894.74	6,138,000.00	39,292,894.74	
2	KEL.KADOLOMOKO	- Pemb. Jalan Setapak - Pemb. Bak Penampungan (Lingk. Gunung Kelor) - Pemb. Talud (Lingk. Bure Bawah) P = 13 M, T = 65 M - Pemb. MCK (Lingk. Bure Atas) (2,3 X	120 M X 1,5 M 3 X 3 X 2 M 13 M 1 Unit	Baru Baru Baru Baru	12,488,000.00 5,142,100.00 3,425,000.00 8,944,900.00	1.103,000.00 831,000.00 348,000.00 1,319,250.00	13,591,000.00 5,973,100.00 3,773,000.00 10,264,150.00	

1	2	3	4	5	6	7	814/41150.pdf
		2 M) - Bantuan PKK - Biaya Operasional Pengelola & Adm.	1 Paket 3 Orang	Baru Baru	500,000.00 2,657,894.74	- -	500,000.00 2,657,894.74
					33,157,894.74	3,601,250.00	36,759,144.74
3	SUKANAYO	- Pengadaan MCK 3 Unit - Bantuan PKK - Biaya Operasional Pengelola & Adm.	2X3 1 Paket 3 Orang	Baru Baru Baru	30,000,000.00 500,000.00 2,657,894.74	2,880,000.00 - -	32,880,000.00 500,000.00 2,657,894.74
					33,157,894.74	2,880,000.00	36,037,894.74
4	KEL. WARURUMA	- Pemb. Posyandu (1 Unit) - Pengadaan Kursi - Bantuan PKK - Biaya Operasional Pengelola & Adm.	4 X 5 M 1 Paket 1 Paket 3 Orang	Baru Baru Baru Baru	23,100,000.00 6,900,000.00 500,000.00 2,657,894.74	6,276,000.00 - - -	29,376,000.00 6,900,000.00 500,000.00 2,657,894.74
					33,157,894.74	6,276,000.00	39,433,894.74
5	KEL. LAKOLOGOU	- Pengadaan WC Masjid Nurul Falaq - Talud Beruga - Bantuan PKK - Biaya Operasional Pengelola & Adm.	2, 5 X 6 M 58 M 1 Paket 3 Orang	Baru Baru Baru Baru	10,000,000.00 20,000,000.00 500,000.00 2,657,894.74	380,000.00 980,000.00 - -	10,380,000.00 20,980,000.00 500,000.00 2,657,894.74
					33,157,894.74	1,360,000.00	34,517,894.74
III. KECAMATAN BUNGI							
1	KEL. KAMPEONAHO	- Penylesaian Balai Pertemuan Serba Guna Kelurahan Kampeonaho - Pemb. Balai Pertemuan Lingk. wanajati - Bantuan PKK - Biaya Operasional Pengelola & Adm.	8 X 14 M 7 X 9 M 1 Paket 3 Orang	Rehab Baru Baru Baru	15,000,000.00 15,000,000.00 500,000.00 2,657,894.74	4,574,000.00 10,000,000.00 - -	19,574,000.00 25,000,000.00 500,000.00 2,657,894.74
					33,157,894.74	14,574,000.00	47,731,894.74
2	KEL. KOLESE	- Perintisan / Pengerasan Jalan - Bantuan PKK - Biaya Operasional Pengelola & Adm.	4 X 400 M 1 Paket 3 Orang	Baru Baru Baru	30,000,000.00 500,000.00 2,657,894.74	7,100,000.00 - -	37,100,000.00 500,000.00 2,657,894.74
					33,157,894.74	7,100,000.00	40,257,894.74
3	KEL. KALIA - LIA	- Pemb. Posyandu Kanceae - Pemb. Posyandu Wamembe - Biaya Operasional Pengelola & Adm. - Biaya Operasional Pengelola & Adm. - Biaya Operasional Pengelola & Adm.	3 X 4 M 4 X 5 M 3 Orang 3 Orang 3 Orang	Baru Baru Baru Baru Baru	12,551,000.00 17,449,000.00 2,657,894.74 2,657,894.74 2,657,894.74	2,000,000.00 2,250,000.00 - - -	14,551,000.00 19,699,000.00 2,657,894.74 2,657,894.74 2,657,894.74
					2,657,894.74	-	2,657,894.74
					2,657,894.74	-	2,657,894.74
5	KEL. LIABUKU	- Biaya Operasional Pengelola & Adm. - Biaya Operasional Pengelola & Adm. - Pembangunan TK	3 Orang 3 Orang 4 X 9 M	Baru Baru Baru	2,657,894.74 2,657,894.74 30,000,000.00	- - -	2,657,894.74 2,657,894.74 30,000,000.00
6	KEL. NGKARI-NGKARI	- Lanjutan Pemb. Balai Serba Guna	14 X 9 M	Lanjutan	30,000,000.00	-	30,000,000.00
7	KEL. LOWU - LOWU	- Pemb. Jalan Baru	600 M	Baru	30,000,000.00	-	30,000,000.00
					33,157,894.74	-	33,157,894.74
					33,157,894.74	-	33,157,894.74
4	KEL. PALABUSA	- Pemb. Rumah Dinas Lurah	5 X 9	Baru	30,000,000.00	3,750,000.00	33,750,000.00
					33,157,894.74	3,750,000.00	36,907,894.74
					33,157,894.74	4,250,000.00	37,407,894.74

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Bantuan PKK	1 Paket	Baru	500,000.00	-	500,000.00	50.pdf
		- Bantuan PKK	1 Paket	Baru	500,000.00	-	500,000.00	
		- Bantuan PKK	1 Paket	Baru	500,000.00	-	500,000.00	
		- Bantuan PKK	1 Paket	Baru	500,000.00	-	500,000.00	
		- Bantuan PKK	1 Paket	Baru	500,000.00	-	500,000.00	

Sumber : Kantor BPM Kota Bau - Bau

UNIVERSITAS TERBUKA

HASIL KEGIATAN PEMBANGUNAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (PPMK)
TAHUN ANGGARAN 2007 KOTA BAU - BAU

Lampiran 2

14/41150.pdf

No	Nama Kelurahan	Jenis Program	Volume	Sifat	Realisasi		Jumlah (Rp)	Ket
					PPMK (Rp)	Swadaya (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. KECAMATAN BETOAMBARI								
1.	KEL. WABOROBO	- Pembuatan WC Mesjid - Pengadaan Jendela dan Ventilasi - Bantuan TK Nurun Nisa Waborobo - Pembuatan Pagar Mesjid An Nur - Pinjaman Dana Bergulir - Bantuan Pengembangan Remaja Mesjid - Bantuan Pengembangan Karang Taruna - Bantuan Operasional	1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket	Baru Baru Baru Baru Baru Baru	10.712.500 3.378.500 400.000 5.509.000 20.000.000 2.500.000 2.500.000 5.000.000		10.712.500 3.378.500 400.000 5.509.000 20.000.000 2.500.000 2.500.000 5.000.000	
2.	LABALAWA	- Pembuatan Pagar Kantor Lurah - Rehabilitasi Posyandu - Pengadaan Kursi Plastik - Pinjaman Dana Bergulir - Bantuan Pengembangan Remaja Mesjid - Bantuan Pengembangan Karang Taruna - Bantuan Operasional	21 M X 1,65 M 1 Unit 200 Buah 30 Orang 1 Paket 1 Paket 1 Paket	Baru Baru Baru Baru Baru Baru	10.000.000 2.000.000 8.000.000 20.000.000 2.500.000 2.500.000 5.000.000	2.820.000	12.820.000 2.000.000 8.000.000 20.000.000 2.500.000 2.500.000 5.000.000	
3.	KEL. LIPU	- Rehab Balai Pertemuan - Pinjaman Dana Bergulir - Bantuan Pengembangan Remaja Mesjid - Bantuan Pengembangan Karang Taruna - Bantuan Operasional	1 Paket 1 Paket / 3 Kelompok 1 Paket 1 Paket 1 Paket	Baru Baru Baru Baru Baru	20.000.000 20.000.000 2.500.000 2.500.000 5.000.000	1.690.000 1.500.000	21.690.000 20.000.000 2.500.000 4.000.000 5.000.000	
4.	KEL. KATOBENGKE	- Pembuatan Jalan Lingkungan (Rabat Beton) - Pinjaman Dana Bergulir - Bantuan Pengembangan Remaja Mesjid - Bantuan Pengembangan Karang Taruna - Bantuan Operasional	450 M ² (3M X 150 M) 3 Kelompok 1 Paket 1 Paket 1 Paket	Baru Baru Baru Baru Baru	20.000.000 20.000.000 2.500.000 2.500.000 5.000.000	1.690.000 1.500.000	21.690.000 20.000.000 2.500.000 4.000.000 5.000.000	
5.	KEL. SULAA	- Pembuatan Talud di Mata Air - Pinjaman Dana Bergulir - Bantuan Pengembangan Remaja Mesjid - Bantuan Pengembangan Karang Taruna - Bantuan Operasional	105 M (3 X 2 X 1,75 M) 3 Kelompok 1 Paket 1 Paket 1 Paket	Baru Baru Baru Baru Baru	20.000.000 20.000.000 2.500.000 2.500.000 5.000.000		20.000.000 20.000.000 2.500.000 2.500.000 5.000.000	
					50.000.000	0	50.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
II. KECAMATAN BUNGI							
1.	KEL. LIABUKU	- Pengadaan Sumur Air dari Sumur Bor - Pinjaman Dana Bergulir - Bantuan Pengembangan Remaja Masjid - Bantuan Pengembangan Karang Taruna - Bantuan Operasional	5 Sumur Bor 8 Kelompok 1 Paket 1 Paket 1 Paket	Baru Baru Baru Baru Baru	20.000.000 20.000.000 2.500.000 2.500.000 5.000.000	1.712.000	21.712.000 20.000.000 2.500.000 2.500.000 5.000.000
					60.000.000	1.712.000	61.712.000
2.	KEL. WALIABUKU	- Pembangunan Aula Pertemuan - Pinjaman Dana Bergulir - Bantuan Pengembangan Remaja Masjid - Bantuan Pengembangan Karang Taruna - Bantuan Operasional	120 M ² 6 Kelompok 1 Paket 1 Paket 1 Paket	Baru Baru Baru Baru Baru	20.000.000 20.000.000 2.500.000 2.500.000 5.000.000	3.397.000	23.397.000 20.000.000 2.500.000 2.500.000 5.000.000
					60.000.000	3.397.000	63.397.000
3.	KEL. KOLESE	- Pembebasan Lahan Utk Pemb. Mts Swasta - Pinjaman Dana Bergulir - Bantuan Pengembangan Remaja Masjid - Bantuan Pengembangan Karang Taruna - Bantuan Operasional	871 M ² 40 Orang 1 Paket 1 Paket 1 Paket	Baru Baru Baru Baru Baru	20.000.000 20.000.000 2.500.000 2.500.000 5.000.000	3.397.000	23.397.000 20.000.000 2.500.000 2.500.000 5.000.000
					60.000.000	3.397.000	63.397.000
4.	KEL. KALIA - LIA	- Pembuatan Jalan Baru (Pembukaan) - Pinjaman Dana Bergulir - Bantuan Pengembangan Remaja Masjid - Bantuan Pengembangan Karang Taruna - Bantuan Operasional	550 M X 4 M 8 Kelompok 1 Paket 1 Paket 1 Paket	Baru Baru Baru Baru Baru	20.000.000 20.000.000 2.500.000 2.500.000 5.000.000	3.397.000	23.397.000 20.000.000 2.500.000 2.500.000 5.000.000
					60.000.000	3.397.000	63.397.000
5.	KEL. LOWU - LOWU	- Pembuatan Jalan Baru (Pembukaan) - Pinjaman Dana Bergulir - Bantuan Pengembangan Remaja Masjid - Bantuan Pengembangan Karang Taruna - Bantuan Operasional	3,5 X 250 M 4 Kelompok 1 Paket 1 Paket 1 Paket	Baru Baru Baru Baru Baru	20.000.000 20.000.000 2.500.000 2.500.000 5.000.000	3.397.000	23.397.000 20.000.000 2.500.000 2.500.000 5.000.000
					60.000.000	3.397.000	63.397.000
6.	KEL. KAMPEONAHO	- Pembangunan MCK Masjid Nurul Taqin Lingkungan Wonco - Pembangunan MCK Masjid Al - Hidayah Lingkungan Tampuna - Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) Luas TK. Tunas Wollo - Pinjaman Dana Bergulir - Bantuan Pengembangan Remaja Masjid - Bantuan Pengembangan Karang Taruna - Bantuan Operasional	2,5 X 4 M 2,5 X 4 M 1 Set 8 Kelompok 1 Paket 1 Paket 1 Paket	Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru	5.000.000 5.000.000 10.000.000 20.000.000 2.500.000 2.500.000 5.000.000	5.070.000 5.070.000 1.000.000	10.070.000 10.070.000 11.000.000 20.000.000 2.500.000 2.500.000 5.000.000
					60.000.000	11.140.000	61.140.000
7.	KEL. PALABUSA	- Pembuatan Balai Pertemuan - Pinjaman Dana Bergulir - Bantuan Pengembangan Remaja Masjid	8 X 15 M 5 Kelompok 1 Paket	Baru Baru Baru	20.000.000 20.000.000 2.500.000	3.397.000	23.397.000 20.000.000 2.500.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Bantuan Pengembangan Karang Taruna - Bantuan Operasional	1 Paket 1 Paket	Baru Baru	2.500.000 5.000.000		2.500.000 5.000.000	
					60.000.000	3.397.007	60.000.000 53.397.008	
8.	KEL. NGKARI - KARI	- Pembuatan Balai Pertemuan - Pinjaman Dana Bergulir - Bantuan Pengembangan Remaja Masjid - Bantuan Pengembangan Karang Taruna - Bantuan Operasional	1 Paket 5 Kelompok 1 Paket 1 Paket 1 Paket	Lanjutan Baru Baru Baru Baru	20.000.000 20.000.000 2.500.000 2.500.000 5.000.000		20.000.000 20.000.000 2.500.000 2.500.000 5.000.000	
					60.000.000	0	60.000.000 60.000.000	
III KECAMATAN KOKALUKUNA								
1.	KEL. KADOLMOKO	- Pembuatan Gudang WC - Pengadaan Kurai - Pengadaan Warless - Pinjaman Dana Bergulir - Bantuan Pengembangan Remaja Masjid - Bantuan Pengembangan Karang Taruna - Bantuan Operasional	1 Unit 200 Buah 1 Unit 1 Paket 1 Paket 1 Paket	Baru Baru Baru Baru Baru Baru	13.500.000 4.000.000 2.500.000 20.000.000 2.500.000 2.500.000 5.000.000		13.500.000 4.000.000 2.500.000 20.000.000 2.500.000 2.500.000 5.000.000	
					60.000.000	0	60.000.000 60.000.000	
2.	KEL. KADOLO	- Pengadaan Air Bersih - Pengadaan Fasilitas LPM - Pembuatan Jalan Setapak - Pinjaman Dana Bergulir - Bantuan Pengembangan Remaja Masjid - Bantuan Pengembangan Karang Taruna - Bantuan Operasional	1 Paket 1 Paket 60 X 1½ 6 Kelompok 1 Paket 1 Paket 1 Paket	Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru	5.000.000 7.000.000 8.000.000 20.000.000 2.500.000 2.500.000 5.000.000	1.980.000 50.000 480.000	6.980.000 7.050.000 8.480.000 20.000.000 2.500.000 2.500.000 5.000.000	
					60.000.000	2.510.000	60.000.000 62.510.000	
3.	KEL. WARURUMA	- Rehab / Pembuatan Lapangan Volly - Pinjaman Dana Bergulir - Bantuan Pengembangan Remaja Masjid - Bantuan Pengembangan Karang Taruna - Bantuan Operasional	1 Unit 5 Kelompok 1 Paket 1 Paket 1 Paket	Rehab Baru Baru Baru Baru	20.000.000 20.000.000 2.500.000 2.500.000 5.000.000	26.864.000	48.864.000 20.000.000 2.500.000 2.500.000 5.000.000	
					60.000.000	26.864.000	60.000.000 76.864.000	
4.	KEL. LAKOLOGOU	- Pemagaran Taman Kanak - Kanak (TK) - Pengadaan Kural Baruga - Pinjaman Dana Bergulir - Bantuan Pengembangan Remaja Masjid - Bantuan Pengembangan Karang Taruna - Bantuan Operasional	53 M 68 buah 4 Kelompok 1 Paket 1 Paket 1 Paket	Baru Baru Baru Baru Baru Baru	17.620.000 2.380.000 20.000.000 2.500.000 2.500.000 5.000.000	868.000	18.488.000 2.380.000 20.000.000 2.500.000 2.500.000 5.000.000	
					60.000.000	868.000	60.000.000 60.868.000	
5.	KEL. SUKANAYO	- Pembangunan Gdng PKK dan BKB - Pinjaman Dana Bergulir - Bantuan Pengembangan Remaja Masjid - Bantuan Pengembangan Karang Taruna - Bantuan Operasional	6,5 M X 6 M 8 Kelompok 1 Paket 1 Paket 1 Paket	Baru Baru Baru Baru Baru	20.000.000 20.000.000 2.500.000 2.500.000 5.000.000		20.000.000 20.000.000 2.500.000 2.500.000 5.000.000	
					60.000.000	0	60.000.000 60.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	KEL. LIWUTO	- Rehab. Jalan Raya - Pembuatan Jalan Masjid Fastiabiqul Khairat - Pembuatan Pagar & Luncuran TK. Bahari - Pembuatan Ayunan & Luncuran TK Akhlus Suff - Pengadaan Kursi - Pengadaan Waries - Pinjaman Dana Bergilir - Bantuan Pengembangan Remaja Masjid - Bantuan Pengembangan Karang Taruna - Bantuan Operasional	40 M ² / 4 RW 60 M ² 24 M ² dan 1 Buah 1 Buah dan 1 Buah 200 Buah 1 Buah 8 Kelompok 1 Paket 1 Paket 1 Paket	Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru	3.910.000 1.660.000 4.080.000 2.850.000 6.100.000 1.400.000 20.000.000 2.500.000 2.500.000 5.000.000	180.000 500.000 430.000	4.090.000 2.160.000 4.510.000 2.850.000 6.100.000 1.400.000 20.000.000 2.500.000 2.500.000 5.000.000	00.pdf
					50.000.000	1.110.000	61.110.000	

Sumber : Kantor BPM Kota Bau - Bau

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 3

No	Nama Kelurahan	Jenis Program	Volume	Sifat	Realisasi		Jumlah (Rp)	Ket
					PPMK (Rp)	Swadaya (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I KECAMATAN BETOAMBARI								
1.	KEL. WABOROBO	- Pembuatan Jembatan Penyebrangan - Rehab Sumur Tua - Pembuatan Jalan Setapak - Bantuan Pengembangan Keg. PKK Kelurahan - Bantuan Pengembangan Keg. Karang Taruna - Administrasi Pelaporan - Insentif Pengelola	P = 6M X L = 3M XT=2M 1 Unit (4M X 4M) P = 100M X L = 1,5M X T=20CM 1 Paket 1 Paket 1 Paket 3 Orang	Baru Rehab Baru Baru Baru Baru	2.788.500 26.843.300 10.368.200 2.500.000 2.500.000 600.000 4.400.000	1.855.000 2.460.000 1.845.000	4.443.500 29.303.300 12.013.200 2.500.000 2.500.000 600.000 4.400.000	
					50.000.000	5.760.000	55.760.000	
2	LABALAWA	- Pembuatan Jalan Baru - Bantuan Pengembangan Keg. PKK Kelurahan - Bantuan Pengembangan Keg. Karang Taruna - Administrasi Palaporan - Insentif Pengelola	P = 1,50M X L=6M 1 Paket 1 Paket 1 Paket 3 Orang	Baru Baru Baru Baru Baru	40.000.000 2.500.000 2.500.000 600.000 4.400.000	5.020.000	45.020.000 2.500.000 2.500.000 600.000 4.400.000	
					50.000.000	5.020.000	55.020.000	
3.	KEL. LIPU	- Pembuatan Jaiian Setapak - Bantuan Pengembangan Keg. PKK Kelurahan - Bantuan Pengembangan Keg. Karang Taruna - Administrasi Pelaporan - Insentif Pengelola	250M X 1,20M 1 Paket 1 Paket 1 Paket 3 Orang	Baru Baru Baru Baru Baru	40.000.000 2.500.000 2.500.000 600.000 4.400.000	4.285.000	44.285.000 2.500.000 2.500.000 600.000 4.400.000	
					50.000.000	4.285.000	54.285.000	
4.	KEL. KATOBENGKE	- Pebuatan MCK Masjid Amal Saleh - Pembuatan Posyandu - Pengadaan Timbunan Mejid Al - Kausar - Pengadaan Mobiler Posyandu - Bantuan Pengembangan Keg. PKK Kelurahan - Bantuan Pengembangan Keg. Karang Taruna - Administrasi Pelaporan - Insentif Pengelola	1 Paket 1 Paket 3 Orang	Baru Baru Baru Baru Baru Baru	21.153.500 12.658.500 5.170.000 1.020.000 2.500.000 2.500.000 600.000 4.400.000	3.300.000 3.050.000 1.250.000	24.453.500 18.708.500 5.170.000 2.270.000 2.500.000 2.500.000 600.000 4.400.000	
					50.000.000	7.600.000	57.600.000	
5.	KEL. SULAA	- Pembangunan Gedung Posyandu - Pengadaan Knok Dwon - Bantuan Pengembangan Keg. PKK Kelurahan - Bantuan Pengembangan Keg. Karang Taruna - Administrasi Pelaporan - Insentif Pengelola	18 M ² (3X6) 1 Paket / 48 M ² (4X12M) 1 Paket 1 Paket 1 Paket 3 Orang	Baru Baru Baru Baru Baru	21.100.000 18.900.000 2.500.000 2.500.000 600.000 4.400.000		21.100.000 18.900.000 2.500.000 2.500.000 600.000 4.400.000	
					50.000.000	0	50.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. KECAMATAN BUNGI								
1.	KEL. LIABUKU	- Renovasi Lapangan Kuda Hijau - Pembebasan Lahan - Bantuan Pengembangan Keg. PKK Kelurahan - Bantuan Pengembangan Keg. Karang Taruna - Administrasi Pelaporan - Insentif Pengelola	1 Paket 525 M ² 1 Paket 1 Paket 1 Paket 3 Orang	Rehab Baru Baru Baru	35.000.000 5.000.000 2.500.000 2.500.000 600.000 4.400.000	9.832.500 10.750.000	44.632.500 15.750.000 2.500.000 2.500.000 800.000 4.400.000	
					50.000.000	20.382.500	70.382.500	
2.	KEL. WALIABUKU	- Lanjutan Pembangunan Aula Pertemuan - Bantuan Pengembangan Keg. PKK Kelurahan - Bantuan Pengembangan Keg. Karang Taruna - Administrasi Pelaporan - Insentif Pengelola	1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 3 Orang	Lanjutan Baru Baru Baru	40.000.000 2.500.000 2.500.000 600.000 4.400.000	12.015.000	52.015.000 2.500.000 2.500.000 600.000 4.400.000	
					50.000.000	12.015.000	62.015.000	
3.	KEL. KAMPEONAH	- Pembangunan Pagar Kantor Kelurahan - Pembangunan Gedung BKB dan Posyandu - Bantuan Pengembangan Keg. PKK Kelurahan - Bantuan Pengembangan Keg. Karang Taruna - Administrasi Pelaporan - Insentif Pengelola	40 M 8 X 7 M 1 Paket 1 Paket 1 Paket 3 Orang	Baru Baru Baru Baru	20.000.000 20.000.000 2.500.000 2.500.000 600.000 4.400.000	9.832.500 10.750.000	29.632.500 30.750.000 2.500.000 2.500.000 800.000 4.400.000	
					50.000.000	20.382.500	70.382.500	
4.	KEL. PALABUSA	- Lanjutan Pembangunan Rumah Jabatan Lurah - Rehabilitasi Jalan Lingkungan - Bantuan Pengembangan Keg. PKK Kelurahan - Bantuan Pengembangan Keg. Karang Taruna - Administrasi Pelaporan - Insentif Pengelola	1 Paket 58 M X 1,5 M 1 Paket 1 Paket 1 Paket 3 Orang	Lanjutan Baru Baru Baru	18.771.000 23.229.000 2.500.000 2.500.000 600.000 4.400.000	2.867.000 6.136.000	19.638.000 29.365.000 2.500.000 2.500.000 600.000 4.400.000	
					50.000.000	9.003.000	59.003.000	
5.	KEL. NGKARI - NGKARI	- Rehab Balai Pertemuan/Gedung Serbaguna - Bantuan Pengembangan Keg. PKK Kelurahan - Bantuan Pengembangan Keg. Karang Taruna - Administrasi Pelaporan - Insentif Pengelola	220 M ² 1 Paket 1 Paket 1 Paket 3 Orang	Rehab Baru Baru Baru	40.000.000 2.500.000 2.500.000 600.000 4.400.000	10.000.000	50.000.000 2.500.000 2.500.000 600.000 4.400.000	
					50.000.000	10.000.000	60.000.000	
6.	KEL. KALIA-LIA	- Rehab Balai Kelurahan dan Kantor Kelurahan - Bantuan Pengembangan Keg. PKK Kelurahan - Bantuan Pengembangan Keg. Karang Taruna - Administrasi Pelaporan - Insentif Pengelola	129375 M ² 1 Paket 1 Paket 1 Paket 3 Orang	Rehab Baru Baru Baru	40.000.000 2.500.000 2.500.000 600.000 4.400.000	475.000	40.475.000 2.500.000 2.500.000 600.000 4.400.000	
					50.000.000	475.000	50.475.000	
7.	KEL. KOLESE	- Perintisan dan Penimbunan Jalan Lingkar - Bantuan Pengembangan Keg. PKK Kelurahan - Bantuan Pengembangan Keg. Karang Taruna	600 M X 4 M X 0,15 1 Paket 1 Paket	Baru Baru Baru	40.000.000 2.500.000 2.500.000	4.300.000	44.300.000 2.500.000 2.500.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Administrasi Pelaporan - Insentif Pengelola	1 Paket 3 Orang	Baru	600.000 4.400.000		800.000 4.400.000	
					50.000.000	4.300.007	54.300.008	
8.	KEL. LOWU - LOWU	- Rehabilitasi Masjid Ar Rahman - Pembuatan Tribun Sepak Bola - Pembebasan Lahan TK Negeri Pembina - Bantuan Pengembangan Keg. PKK Kelurahan - Bantuan Pengembangan Keg. Karang Taruna - Administrasi Pelaporan - Insentif Pengelola	1 Unit 10 M ² 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 3 Orang	Rehab Baru Baru Baru Baru Baru	15.000.000 20.000.000 5.000.000 2.500.000 2.500.000 600.000 4.400.000	6.153.000 5.000.000	21.153.000 20.000.000 10.000.000 2.500.000 2.500.000 800.000 4.400.000	
					50.000.000	11.153.000	61.153.000	
III. KEC KOKALUKUNA								
1	KEL. LIWUTO	- Pemuatan Gedung TK Akhlus Suffah - Pembuatan Jebatan SMP Neg. 6 Bau Bau - Pembuatan Mimbar Idul FITRI / Idul Adha - Pembuatan Lapangan Renang - Biaya Keg. Festival Perairan Pulau Makasar - Bantuan Pengembangan Keg. PKK Kelurahan - Bantuan Pengembangan Keg. Karang Taruna - Administrasi Pelaporan - Insentif Pengelola	1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 3 Orang	Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru	20.000.000 6.500.000 2.000.000 1.500.000 10.000.000 2.500.000 2.500.000 600.000 4.400.000	24.908.000 1.900.000 450.000	44.908.000 8.400.000 2.000.000 1.950.000 10.000.000 2.500.000 2.500.000 800.000 4.400.000	
					50.000.000	27.258.000	77.258.000	
2.	KEL. KADOLO	- Pembuatan Mimbar Idul Fitri / Idul Adha - Pengadaan Fasilitas LPM - Rehab Halama Majid - Pembuatan Jalan aspal - Pengadaan Kostum - kostum Festival. PUMA - Sablon Kostum Festival Perairan Puma	1 Unit 1 Paket 30 M 30 X 1,5 Meter 1 Paket 1 Paket	Baru Baru Rehab. Baru Baru Baru	2.250.000 5.600.000 5.419.000 23.926.000 4.425.000 630.000	150.000 500.000 975.000 1.500.000 1.500.000	2.400.000 6.100.000 6.394.000 25.426.000 5.925.000 2.130.000	
6.	KEL. KADOLOMOKO	- Tambahan Pagar Kantor Kelurahan - Timbunan Teras Masjid - Pemecatan Lahan / Tanah Kubur	4 X 9 M 1 Paket 1 Paket	Baru Baru Baru	40.000.000 5.850.000 12.125.000	2.250.000 2.356.250 2.500.000	42.250.000 8.206.250 14.625.000	
4.	KEL. LAKOLOGOU	- Per bangunan Tambahan Bangunan	12 M ² (2m X 6m)	Baru	40.000.000	3.045.000	43.045.000	
5.	KEL. SUKANAYO	- Pembuatan Trap - Trap / Jalan Tangga	50 M X 1,5 CM	Baru	173.005.000 27.750.000 373.130.000 706.260.000 1.482.520.000	19.376.260 4.125.000 41.377.500 86.505.000 163.260.000	192.381.260 31.875.000 414.507.500 786.765.000 1.615.780.000	
		- Bantuan Pengembangan Keg. PKK Kelurahan - Bantuan Pengembangan Keg. Karang Taruna	1 Paket 1 Paket	Baru Baru	2.500.000 2.500.000		2.500.000 2.500.000	
3.	KEL. WARURUMA	- Administrasi Pelaporan - Insentif Pengelola - Pembuatan Talud depan Kantor Kelurahan - Bantuan Pengembangan Keg. PKK Kelurahan - Bantuan Pengembangan Keg. Karang Taruna - Administrasi Pelaporan	1 Paket 3 Orang 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket	Baru Rehab. Baru Baru Baru	600.000 4.400.000 22.025.000 2.500.000 2.500.000 600.000		800.000 4.400.000 22.025.000 2.500.000 2.500.000 800.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Insentif Pengelola	3 Orang		4.400.000		4.400.000	pdf
		- Balai pertemuan						
		- Bantuan Pengembangan Keg. PKK Kelurahan	1 Paket	Baru	2.500.000		2.500.000	
		- Bantuan Pengembangan Keg. Karang Taruna	1 Paket	Baru	2.500.000		2.500.000	
		- Administrasi Pelaporan	1 Paket	Baru	600.000		600.000	
		- Insentif Pengelola	3 Orang		4.400.000		4.400.000	
		- Bantuan Pengembangan Keg. PKK Kelurahan	1 Paket	Baru	10.000.000		10.000.000	
		- Bantuan Pengembangan Keg. Karang Taruna	1 Paket	Baru	2.500.000		2.500.000	
		- Administrasi Pelaporan	1 Paket	Baru	2.500.000		2.500.000	
		- Insentif Pengelola	3 Orang		600.000		600.000	
		- Bantuan Pengembangan Keg. PKK Kelurahan	1 Paket	Baru	4.400.000		4.400.000	
		- Bantuan Pengembangan Keg. Karang Taruna	1 Paket	Baru	2.500.000		2.500.000	
		- Administrasi Pelaporan	1 Paket	Baru	600.000		600.000	
		- Insentif Pengelola	3 Orang		4.400.000		4.400.000	

Sumber : Kantor BPM Kota Bau - Bau

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 4

**PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM
(Indepeth Interview Guide)**

Pertanyaan :

1. Bagaimana komitmen birokrasi terhadap pelaksanaan PPMK ?
2. Bagaimana keterlibatan masyarakat dan peran stakeholders dalam pelaksanaan PPMK ?
3. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap program PPMK ?
4. Apa tanggapan Masyarakat terhadap Program PPMK?
5. Apa saja yang disumbangkan masyarakat sebagai bentuk partisipasi dalam pelaksanaan program PPMK?
6. Apakah program PPMK dapat meningkatkan keberdayaan masyarakat?
7. Apa manfaat yang dirasakan masyarakat melalui program PPMK ?

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 5

TRANSKRIP WAWANCARA MENDALAM

Nama : Drs. AMRULLAH ZAU, M.Si
Pendidikan : S2
Pekerjaan : Kepala BPM Kota Bau - Bau
Alamat : Kota Bau - Bau
Hari / Tanggal : Senin, 10 – 11- 2008

Komitmen birokrasi terhadap pelaksanaan program PPMK sangat tinggi. Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) selaku instansi teknis pengelola program PPMK tingkat Kota merupakan penanggung jawab atas suksesnya pelaksanaan program PPMK. Oleh karena itu, kami berupaya untuk melaksanakan dan mengawal program dengan sebaik – baiknya, sehingga apa yang menjadi tujuan dari program PPMK ini dapat terwujud.

Beberapa hal yang kami lakukan adalah mempersiapkan sumberdaya kepada mereka yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program ini, yaitu dengan memberikan pemahaman tentang visi pemberdayaan serta strategi untuk melaksanakan kegiatan pada tingkat lapangan.

Selanjutnya adalah membuat petunjuk teknis dan pelaksanaan sebagai pedoman umum dalam melaksanakan program PPMK. Karena pengelola program pada umumnya berpendidikan Sarjana (S1), maka konsep maupun pemahaman pemberdayaan dapat dengan mudah dipahami. Dengan demikian, diharapkan sasaran program dan tujuannya dapat tercapai.

Salah satu strategi dilaksanakan adalah dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan pada tingkat kelurahan serta merekrut fasilitator yang pada umumnya mereka merupakan fasilitator perencanaan pembangunan Kota Bau – Bau untuk melaksanakan tugas pendampingan.

Hal lain yang menunjukkan komitmen birokrasi dalam melaksanakan program PPMK adalah meningkatnya anggaran PPMK pada setiap tahun. Ditingkatkannya anggaran PPMK, dengan harapan bahwa program ini akan lebih memberi manfaat serta lebih meningkatkan keberdayaan masyarakat. Dan dari hasil evaluasi selama pelaksanaan program hampir disetiap Kelurahan menunjukkan hasil yang sangat memuaskan.

telah akan semakin berdaya meningkat. ini merupakan harapan bapak wali kmembuktikan ota . Karena itu prgram ini sangat mendapat perhatian, sehingga semua unsur yang terlibat dalam progra PPMK akan mendapat catatan tersendiri.

Untuk dapat mensukseskan program ini, maka sumberdaya pengelola sangat manusia pengelola sangat mendukung. Terlihat dari data yang ada, hampir semua pengelola PPMK mulai dari tingkat Kota hingga kelurahan rata – rata mempunyai pendidikan Strata Satu. Sebagai komitmen pemerintah dalam mendukung keberhasilan program, maka dibuat mekanisme kerja yang baik dandituangkan dalam pedoman umum sebagai petunjuk pelaksana dan teknis dalam pengelolaan program PPMK. Salah satunya adalah dengan melibatkan Stakeholder atau oganisasi kemasyarakatan pada tingkat kelurahan LPM fasilitator sebagai tenaga pendamping yang direkrut dari fasilitator perencanaan pembangunan Kota Bau –Bau.

Berdasarkan pengamatan informan, masyarakat keturahan sangat memahami dan mendukung program ini. Dalam kegiatan ini program PPMK, dapat meningkatkan keberdayaan masyarakat karena selain memberi lapangan kerja atau bantuan permodalan bagi usaha ekonomi produktif, juga di dorong untuk menjadi subyek pembangunan yaitu dengan ikut memberi ide, gagasan atau usulan dalam pembangunan keluraha.

TRANSKRIP WAWANCARA MENDALAM

Nama : JUFRI, S.Sos, M.Si
Pendidikan : S2
Pekerjaan : Kabid. Usaha Ekonomi Masyarakat BPM Kota Bau - Bau
Alamat : Kota Bau - Bau
Hari / Tanggal : Rabu, 10-12-2008

Keberhasilan dan kesuksesan dalam pengelolaan program PMMK pada tingkat lapangan merupakan catatan tersendiri Bapak Walikota dalam mengadakan penilaian sehingga berakibat pada pergeseran atau mutasi pejabat disemua tingkatan mulai dari tingkat kota sampai pada lurah. Termasuk tim pelaksana kegiatan (LPM) akan tidak diberi kesempatan kembali untuk mengelola pada tahun berikut apabila memiliki catatan buruk dalam mengelola kegiatan tersebut sehingga sukses tidaknya dalam mengelola program ini akan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelola secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen birokrasi sangat tinggi.

Penguatan kelembagaan juga akan meningkatkan kemampuan dan posisi tawar warga masyarakat dalam berinteraksi dengan pihak – pihak lain, baik dalam berinteraksi ekonomi, sosial budaya, maupun politik. Selanjutnya juga dengan penguatan kelembagaan akan meningkatkan rasa percaya diri masyarakat dalam mengatasi berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Dengan demikian sekaligus akan dapat melindungi masyarakat dari tindakan – tindakan pihak lain yang dapat merugikan kepentingan mereka.

Dalam pelaksanaan program PPMK, pemerintah kota merekrut Fasilitator sebagai tenaga yang akan mendampingi program. Mereka direkrut dari fasilitator perencana pembangunan partisipatif. Tentu dengan kemampuan yang mereka miliki diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan keberdayaan masyarakat.

TRANSKRIP WAWANCARA MENDALAM

Nama : SAILAN, SP
Pendidikan : Strara Satu (S1)
Pekerjaan : Fasilitator
Alamat : Kota Bau – Bau
Hari / Tanggal : Senin, 29-12-2008

Komitmen Birokrasi dalam pelaksanaan Program PPMK sangat tinggi. Baik Birokrasi tingkat Kota maupun birokrasi tingkat kelurahan. Hal ini dapat dilihat dari kesiapan dan kesungguhan Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) selaku instansi teknis pengelolaannya program tingkat kota untuk melaksanakan Program PPMK.

Pemahaman visi pemberdayaan serta strategi yang dilakukan merupakan kunci keberhasilan dalam melaksanakan program. Pelibatan organisasi kemasyarakatan pada tingkat kelurahan, pendampingan dan pemberian dana stimulan serta petunjuk teknis dalam pelaksanaan sebagai pedoman umum pelaksanaan program ppmk, demikian halnya dengan birokrasi tingkat kelurahan, baik aparatur kelurahan, Tim Pelaksanaan kegiatan (TPK) fasilitator, benar – benar harapannya untuk bekerja, sesuai dengan petunjuk sumberdaya pengelola program juga menentukan, namun dengan kualifikasi pendidikan yang pada umumnya sarjana, maka akan memudahkan maka akan memahami program, dengan demikian maka harapan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dapat diwujudkan.

UNIVERSITAS TERBUKA

TRANSKRIP WAWANCARA MENDALAM

Nama : MASRIDA
Pendidikan : SPG
Pekerjaan : Kepala sekolah Tk Bahari
Alamat : Kota Bau - Bau
Hari / Tanggal : Sabtu / 20 – 12 - 2008

Kami sebagai insan pendidikan sangat berterimakasih kepada pemerintah yang telah menurunkan program PPMK ini. Sebelum adanya program ini, kami melakukan aktifitas belajar diruang yang sangat tidak mendukung yaitu dengan meminjam ruang posyandu yang hanya berukuran 4m x 5m. Ukuran tersebut sudah termasuk ruang belajar(dua kelas) dan kantor para guru. Bisa dibayangkan dengan kondisi yang seperti itu tentu tidak akan memberi hasil seperti yang diharapkan oleh tujuan pendidikan itu sendiri. Dengan adanya program PPMK ini, apa yang menjadi harapan kami yaitu pembangunan gedung sekolah TK telah terealisasi. Hari ini kami telah mempunyai gedung tersendiri dengan ukuran 4m x 8m(duaruangbelajar)dan 3m x 4m untuk satu ruang perkantoran. (wawancara,20-12-2008)

UNIVERSITAS TERBUKA

TRANSKRIP WAWANCARA MENDALAM

Nama : Syaifuddin
Pendidikan : SMU
Pekerjaan : Lurah kelurahan Sukanayo
Alamat : Kota Bau - Bau
Hari / Tanggal : Rabu, 15-10-2008

Saya sebagai lurah adalah penanggung jawab program pada tingkat kelurahan, sedang yang mengelola / melaksanakan kegiatan adalah tim pelaksana kegiatan yang diambil dari unsur LPM. Selanjutnya TPK dalam melakukan pekerjaan akan didampingi oleh seorang fasilitator. Pelaksanaan program ini didahului mekanisme musyawarah untuk merencanakan dan di tindak lanjuti dengan pelaksanaan program. Dalam melakukan musyawarah kegiatan, saya bersama tim pengelola lain baik dari tim secretariat, fasilitator selalu proaktif dalam memberikan arahan ataupun pertimbangan – pertimbangan yang rasional dalam menentukan kegiatan. Selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan baik itu kegiatan fisik maupun non fisik (usaha ekonomi produktif) dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang diangkat melalui forum musyawarah pada tingkat LPM. Mekanisme itu sudah diatur dalam petunjuk teknis. Saya sebagai penanggung jawab bersama fasilitator sebagai pendamping program tinggal mengawasi saja sekaligus membantu kalau terdapat hal – hal yang menghambat dalam pelaksanaannya (Wawancara, 15-10-2008)

TRANSKRIP WAWANCARA MENDALAM

Nama : Wayan
Pendidikan : Strata Satu (SI)
Pekerjaan : Ketua LPM Liabuku
Alamat : Kota Bau - Bau
Hari / Tanggal : Senin /15 – 12 - 2008

kami memang LPM bertanggungjawab terhadap semua pelaksanaan kegiatan program dikelurahan baik fisik maupun kegiatan ekonomi produktif, tetapi kami dalam mengelola mengedepankan prinsip transparansi dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan ide, gagasan ataupun usulan terhadap pelaksanaan program. Dengan mekanisme seperti ini ternyata respons masyarakat sangat baik, karena pengelolaan ini kami membicarakan dan mengelolanya secara transparan pada masyarakat tentang maksud kegiatan ini serta besaran dana yang akan dikelola serta bangunan apa yang akan dilakukan sehingga tidak terkesan tertutup". (Wawancara, 15-12-2008)

UNIVERSITAS TERBUKA

TRANSKRIP WAWANCARA MENDALAM

Nama : Baniu
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : LPM Kelurahan Kolese
Alamat : Kota Bau - Bau
Hari / Tanggal : Sabtu / 06-12-2008

Kami berupaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, selain itu kami benar – benar menjalankan sesuai dengan arahan dan petunjuk teknis yang ada. Kami juga mempunyai cara khusus untuk merangsang mereka melunasi pembayaran cicilan yaitu dengan memberikan harapan kepada mereka bila mereka mampu membayar cicilan tepat waktu dengan bunga yang ditetapkan 1% maka tahun berikutnya mereka akan mendapatkan bantuan pinjaman lagi, namun bila mereka dengan sengaja tidak melunasi kewajibannya tanpa alasan yang memungkinkan untuk pemberian kompensasi, maka mereka akan dikenai sanksi yaitu apa yang menjadi jaminan atas pinjaman akan dilelang dan selanjutnya mereka akan direkomendasikan kepada pihak pemerintah untuk mendapatkan perhatian dan tidak akan diberikan lagi bantuan dalam bentuk apapun dan dari program manapun. Dan kami juga memberikan pemahaman kepada mereka bahwa program ini bukan bantuan hibah tetapi ada tanggung jawab yang harus ditunaikan serta manfaat bagi mereka adalah dapat mengembangkan usaha karena mereka memang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai bukti masih dapat diberdayakan”. (Wawancara, 06-12-2008)

TRANSKRIP WAWANCARA MENDALAM

Nama : LA SARI OMBI
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Toko Masyarakat Kelurahan Waborobo
Alamat : Kota Bau - Bau
Hari / Tanggal : Sabtu /15 -11-2008

Kami sangat senang dengan program ini, karena kami masyarakat bisa mendapat pekerjaan, meskipun kami dibayar/ diupah dengan harga yang lebih kecil dari upah pada umumnya tapi kami tidak berkeberatan. Kami sadari kalau ini bukan proyek tapi hanyalah bantuan dari pemerintah untuk masyarakat kelurahan dalam membangun daerah kami. Apalagi yang kita bangun adalah kampung sendiri. Jadi pada prinsipnya kami sangat senang dan tidak mempersoalkan besar atau kecilnya upah yang kami diberikan, karena manfaatnya kami juga yang merasakan.
(Wawancara, 15-11-2008)

UNIVERSITAS TERBUKA

TRANSKRIP WAWANCARA MENDALAM

Nama : Kelompok Usaha
 Pendidikan :
 Pekerjaan : Kelompok Usaha
 Alamat : Kota Bau - Bau
 Hari / Tanggal : Sabtu / 06-12-2008

Pinjaman PPMK ini sangat membantu kami untuk mengembangkan usaha dengan bantuan ini kami dapat menambah jenis jualan dan memperbesar jualan, dengan pinjaman 1% dan waktu pengembalian maksimal 10 bulan, itu sangat tidak memberatkan apalagi pembayarannya tidak langsung ditunaikan paa bulan berikut setelah pengambilan pinjaman, tetapi setelah dana tersebut dikelola satu bulan dari waktu pinjaman. Kemudian kami juga dijanjikan akan diberikan lagi bila cicilan lunas. Keadaan ini membuat semangat kami untuk berpartisipasi dan kooperatif dalam membayar cicilan yang dipinjamkan". (Wawancara, 06-12-2008)

Pinjaman ini sangat membantu mengembangkan usaha kami, tetapi mungkin ke depan besarnya dapat ditingkatkan karena seperti usaha kami ini dengan bantuan pinjaman Rp. 500.000,- masih belum dapat membantu secara berarti untuk mengembangkan usaha kami karena masih banyak jenis jualan yang belum kami sediakan, seandainya diberikan pinjaman Rp. 1.000.000 – 2.000.000, baru dapat terasa karena usaha seperti kami ini pak, makin banyak variasi jualaninya makin cepat berkembang, karena masyarakat pun bila datang membeli dan barangnya tidak ada menjadi malas lagi datang ke tempat kami karena barang yang dijual tidak lengkap, tetapi secara umum bantuan pinjaman ini sangat berarti bagi pengembangan usaha kami". (Wawancara, 07-12-2008)

Terus terang dana bergulir yang diberikan kepada saya sangat memberi manfaat karna saya dapat menambah modal usaha saya. Tetapi dalam beberapa waktu ini, saya mengalami kemacetan. Bukan karena saya tidak mau membayar tapi karena saya dalam beberapa kali mengalami kerugian. Dana yang ada pada saya terbatas sehingga dengan mengalami beberapa kali kerugian dana yang kamim gunakan sebagai modal akan semakin habis. Jangankan untuk mengembalikan, mencukupi kebutuhan sehari-hari saja sangat susah". (Wawancara, 28 – 12 – 2008)

TRANSKRIP WAWANCARA MENDALAM

Nama : HIJIRU
Pendidikan : SMU
Pekerjaan : Toko Pemuda (Karang Taruna)
Alamat : Kota Bau - Bau
Hari / Tanggal : Sabtu / 20-12-2008

Kami merasa bahwa, adanya program PPMK ini sangat memberi manfaat bagi kelurahan kami. Selain kegiatan pembangunan sarana dan prasarana jalan setapak, gedung sekolah TK, kegiatan kepemudaan juga telah dibangun melalui program ini yaitu pembuatan sarana olah raga (bulu tangkis). Dengan adanya sarana olah raga ini, maka kegiatan tahunan yang biasa dilakukan di kelurahan kami seperti PORSENI telah dapat dilakukan dengan kondisi lapangan yang cukup memadai, karena lapangan yang ada dibangun secara permanen. (wawancara, 20-12-2008)

UNIVERSITAS TERBUKA